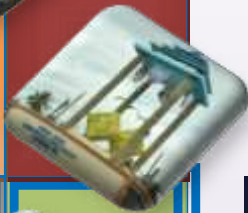




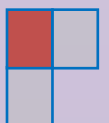
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



TUGU DODOL

PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telepon (0517) 21076/21526 Kandangan 71211





IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Akuntabilitas merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian dan diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan dan amanah demi mewujudkan Visi “**Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat**”. Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 merupakan tahun Pertama pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023.

Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini disusun menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada periode tahun pertama. Perkembangan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada seluruh jajaran organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menunjukkan peningkatan kinerja sebagaimana tertuang dalam laporan hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, yaitu: menunjukkan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun, terakhir hasil evaluasi AKIP tahun 2018 dengan nilai 76,23 (Predikat BB) atau meningkat 1,05 poin dari tahun 2017 dengan nilai 75,18 (Predikat BB), tahun 2016 dengan nilai 70,03 (Predikat BB), tahun 2015 dengan nilai 65,43 (Predikat B), dan tahun 2014 dengan nilai 60,32 (Predikat B).





Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka hasil Pengukuran secara mandiri (*self assessment*) terhadap 5 (lima) Tujuan, 8 (delapan) Indikator Kinerja Tujuan, 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis dan 38 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran.

Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Tujuan, 4 (empat) Indikator Kinerja Tujuan yang tercapai dengan pencapaian $\geq 100\%$, dan 4 (empat) Indikator Kinerja tidak tercapai dengan pencapaian $< 100\%$.

Dari 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis, 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang tercapai dengan pencapaian $\geq 100\%$, sedangkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis tidak tercapai dengan pencapaian $< 100\%$.

Dan dari 38 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran, sebanyak 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Sasaran yang pencapaian kinerjanya $\geq 100\%$, sedangkan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Sasaran yang pencapaian kinerjanya $< 100\%$.

Sedangkan dari Hasil capaian pengukuran terhadap 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019, terdapat 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama yang pencapaian kinerjanya $\geq 100\%$ dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama yang pencapaian kinerjanya $< 100\%$.

Dari hasil pengukuran kinerja masih terlihat adanya kekurangberhasilan yang ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja sasaran di bawah seratus persen. Hal tersebut akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 sebesar 117,39%. Tercapainya capaian kinerja Sasaran ini karena adanya komitmen dari seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja akan menjadi prioritas dan perhatian dalam perencanaan kinerja ke depan.

Kandangan, Maret 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019. Shalawat dan Salam kita Sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat, Kerabat, Pengikut Beliau dari dahulu, sekarang dan sampai akhir nanti.

Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan : yang didalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban mengenai keberhasilan ataupun kegagalan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan daerah yang dijabarkan melalui program-program Pembangunan.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Kandangan, Maret 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. LATAR BELAKANG	I-1
B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	I-2
1. Permasalahan Pembangunan Daerah	I-2
2. Isu Strategis Daerah	I-13
C. KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH	I-19
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	I-22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJMD)	II-1
1. Visi	II-1
2. Misi	II-4
3. Tujuan dan Sasaran.....	II-9
B. PERENCANAAN KINERJA	II-14
1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	II-14
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	II-16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	III-3
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2017-2018	III-3
1). Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	III-10
2). Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	III-18
3). Evaluasi Dan Analisis Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	III-21
1. Misi I : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya	III-22
1). Tujuan 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya.....	III-22
Sasaran 1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan	III-22
Sasaran 2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan	III-28



2. Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal.	III-32
1). Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	III-32
Sasaran 1. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	III-32
Sasaran 2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	III-38
Sasaran 3. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	III-40
Sasaran 4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-50
Sasaran 5. Meningkatnya Investasi PMDN	III-56
Sasaran 6. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	III-58
3. Misi III : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang menunjang Sektor Perekonomian	III-63
1). Tujuan 1. Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	III-63
Sasaran 1. Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	III-63
4. Misi IV : Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan	III-78
1). Tujuan 1. Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan.....	III-78
Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat.....	III-78
Sasaran 2. Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	III-90
Sasaran 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	III-97
5. Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis	III-102
1). Tujuan 1. Indeks Reformasi Birokrasi.....	III-102
Sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik.....	III-102
Sasaran 2. Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi.....	III-123
Sasaran 3. Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	III-130



Sasaran 4. Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan...	III-136
B. REALISASI ANGGARAN	III-138
C. DAFTAR PRESTASI TINGKAT NASIONAL/PROVINSI.....	III-153
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. SIMPULAN	IV-1
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	IV-3

LAMPIRAN-LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta





Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan Akuntabilitas Kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan hasil kinerja sebagai pertanggung jawaban kinerja organisasi kepada instansi yang lebih tinggi.

Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perjanjian kinerja dimaksud telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan dana baik dari APBD maupun sumber dana lainnya serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan (*gap expectation*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika





perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal daerah, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan 5 (lima) tahun disajikan sebagai berikut :

1) Kesejahteraan Masyarakat

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013 menunjukkan angka 5.68 persen dan naik menjadi 5.79 persen pada tahun 2014, meningkat pada tahun 2015 menjadi 6.05 persen. Kontribusi PDRB kategori pertambangan batubara yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kondisi perekonomian yang mulai menanjak naik sejak tahun 2016 pada angka 6.05 persen dan berlanjut ke Tahun 2017 menjadi (6.13 persen) masih tetap membutuhkan dorongan yang besar untuk terus bertumbuh pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dibutuhkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang kuat dan inklusif, dimana dapat memberikan pengaruh yang luas bagi seluruh masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki Hulu Sungai Selatan.
- b. Persentase penduduk miskin di Hulu Sungai Selatan masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Hulu Sungai Selatan berada pada tahun 2013 berada pada angka 6,67 persen, jauh diatas provinsi yang berada di angka 4,73 persen, meningkat menjadi 6,77 persen pada tahun 2014, pada tahun 2015 menurun menjadi 6,45 persen, penurunan kembali terjadi pada tahun 2016 menjadi 6.29 persen, dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 5.8 persen. Walau demikian, terdapat sisi positif dari upaya pemerintah bersama seluruh stakeholder untuk penanggulangan





masalah kemiskinan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Hulu Sungai Selatan pada periode 2014 sampai 2017.

- c. Angka kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sebesar 395 kasus, cenderung mengalami fluktuatif pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2014 dan 2015 angka kriminalitas menjadi 290 kasus dan 148 kasus dan pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 214 kasus dan 232 kasus.

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebab banyaknya kasus kriminalitas yang belum tertangani bisa berakibat pada perkembangan psikologis masyarakat dan mengurangi rasa nyaman dan aman kehidupan masyarakat. Sedangkan masih tingginya angka kriminalitas perlu dikurangi dengan perbaikan masalah-masalah sosial ekonomi, pengurangan pengangguran, pendidikan moral maupun yang berhubungan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara.

2) Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah karena tingkat pendidikan mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan bidang Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah menurunnya tingkat pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang SD, masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/MA, menurunnya APS untuk jenjang SMP/MTs, adanya kecenderungan penurunan rasio sekolah terhadap murid sekolah dasar dan SMA/SMK :

- a. Pada tingkat SD/setara, persentase pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2015-2017 cenderung meningkat, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 36,49 persen.
- b. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 sebesar 58,11 persen. Penurunan ini tidak bertahan lama, sebab pada tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 69,60 persen. Pada tahun-tahun berikutnya, APM SMA/MA/SMK di Hulu Sungai Selatan mengalami fluktuasi dan mencapai 64,18 pada Tahun 2017.





- c. APS SMP/MTs di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu tahun 2013-2017 kondisi yang fluktuatif dari tahun ke tahun yaitu dari 99,12 persen sampai 99,49 persen. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 98,93 persen. Meskipun mengalami penurunan ditahun 2014, namun meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 99,49 persen.
- d. Rasio guru terhadap murid sekolah dasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2013-2017 masih cukup tinggi. Namun demikian rasio tersebut memiliki kecenderungan menaik pada tahun 2015 sampai tahun 2017, tahun 2013 sebesar 9,65%, tahun 2014 sebesar 10,51%, tahun 2015 sebesar 8,54%, tahun 2016 sebesar 8,58%, dan tahun 2017 sebesar 8,63%.
- e. Rasio guru terhadap murid tahun 2013 untuk jenjang SMP/MTs sebesar 9,56 persen, naik menjadi 10,03 persen pada tahun 2014, dan menurun menjadi 8,60 pada tahun 2015 kembali naik pada tahun 2016 menjadi 10,08 persen. Dan tetap naik pada tahun 2017 menjadi 13,10 persen.
- f. Rasio guru terhadap murid tahun 2013 untuk jenjang SMA/MA/SMK sebesar 8,41 persen, meningkat menjadi 8,64 persen pada tahun 2014, dan meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 11,64 persen. Kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 13,59 persen. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 12,90 persen.

3) Bidang Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi pada bidang kesehatan yaitu:

- a. Sektor kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 2 (dua) tahun terakhir menggambarkan permasalahan kesehatan ibu dan anak menjadi masalah penting. Kematian ibu dan bayi semakin meningkat dari 2 tahun terakhir. Persalinan yang ditangani tenaga kesehatan mencapai target namun kematian ibu dan bayi masih tinggi yang mencerminkan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Untuk itu diperlukan upaya kesehatan yang bersifat reformatif dan akseleratif yang ditujukan untuk peningkatan akses, kualitas pelayanan kesehatan dan





kesehatan lingkungan terutama dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan umur harapan hidup, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pemberdayaan masyarakat.

b. Meningkatnya persentase balita gizi buruk. Persentase bayi dengan gizi kurang pada tahun 2013 yaitu sebesar 2 dan tetap sampai tahun 2014, pada tahun 2015 menurun menjadi 1, dan naik lagi menjadi 3 pada tahun 2016, pada tahun 2017 menurun kembali menjadi 1, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih ditemukan balita gizi buruk, namun angkanya sangat rendah yaitu dibawah 1% (berdasarkan WHO dibawah 10% = rendah). Oleh karena itu, perlu digalakkan operasi timbang/sweeping/kunjungan rumah untuk balita yang tidak dibawa ke posyandu dengan harapan persentase balita gizi kurang terus mengalami penurunan. Kegiatan tersebut sampai saat ini masih terus dilaksanakan oleh kader dan petugas kesehatan di desa.

4) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aspek pelayanan umum dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga dapat dilihat dari sarana prasarana umum seperti jaringan jalan, irigasi. Permasalahan utama pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan untuk jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik masih sangat rendah, dari panjang jalan kabupaten sepanjang pada tahun 2014 sebesar 256,45 km, pada tahun 2015 menjadi 360,05 km, pada tahun 2016 menjadi 358,87 km, dan pada tahun 2017 menjadi 366,27 km. Adapun penyebab masih rendahnya persentasi jalan kabupaten yang dalam kondisi baik adalah karena (1) Besarnya panjang jalan yang harus dipelihara; (2) Pengawasan yang kurang; (3) Kualitas pembangunan jalan yang buruk; (4) Kondisi fisik/tanah yang labil; (5) Terbatasnya biaya pemeliharaan jalan; dan (6) Seringnya terjadi genangan air di jalan akibat hujan yang dapat merusak jalan.

b. Rasio Panjang seluruh saluran irigasi adalah 88,52 pada tahun 2014, pada tahun 2015 menjadi 89,72, pada tahun 2016 menjadi 85, dan pada tahun 2017 menjadi 89. Dari nilai tersebut





mengindikasikan bahwa ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian masih belum mencukupi, yang berakibat pada kawasan budidaya pertanian yang berada di luar saluran irigasi, proses pengairan/tata airnya menggunakan kondisi alami/kearifan lokal daerah.

c. Rendahnya akses penduduk terhadap air bersih. Dimana persentase penduduk berakses air bersih pada tahun 2013 sebesar 13.641 dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 14.812, dan meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 15.382, dan meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 16.276, pada tahun 2017 meningkat menjadi 16.906. Meskipun meningkat, akses penduduk terhadap air minum ini harus terus ditingkatkan karena berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Permasalahan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman terjadi pada aspek pelayanan umum untuk Ruang Terbuka Hijau, Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memiliki Ruang Terbuka Hijau, namun Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB baru sebesar 12,534 pada tahun 2017. Untuk memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, selama 5 (lima) tahun ke depan Kabupaten Hulu Sungai Selatan membutuhkan RTH Publik yang lebih luas lagi.

Penanganan sampah masih belum optimal, hal ini terlihat dari Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk masih sangat rendah, yaitu pada kisaran 1,17. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena jika tidak segera dilakukan tindakan maka penumpukan timbulan sampah akan terus terjadi sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan gangguan lingkungan dan ekologi.

6) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah polisi pamong praja yaitu pada tahun 2013-2017 memang mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sebanyak 48 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 91 orang namun Rasio jumlah polisi





pamong praja per 10.000 penduduk masih rendah dan menjadi permasalahan utama di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini dapat berakibat kapasitas pemma dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah/perda dan keputusan Kepala Daerah akan mengalami hambatan.

7) Bidang Sosial

Permasalahan utama bidang sosial tidak terlepas dari masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permasalahan sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu meningkatnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2013 jumlahnya mencapai 3.804 orang, pada tahun 2014 mencapai 4.333 orang, pada tahun 2015 mencapai 6.969, pada tahun 2016 mencapai 9.971, dan pada tahun 2017 mencapai 8.563. Masalah sosial ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah sebagai salah satu kewajiban untuk mengayomi masyarakat.

8) Bidang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja Permasalahan pada bidang tenaga kerja meliputi:

- a. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2014 yaitu sebesar 68,47 persen menjadi 65,27 persen, di tahun 2015 dan 2017 meningkat menjadi 69,65 dan 71,38 persen.
- b. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka tahun 2013 mencapai 4,42 persen menjadi 2,64 persen pada tahun 2014 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 2,86 persen, sampai akhirnya pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 2,02 persen.

9) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

- a. Tingginya Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2015 sebesar 88,89, pada tahun 2016 sebesar 89,36, pada tahun 2017 sebesar 89,08.





- b. Terkait status kota layak anak ; Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014 menyandang sebagai status kota layak anak Rintisan, artinya Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih harus berkomitmen menuju kota layak anak.
- c. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perempuan yang bekerja pada lembaga Pemerintah Daerah pada tahun 2013 sebanyak 3.815 orang, pada tahun 2014 sebanyak 3.561, pada tahun 2015 sebanyak 2.938, pada tahun 2016 sebanyak 2.919, dan pada tahun 2017 sebanyak 2.463 . Sebagian besar perempuan yang bekerja di Pemerintah adalah sebagai staf dan guru. Hal ini masih perlu ditingkatkan di tahun-tahun mendatang, sehingga peran serta perempuan dalam pemerintahan semakin nyata.

10) Bidang Pangan

Permasalahan bidang pangan adalah menurunnya ketersediaan pangan dari tahun ke tahun. Selain itu produksi pangan utama juga mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga 2014.

Masih perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk setempat dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

11) Bidang Pertanahan

Secara umum sertifikat hak milik (SHM) mengalami kenaikan setiap tahunnya, mengingat jumlah sertifikat pada tahun 2014 hanya 698 lembar dan pada tahun 2017 mencapai 4.460 lembar. Walaupun mengalami peningkatan luas lahan yang bersertifikat namun belum secara keseluruhan telah dapat diselesaikan. Selain jumlah lahan yang bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara juga harus diselesaikan dengan baik.

12) Bidang Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan bidang lingkungan hidup yaitu:

- a. Seperti data yang tercantum pada grafik dibawah, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami tren penurunan.





b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang fluktuatif dari tahun 2015 yang mencapai sebesar 58.86, turun menjadi 56.02 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 IKLH kembali turun walaupun tidak begitu signifikan sebesar 54.05 karena masih belum mampu melebihi IKLH tahun 2014, dan pada tahun 2017 naik menjadi 54.55. Sumbangan pencemaran udara dari NO₂ dan SO₂ yang meningkat menyebabkan penurunan IKLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

13) Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan utama pada bidang ini pada indikator Pasangan Berakte Nikah yang masih mencapai angka 1537 pada tahun 2014, pada tahun 2015 sebanyak 1592, pada tahun 2016 sebanyak 1572, pada tahun 2017 sebanyak 1190. Hal ini mengindikasikan masih adanya pasangan menikah yang belum memiliki Akte Nikah.

14) Bidang Perhubungan

Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan transportasi publik, hal ini terlihat dari terjadinya Penurunan jumlah AKBD, angkutan perbatasan dan angkutan desa menjadi permasalahan utama di bidang perhubungan.

15) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan bidang KUKM adalah menurunnya partisipasi koperasi secara aktif, hal ini disebabkan adanya koperasi yang tidak dapat menjalankan kewajibannya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menjalankan usahanya.

16) Bidang Penanaman Modal

Peningkatan Investasi lebih banyak dipenuhi oleh sektor PMA, namun nilai investasi tersebut belum cukup besar sehingga masih diperlukan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana bagi tumbuhnya investasi hingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

17) Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama di bidang kelautan dan perikanan, antara lain menurunnya produktivitas kolam, produksi budidaya minapadi (budidaya ikan di sawah) dan produktivitas minapadi. Hal ini terjadi karena budidaya minapadi sangat tergantung pada ketersediaan





lahan dan air dari usaha utama bercocok tanam padi. Kondisi ini mengakibatkan budidaya minapadi agak sulit untuk berkembang.

18) Bidang Pariwisata

Permasalahan utama bidang pariwisata adalah bahwa kontribusi sektor pariwisata hingga saat ini belum secara tersurat masuk ke dalam salah satu kategori lapangan usaha PDRB. Selain itu, jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara. Hal tersebut terjadi karena obyek wisata alam dan obyek wisata buatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum dikelola secara profesional, terutama sarana dan prasarana. Selain itu, kualitas sumberdaya pemandu wisata dan informasi kepariwisataan juga masih belum memadai sehingga belum bisa meningkatkan jumlah pengunjung dan belum dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah.

19) Bidang Pertanian

Permasalahan di bidang pertanian antara lain:

- a. Luas areal padi dari tahun 2012 sampai 2016 memiliki perkembangan yang fluktuatif. Hal ini disebabkan anomali iklim sehingga banyak areal pertanian yang tidak dapat ditanami karena tingginya genangan air. Dengan demikian, apabila ingin mempertahankan dan meningkatkan luas areal padi maka perlu diupayakan adanya tata air yang bagus terhadap lahan pertanian
- b. Terjadi penurunan produksi padi. Untuk produksi tertinggi didominasi oleh padi sebesar 210.442ton pada tahun 2015, pada tahun 2016 meningkat menjadi 231.859 ton dan di tahun 2017 menurun kembali menjadi sebesar 231.423 ton. Penurunan produksi tersebut disebabkan terjadi banjir pada lahan-lahan pertanian sehingga terjadi gagal tanam dan gagal panen, terutama di daerah selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Disamping itu penurunan produksi juga disebabkan karena terjadi iklim yang ekstrim, sehingga pada musim kemarau masih terjadi hujan terutama pada lahan lebak, yang berakibat tidak bisanya penanaman bibit padi.
- c. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2013 sebesar 16.861.73, pada tahun 2014 menjadi 18.752.98, pada





tahun 2015 menjadi 20.438.35, pada tahun 2016 menjadi 21.813.14, dan pada tahun 2017 menjadi 23.169.68

d. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB menurun. Peningkatan terjadi hingga tahun 2015 sebesar - namun di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi -.

e. Nilai Tukar Petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masing-masing memiliki perkembangan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun terakhir. Pada awal periode tahun 2014 mencapai angka 99,83 persen, meningkat menjadi 99,99 persen pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 turun menjadi 97,52 persen, turun kembali menjadi 96,69 persen pada tahun 2017.

20) Bidang Kehutanan

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masing-masing memiliki perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada awal periode tahun 2012 mencapai angka - persen, menurun - persen pada tahun 2013 dan tahun 2014 menjadi - persen, dan meningkat kembali - persen di tahun 2015 dan 2016 menjadi - persen. Peningkatan tersebut belum signifikan sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kegiatan kehutanan yang lebih optimal agar komoditas yang dihasilkan (meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya) mampu memberi kontribusi signifikan terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

21) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan merupakan sektor utama dalam pemberian kontribusi perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang ternyata selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada awal periode tahun 2013 mencapai angka 33.385.62, meningkat pada tahun 2014 menjadi 34.434.08, menurun pada tahun 2015 menjadi 31.908.38, menurun pada tahun 2016 menjadi 30.542.40 dan naik kembali di tahun 2017 menjadi 32.846.85.

22) Bidang Perdagangan

Permasalahan utama bidang perdagangan adalah belum optimalnya angka kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Pada awal periode tahun 2013 mencapai angka 9.309.39, meningkat pada





tahun 2014 menjadi 10.741.09, meningkat pada tahun 2015 menjadi 12.248.18, meningkat pada tahun 2016 menjadi 13.778.59 dan naik kembali di tahun 2017 menjadi 15.476.85. Peningkatan pelayanan guna mendorong kegiatan sektor perdagangan sangat diperlukan, salah satunya adalah kegiatan pembinaan dan pelayanan legalisasi usaha perdagangan.

2. ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis yang tersebut dapat dideskripsikan seperti uraian berikut ini.

a. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sampai pada tahun 2017 teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal. Seperti cakupan akses layanan PAUD misalnya, yang berdasarkan analisis disebutkan masih rendah. Begitupun halnya dengan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non-fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.

Selain itu, akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga masih rendah. Tidak hanya pada urusan pendidikan, pada urusan kesehatan beberapa permasalahan juga masih perlu untuk diperhatikan. Seperti halnya pelayanan kesehatan dasar misalnya





yang masih belum mampu terjangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya daerah perdesaan. Selain infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi-kondisi tersebut tentu memberikan *pressure* tersendiri terhadap pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga pembangunan manusia mengalami perlambatan. Dengan demikian maka, perwujudan aksesibilitas serta kualitas pelayanan baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan dasar lainnya perlu untuk dikedepankan mengingat sumber daya manusia yang baik merupakan wujud nyata dari cita-cita UUD 1945 yaitu kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu daerah rawan bencana banjir. Namun pada faktanya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga merupakan wilayah rawan tanah longsor, bencana kebakaran maupun angin puting beliung. Meskipun demikian, Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum memiliki sistem manajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial serta kesiagaan bahaya bencana. Sistem ini dapat didukung salah satunya dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah yang mengedepankan pariwisata sebagai prioritas pembangunan harus mampu mengamankan modal sosial. Terlebih lagi mengingat pemberlakuan *ASEAN Community* yang semakin memperbesar intervensi budaya-budaya asing terhadap budaya dan nilai-nilai sosial lokal. Perlu adanya tindakan preventif dalam rangka memfilter intervensi budaya yang mungkin mampu mempengaruhi nilai kearifan lokal Hulu Sungai Selatan melalui penguatan modal sosial. Selain itu, PMKS juga menjadi isu tersendiri yang perlu untuk menjadi perhatian. Akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS di Hulu Sungai Selatan masih terbilang lambat. Kondisi-kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PMKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial perlu ditingkatkan.





b. Peningkatan Pertumbuhan Daya Saing Ekonomi Daerah

Indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih berada di kategori sedang namun harus tetap dipantau oleh pemerintah daerah. Selain itu, sebaran penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum merata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran kapasitas SDM masih belum optimal pula. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya kesenjangan pendapatan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Pada level nasional maupun regional provinsi, isu kesenjangan atau disparitas masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan. Sehingga, disamping perlu adanya pengupayaan kerjasama antar wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu pula peningkatan kerjasama antar daerah sekitar Hulu Sungai Selatan demi mengurangi indeks gini.

Dalam rangka merespon tingkat kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu distimulasi melalui penguatan *bargaining position* UMKM serta sumber daya wirausahawan. Namun sampai saat ini permasalahan-permasalahan mendasar berkenaan dengan UMKM dan sumberdaya wirausahawan belum dapat sepenuhnya terselesaikan. Seperti kualitas dan daya saing UMKM misalnya yang masih belum optimal. Selain itu, struktur pelaku usaha masih didominasi usaha mikro yang informal dengan produktivitas terbatas. Pembinaan dan pembekalan sumber daya wirausahawan masih rendah, hal ini melatar belakangi kualitas dan kuantitas SDM pelaku usaha cenderung rendah. Oleh karenanya perwujudan daya saing ekonomi daerah penting untuk diupayakan.

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan data yang telah dihimpun, masih berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi, konsistensi peningkatan investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum mampu menjawab tingginya permintaan yang ada. Disamping itu, sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian masih belum efektif, hal ini berbanding lurus dengan pemasaran produksi pertanian yang juga masih belum optimal. Kondisi-kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,





berkelanjutan, serta berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal. Positifnya, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami konsistensi penurunan.

Pariwisata sebagai kategori unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah sepatutnya menjadi motor penggerak produktif perekonomian daerah. Berdasarkan data yang telah dihimpun, kontribusi penerimaan PDRB melalui komoditas pariwisata belum optimal. Hal ini dapat dipengaruhi perluasan jaringan kemitraan yang belum optimal atau daya dukung infrastruktur dan SDM lokal pariwisata yang masih lemah. Melihat kondisi tersebut, nampaknya peran masyarakat sangat vital untuk mendukung perkembangan pariwisata. Sehingga, sangat rasional bahwa pemberdayaan masyarakat dapat menjadi leverage pembangunan pariwisata, khususnya pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

c. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial Yang Menunjang Sektor Perekonomian

Fasilitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, kondisi infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan masih perlu ditingkatkan, hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Hulu Sungai.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki isu yang cukup serius dengan penyediaan air bersih. Beberapa isu yang perlu diperhatikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkenaan dengan akses air bersih dan lingkungan yang sehat adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya sarana dan prasarana air bersih;
2. Relatif besarnya cakupan wilayah yang berpotensi kekurangan air;
3. Masih tingginya wilayah yang belum terhubung oleh jembatan yang baik;
4. Meningkatnya kualitas perumahan yang terjangkau air bersih, sanitasi, layak huni dan tidak kumuh; dan





5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

Meskipun demikian, rumah dengan jangkauan air bersih, sanitasi, layak huni dan tidak kumuh dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sehingga dalam rangka mengakomodir banyaknya isu serta momentum positif tersebut perlu untuk memberikan afirmasi lebih terhadap isu ini. Oleh karenanya, penyediaan infrastruktur baik fisik, ekonomi maupun sosial sangat penting untuk ditingkatkan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai pada tahun 2017 masih belum mampu mengakomodir 20% RTH Publik dari total 30% RTH dari total luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Meskipun demikian, kualitas penataan ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah cukup baik. Dengan demikian maka, tuntutan untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas penataan ruang menjadi perhatian penting pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengingat pembangunan tanpa IMB masih relatif tinggi. Inilah sebabnya mengapa peningkatan kuantitas yang ekuivalen dengan kualitas sangat penting untuk diperhatikan pemerintah daerah. Hal ini agar peningkatan infrastruktur fisik diiringi dengan kualitas yang ada baik secara teknis maupun non teknis.

- d. Peningkatan Optimalnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan

Administrasi perdesaan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi isu yang sangat penting untuk diakomodir. Disamping peran strategis pembangunan level *bottom* banyak diakomodir Desa, garda terdepan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat adalah desa, sehingga kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karakter dan pondasi perekonomian serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya kapasitas kelembagaan di desa sehingga kualitas pengelolaan desa menjadi tidak begitu efektif dan





efisien. Oleh karena itu, perluasan jangkauan pelayanan melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar perlu untuk diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jika memperhatikan data, isu perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mengalami progress positif. Momentum positif terjadi khususnya pada peningkatan penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan semakin meningkatnya peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan. Hal ini memberikan sinyal positif bahwa perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mendapat respon positif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kondisi ini tentu harus dipertahankan dan perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga momentum positif tersebut dapat *sustain* dan semakin berkualitas.

Berdasarkan data yang telah dihimpun, pencemaran lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan sampai pada tahun 2018. Hal ini menjadi distorsi terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kepariwisataan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alasannya adalah, bargaining position Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat terancam dengan adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi sangat strategis untuk diupayakan pemerintah daerah, mengingat topografi dan karakteristik fisiologi Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu modal utama pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

- e. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program kepala daerah dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan





kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2017, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu untuk ditingkatkan.

C. KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH



Kabupaten Hulu Sungai merupakan Kabupaten yang ada di dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai sebagai daerah otonom, secara nyata terbentuk pada tanggal 2 Desember 1950 yakni saat dilantiknya Pejabat Bupati Kepala Daerah Pertama dan dibentuknya DPRDS, maka pada tanggal 2 Desember 1950 inilah menjadi pancangan tonggak sejarah Berdiri Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian dikukuhkan dengan ketetapan DPRD Tingkat II Hulu Sungai Selatan pada tanggal 26 Maret 1987 Nomor 06/KPTS/DPRD-HSS/1987 tentang Persetujuan Ketetapan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan mengacu undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan reorganisasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu





Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan membentuk lembaga-lembaga pemerintahan dalam bentuk Sekretariat, Badan, Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan, tugas pokok dan fungsi .

Adapun Organisasi yang Telah terbentuk adalah sebagai berikut :

No	Sekretariat/ Badan/ Dinas/ Kecamatan/Kelurahan
A	<p>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Administrasi Pemerintahan <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Tata Pemerintahan b. Bagian Hukum dan Perundang-undangan c. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah d. Bagian Umum 2. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha b. Bagian Kesejahteraan Rakyat c. Bagian Protokol dan Humas d. Bagian Pengadaan Barang Jasa 3. Staf Ahli 4. Jabatan Fungsional
B	<p>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Umum dan Keuangan b. Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Hubungan Masyarakat c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan d. Kelompok Jabatan Fungsional
C	<p>LEMBAGA TEKNIS DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inspektorat b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah c. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan d. Badan Keuangan Daerah





No	Sekretariat/ Badan/ Dinas/ Kecamatan/Kelurahan
	e. Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik f. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan
D	DINAS-DINAS a. Dinas Pendidikan b. Dinas Kesehatan c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup d. Dinas Komunikasi dan Informatika e. Dinas Pertanian f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang g. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian h. Dinas Sosial i. Dinas Ketahanan Pangan j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa l. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPPA m. Dinas Perhubungan n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu o. Perpustakaan dan Kearsipan p. Dinas Perikanan q. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata r. Dinas Perdagangan
E	KECAMATAN a. Padang Batung b. Loksado c. Telaga Langsat d. Angkinang e. Kandangan f. Sungai Raya g. Simpur h. Kalumpang i. Daha Selatan j. Daha Barat





No	Sekretariat/ Badan/ Dinas/ Kecamatan/Kelurahan
	k. Daha Utara
F	KELURAHAN a. Kandangan Kota b. Kandangan Barat c. Kandangan Utara d. Jambu Hulu

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Untuk laporan akuntabilitas kinerja ini selain berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja ini ditekankan pada aspek capaian dari program, sasaran dan kegiatan. Disamping itu juga penyusunannya menyelaraskan dengan substansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistematika Penyusunan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini disajikan penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan laporan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menyajikan secara ringkas visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:





1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

1. VISI



Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau dengan kata lain pandangan jauh ke depan menyangkut kemana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023 merupakan dokumen yang menjabarkan rencana pembangunan lima tahun sesuai masa bhakti kepala daerah terpilih yaitu 2018-2023 dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam dokumen RPJMD terkandung berbagai tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang disusun atas dasar visi dan misi kepala daerah sebagai bentuk pendekatan politis dari kepala daerah pada saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dalam proses penyusunan dokumen RPJMD menggunakan pendekatan secara ilmiah terhadap berbagai tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu juga menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu dengan melibatkan unsur masyarakat dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi daerah, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah, dengan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, maka pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 5 (lima) tahun ke depan terarah pada VISI:





**“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif,
Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan
Akhirat”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1 Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2018-2023**

Pilar-Pilar Visi	Perwujudan dari Pilar Visi RPJMD
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hulu Sungai Selatan	Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia. 2. Layanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas
Meningkatnya Perekonomian dan Kemandirian Masyarakat Hulu Sungai Selatan	Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Basis ekonomi Hulu Sungai Selatan diletakkan pada 3 komponen utama yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian dalam skala luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan (Perikanan tangkap dan perikanan budidaya), perkebunan, peternakan, dan hortikultura, 2. Pariwisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Hulu Sungai Selatan, 3. UMKM dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat.





Pilar-Pilar Visi	Perwujudan dari Pilar Visi RPJMD
	Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemandirian daerah akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi kritis.
Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Pemerintahan yang Bersih (<i>Clean Government</i>)	Menghadirkan tata kelola yang efektif, bersih, dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayanan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>).
Masyarakat Hulu Sungai Selatan yang Semakin Sejahtera dunia & akhirat berlandaskan semangat gotong royong	<p>Terciptanya keadaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis ditandai dengan suasana kondusif dan religius yang sudah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p> <p>Pembangunan kabupaten diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai selatan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.</p> <p>Semangat gotong royong didalamnya terkandung nilai moral yaitu adanya rasa ikhlas untuk berpartisipasi, kebersamaan dan saling membantu antar sesama karena lebih mengutamakan kepentingan bersama yang akan berdampak meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.</p>





2. MISI

Misi merupakan suatu tugas yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai penjabaran dan terjemahan dari visi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam segala bidang, guna menyiapkan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi ambiguitas dalam memahami butir misi maka penjabaran misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.

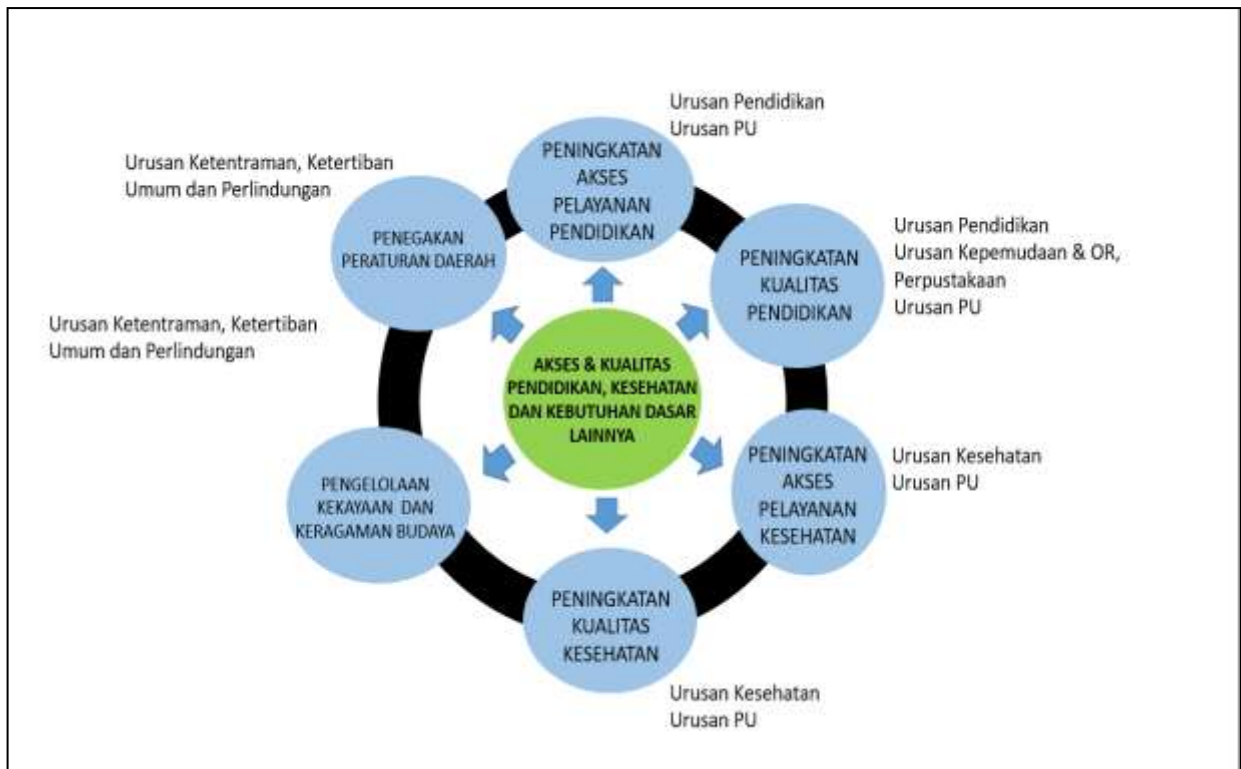
Salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan





dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal.

Dalam upaya pencapaian misi ke-1 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-1 sebagai berikut.



Gambar 1.1 Logicframe Perencanaan Misi 1

Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di bumi Hulu Sungai Selatan baik yang tersimpan di dalam maupun dipermukaan bumi serta potensi sungai mampu menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Nilai guna tersebut diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri.

Dalam upaya pencapaian misi ke-2 maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-2 sebagai berikut.





Gambar 2.2 Logicframe Perencanaan Misi 2

Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

Dalam upaya pencapaian misi ke-3 maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-3 sebagai berikut.



Gambar 2.3 Logicframe Perencanaan Misi 3





Misi 4 : Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat turut serta berperan aktif dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemberdayaan masyarakat sangat besar pengaruhnya terutama jika diarahkan kepada pengelolaan sumberdaya strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan tidak hanya berhenti di dalam proses perencanaan, akan tetapi dalam proses pelaksanaan hingga pengawasan masyarakat harus mampu bersinergi dengan pemerintah.

Dalam upaya pencapaian misi ke-4 maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-4 sebagai berikut.



Gambar 2.4 Logicframe Perencanaan Misi 4

Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

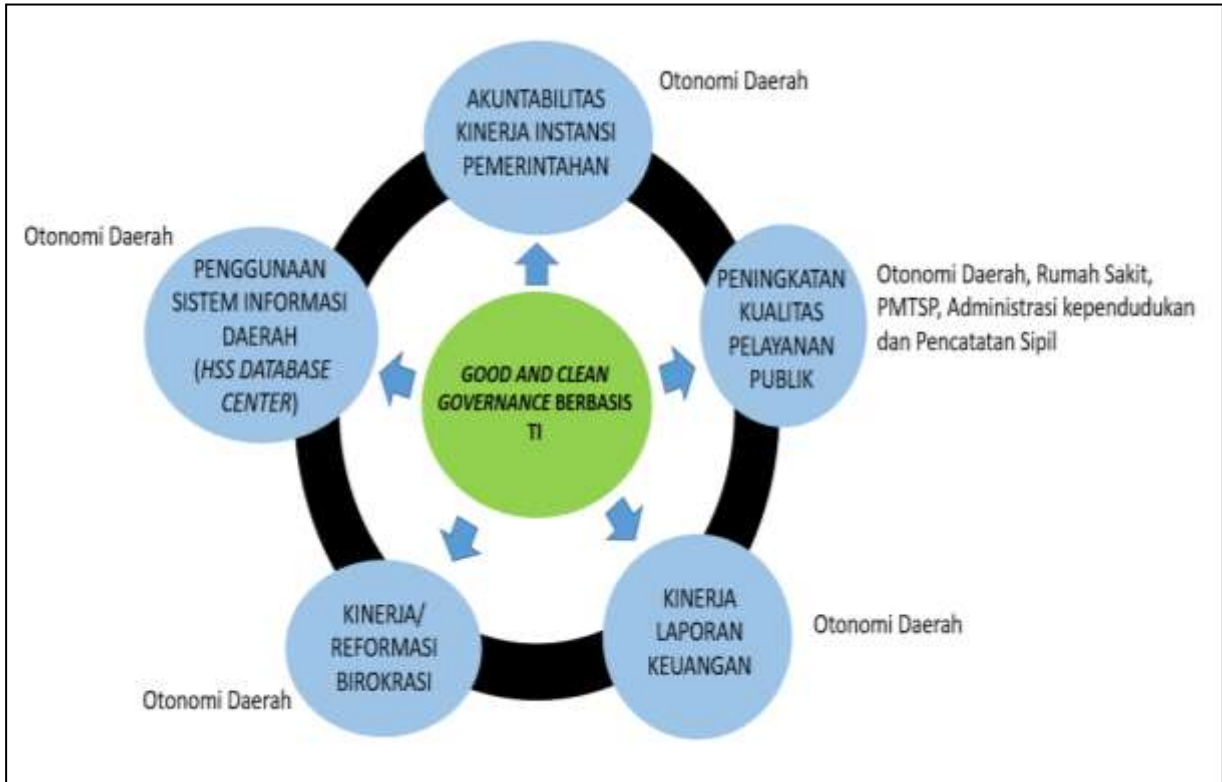
Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk





pemerintahahan yang berlandas pada prinsip *good and clean governance*.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-5 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-5 sebagai berikut.



Gambar 2.5 Logicframe Perencanaan Misi 5

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 2 prioritas wajib:

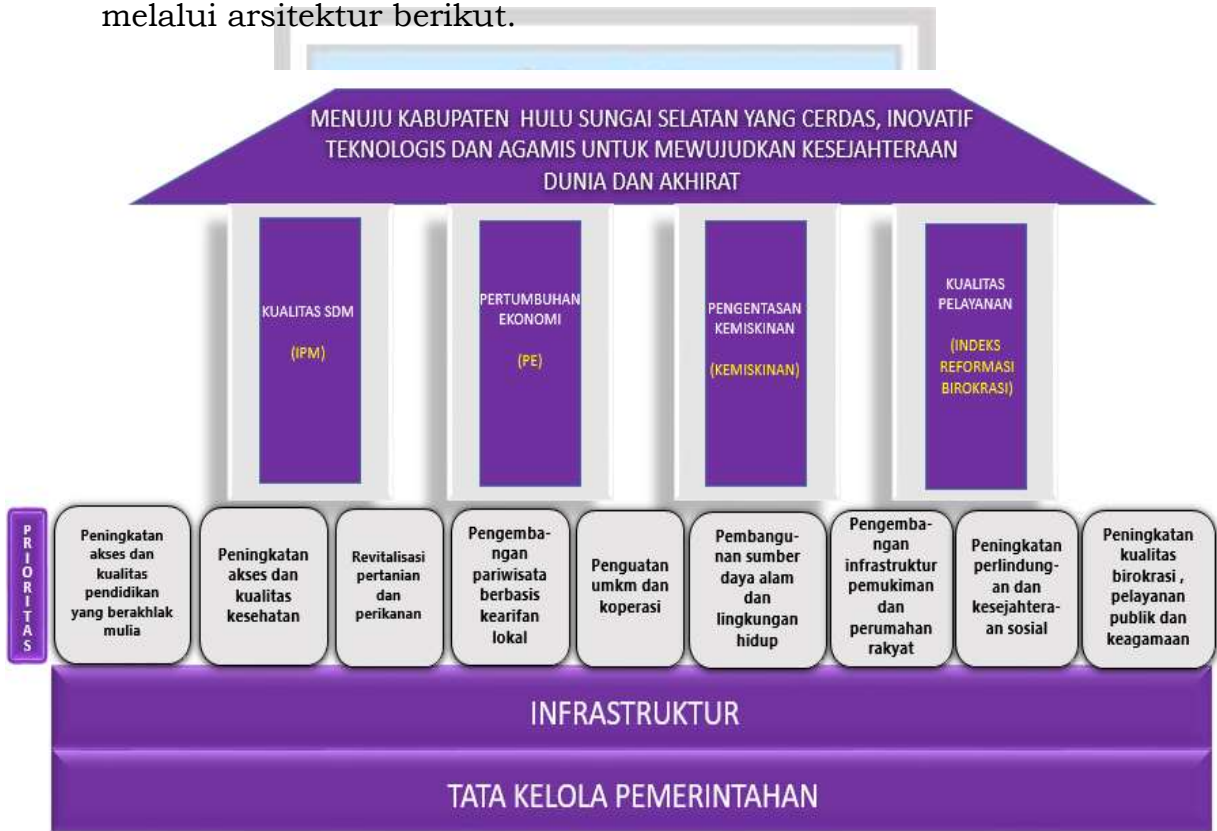
1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia.
2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan.
 - Peningkatan perekonomian melalui 3 prioritas unggulan :
3. Revitalisasi pertanian dan perikanan.
4. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.
5. Penguatan UMKM dan koperasi.
 - Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian
6. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.





7. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat.
8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
9. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan.

Selanjutnya, 9 Prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian di intepretasikan kedalam arsitektur Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar dalam pencapaian Visi, yang dapat dijelaskan melalui arsitektur berikut.



Gambar 2.6 Pondasi dan Pilar Misi Dalam Pencapaian Visi

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahunan, yang mengacu pada pernyataan visi dan misi, tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, namun harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai, serta didasarkan pada issue-isue dan analisis strategik yang mampu mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.





Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran pembangunan :

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan;
2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan;
3. Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman;
4. Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat; dan
5. Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-1 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.7 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-1

Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan, dengan sasaran pembangunan :

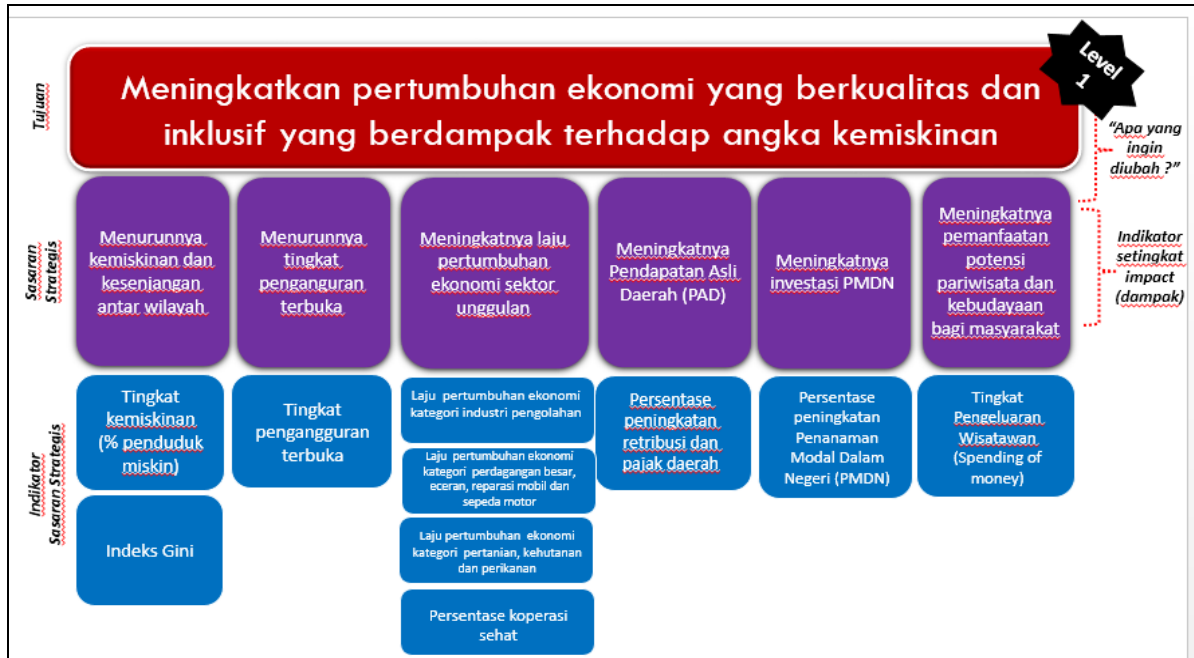
1. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah;
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
3. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Meningkatnya investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); dan





6. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat

Pemahaman terhadap *linieritas* Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-2 yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 2.8 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-2

Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas, dengan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas.

Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-3 yang disajikan sebagai berikut.



Gambar 2.9 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-3



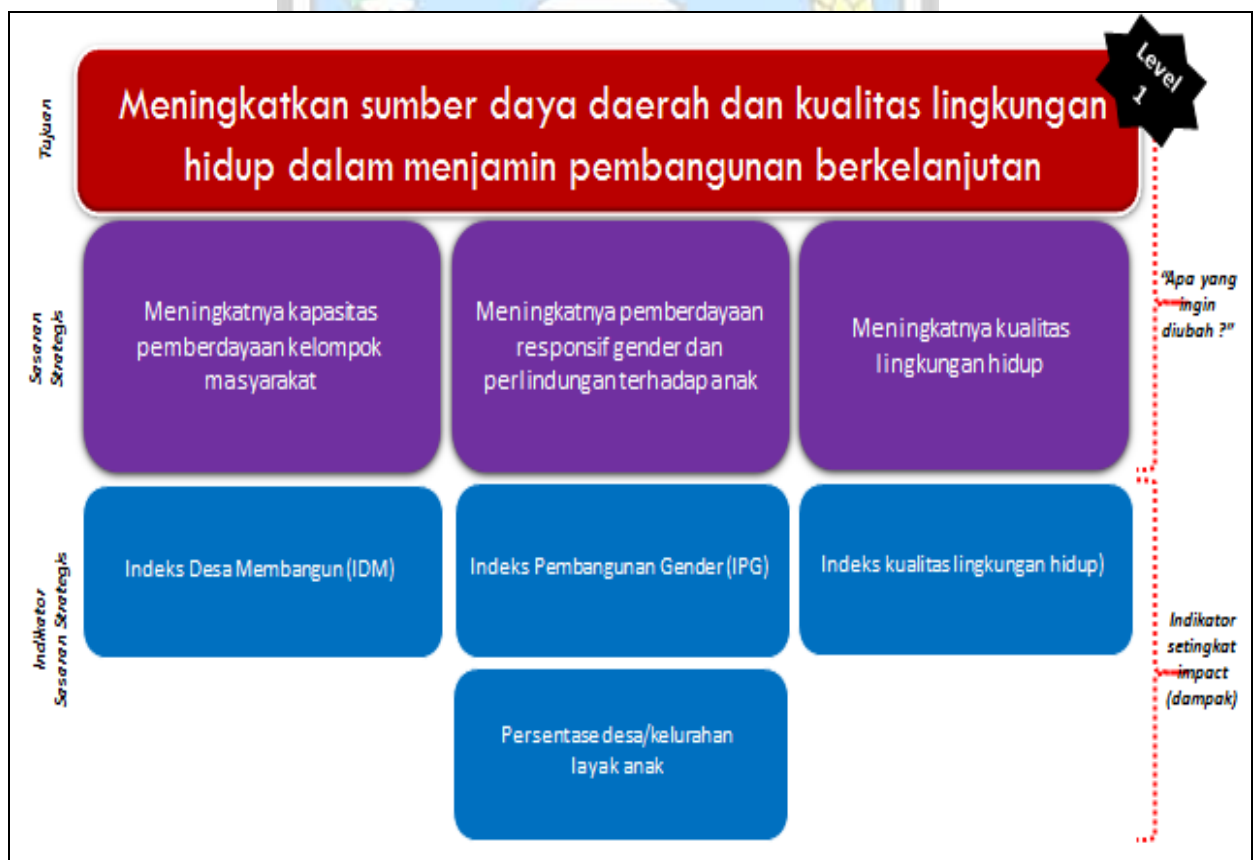


Dalam rangka pencapaian misi Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Sumber Daya Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat;
2. Meningkatnya pemberdayaan reponsif gender dan perlindungan terhadap anak; dan
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-4 yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 2.10 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-4

Dalam rangka pencapaian misi Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

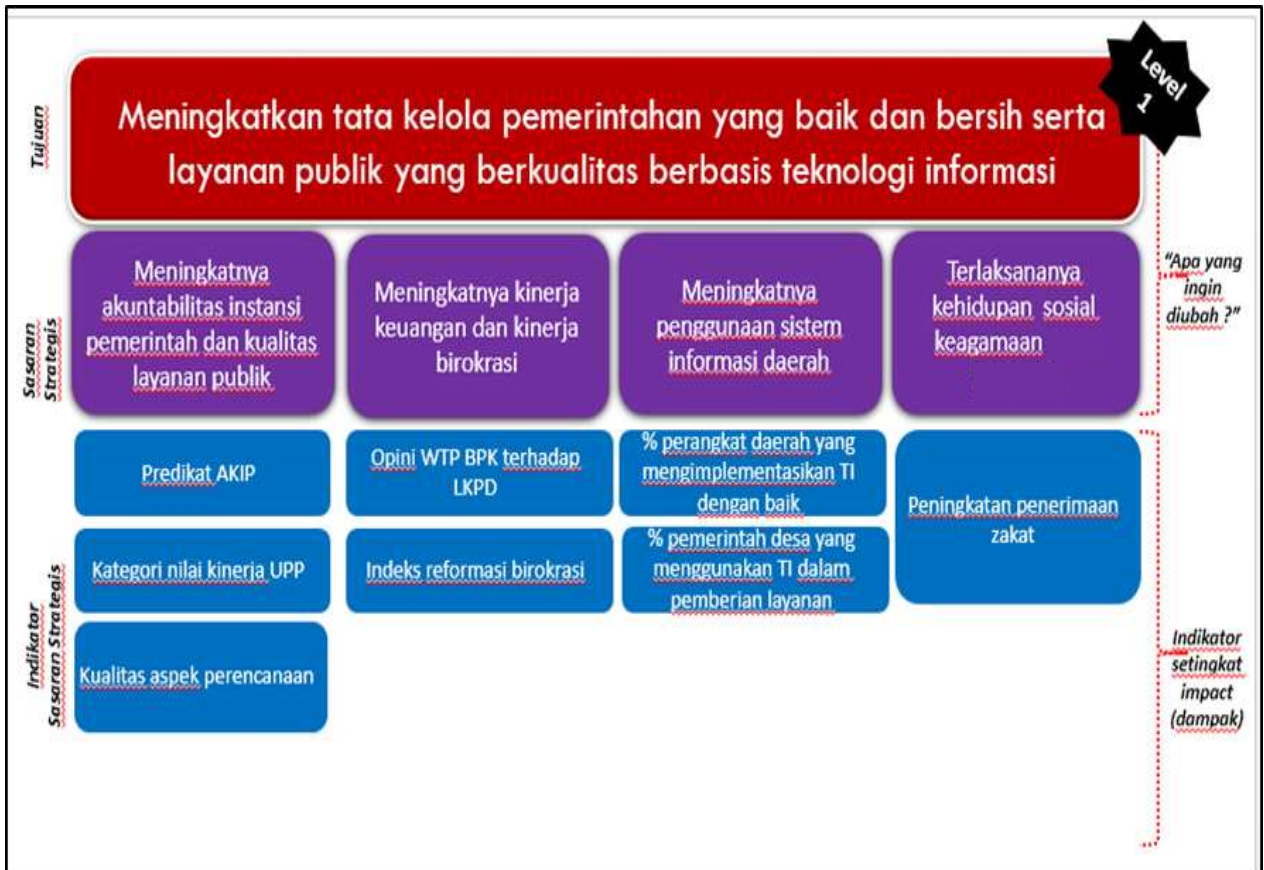
a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran pembangunan yang meliputi:





1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi;
3. Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi Daerah; dan
4. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.11 Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.





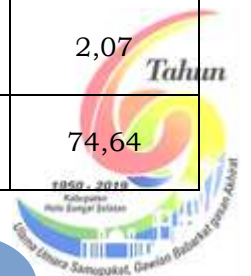
B. PERENCANAAN KINERJA

1. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan dan disertai rencana tingkat capaiannya (target). Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ada dalam Rencana Strategis.

Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	
Misi 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya				
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,41
		2	Harapan lama sekolah	12,70
		3	Rata-rata lama sekolah	8,00
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	66,05
	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	5	PPH Ketersediaan	84,61
	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	6	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	57,00
Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal				
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	7	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	5,14
		8	Indeks Gini	0,318
	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	9	Tingkat pengangguran terbuka	2,07
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	10	Laju pertumbuhan ekonomi	74,64





TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET CAPAIAN
		11	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	4,47
		12	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,38
		13	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	3,27
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	23 milyar
	Meningkatnya investasi PMDN	15	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	4,80
	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	16	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (Spending of money)	Rp. 4.224.480.000
Misi 3 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang menunjang Sektor Perekonomian				
Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	17	Persentase infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	49,64
		18	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	62,45
		19	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	62,68
		20	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	24
		21	Persentase kecukupan RTH publik	24,48
		22	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	53,05
Misi 4 : Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan				
Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	23	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,64
	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,27
		25	Persentase desa/kelurahan layak anak	2,03





TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET CAPAIAN
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	26	Indeks kualitas lingkungan hidup	55,08
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Misi 5 : Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis				
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	27	Indeks Reformasi Birokrasi	68
		28	Predikat AKIP	BB (70,01)
		29	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,51)
	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	30	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP
		31	Indeks Profesionalisme ASN	69,77
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	32	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	13,16
33		Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	8,33	

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

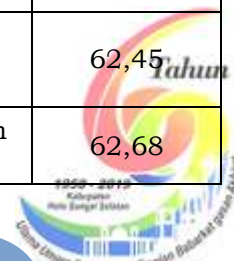
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diperjanjikan Tahun 2019 sebagai berikut.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	12,7
		2	Rata-rata lama sekolah	8,00
		3	Persentase PAUD formal terakreditasi A	2,50
		4	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	6,59
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	66,05





TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
		2	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <= 20 tahun	73,02	
		3	Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	AA	
		4	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	4,35	
		1	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	84,61	
		1	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	57,00	
		1	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	56,58	
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	1	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)
2	Indeks Gini			0,318	
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	1		Tingkat pengangguran terbuka	2,07	
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan		1	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	4,47
			2	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,38
			3	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	3,27
			4	Persentase koperasi sehat	2,35
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	23 milyar
Meningkatnya investasi PMDN	1		Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	4,80	
Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	1		Tingkat Pengeluaran Wisatawan (Spending of money)	4.224.480.000	
Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	1	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan >=40 Km/jam	62,45	
		2	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	62,68	





TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
		3	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	24,00
		4	Persentase kecukupan RTH publik	24,84
		5	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	53,05
Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	1	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,64
	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,27
		2	Persentase desa/ kelurahan layak anak	2,03
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	55,08
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	1	Predikat AKIP	BB (70,01)
		2	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,51)
		3	Kualitas aspek perencanaan	60,28
	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	1	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP
		2	Indeks profesionalisme ASN	69,77
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	1	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	13,16
		2	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	8,33
	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	1	Persentase peningkatan penerimaan zakat	8,00





BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan Laporan Kinerja Tahun Pertama dari Periode RPJMD 2018-2023 yang mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam RPJMD, disertai perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan penjelasan atas keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran. Untuk keutuhan informasi, pada laporan ini juga terlampir Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Pengukuran Kinerja 2019.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target di RPJMD, persentase capaian versus standar yang berlaku, termasuk dengan standar nasional yang terkait. Hasil pengukuran kinerja disajikan menurut kelompok Kinerja Utama yang bersifat makro dan capaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

1. Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus :

Laporan Kinerja (LKj) Kab. HSS Tahun 2019

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$





2. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

➤ Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).

➤ Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Berikut ini disampaikan tingkat capaian indikator kinerja sasaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

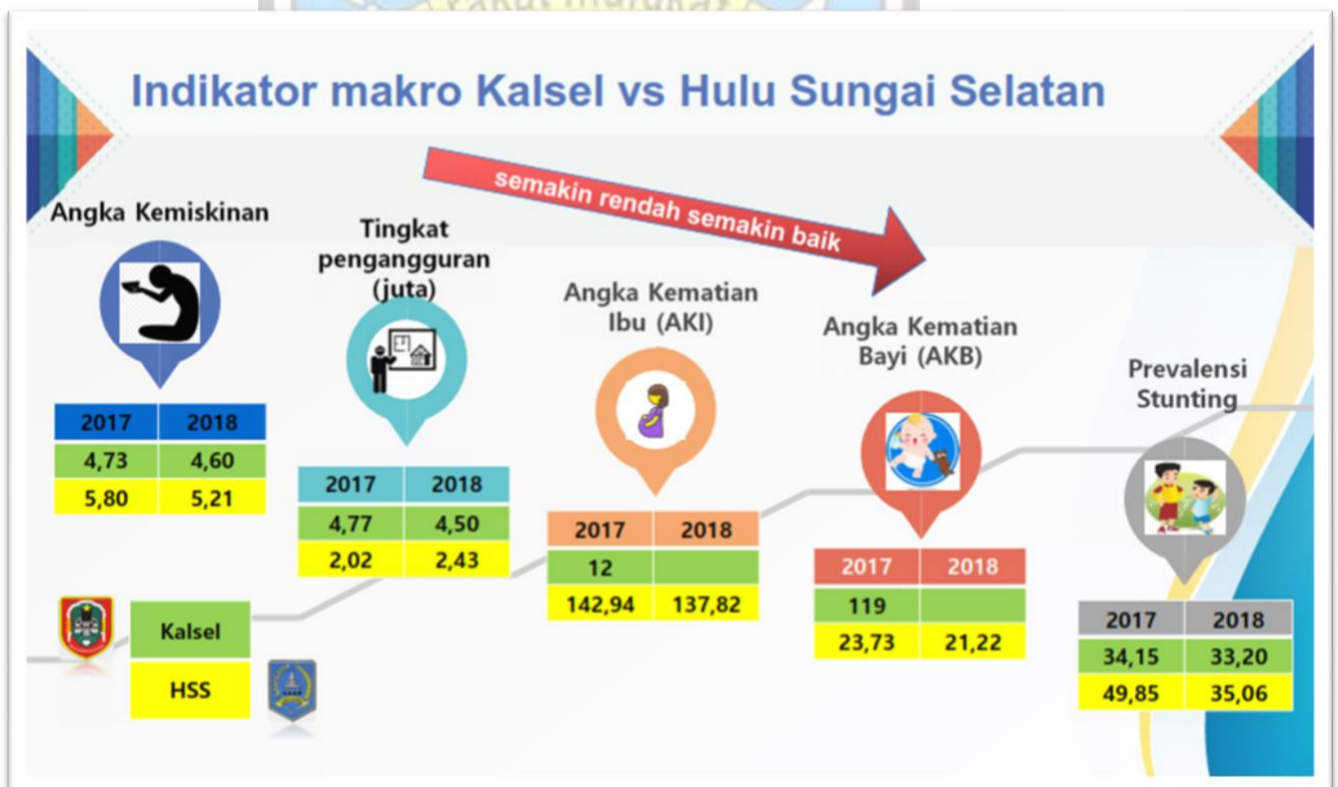
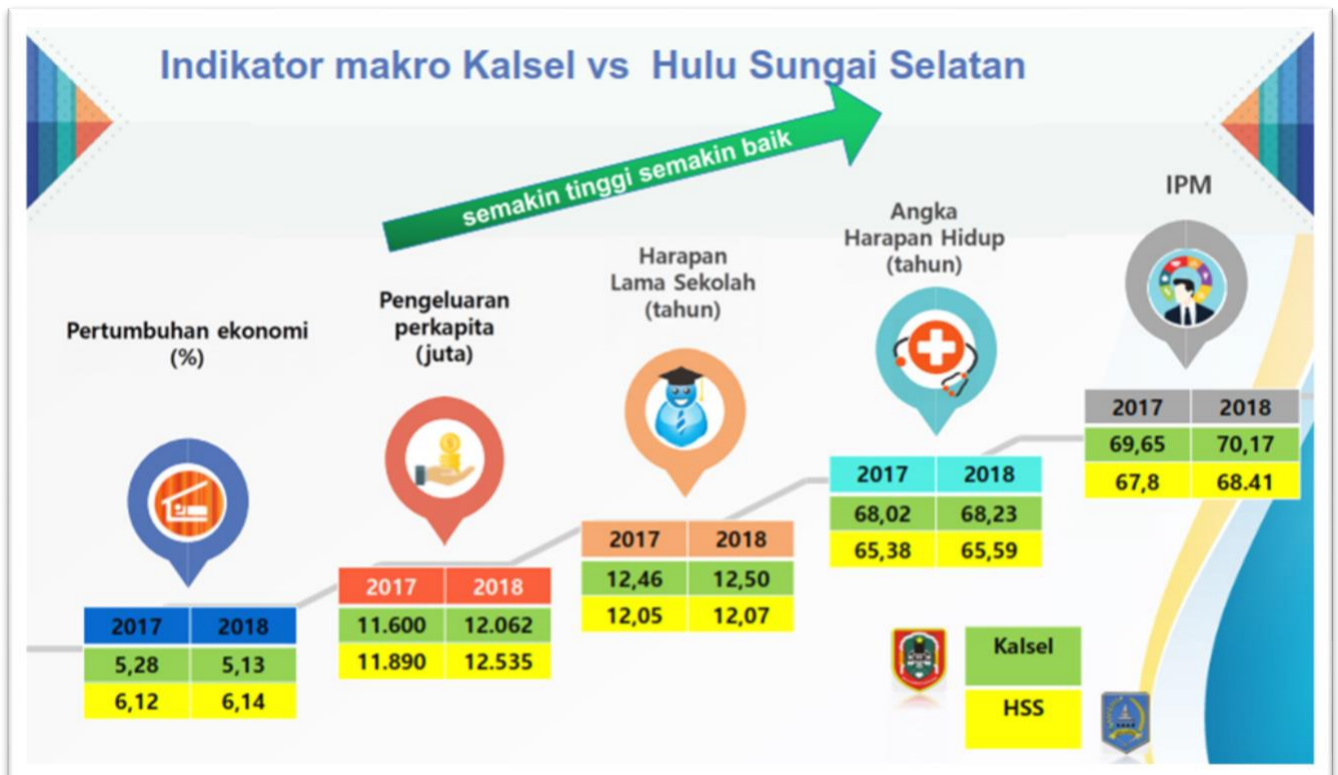
Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam





rencana strategis.

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN VS INDIKATOR MAKRO KALSEL TAHUN 2017-2018



➤ **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

Kesejahteraan sosial harus selalu ditingkatkan setiap tahunnya melalui berbagai upaya dan berbagai pendekatan. Salah satu cara untuk melihat tingkat kesejahteraan sosial adalah melihat nilai Indeks





Pembangunan Manusia yang dibentuk dari tiga dimensi yaitu Dimensi Kesehatan meliputi Indeks Kesehatan, Dimensi Pendidikan meliputi Indeks Pendidikan yang meliputi Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, serta yang terakhir adalah Dimensi Ekonomi yaitu Pengeluaran Perkapita.

Tabel
Dimensi IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2018

Komponen Pembentuk IPM	Pemerintah	Tahun						Demensi
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Angka Harapan Hidup	Hulu Sungai Selatan	63.64	64.14	65.38	65.39	63.55	65,59	Kesehatan
	Kalimantan Selatan	67.47	67.8	67.92	68.02	67.35	68,23	
Rata-rata Harapan Lama Sekolah	Hulu Sungai Selatan	11.35	11.68	11.83	12.02	12.05	12,07	Pendidikan
	Kalimantan Selatan	11.67	11.96	12.21	12.29	12.46	12,50	
Rata-rata Lama Sekolah	Hulu Sungai Selatan	7.05	7.21	7.67	7.68	7.71	7,72	
	Kalimantan Selatan	7.59	7.60	7.76	7.89	7.99	8,00	
Pengeluaran Perkapita	Hulu Sungai Selatan	11.006	11.077	11.161	11.623	11.890	12.535	Ekonomi
	Kalimantan Selatan	10.665	10.748	10.891	11.307	11.600	12.062	

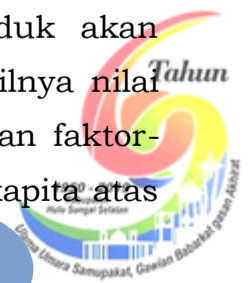
Sumber : Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka, 2018

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang disusun dengan menggunakan pendekatan model adaptasi dari *The United Nations Development Programme* (UNDP) dalam menghitung *Human Development Index* (HDI).

Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan.

➤ **PENDAPATAN PERKAPITA**

PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mengalami kenaikan yang relatif signifikan setiap tahunnya. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas





dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Data pada tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan PDRB Perkapita Kab/Kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2014-2018.

Tabel . PDRB Perkapita Kabupaten Kota ADHB (juta rupiah)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Tanah Laut (ribu rupiah)	31,979	33,310	34,598	36,936	39,060
Kotabaru (ribu rupiah)	54,040	56,950	59,820	64,270	68,370
Banjar (ribu rupiah)	21,007	22,511	23,697	25,437	27,038
Barito Kuala (ribu rupiah)	18,757	20,954	22,636	24,310	26,005
Tapin (ribu rupiah)	34,280	35,619	37,416	39,790	42,382
Hulu Sungai Selatan rupiah	18,969	21,052	22,613	24,307	26,227
Hulu Sungai Tengah (ribu rupiah)	17,657	19,731	21,443	22,974	24,504
Hulu Sungai Utara (juta rupiah)	14,150				19,520
Tabalong (Ribu Rupiah)	62,504	61,965	62,744	66,458	69,553
Tanah Bumbu (Ribu rupiah)	48,944	49,294	49,532	51,993	54,148
Balangan	77,083	74,951	75,027	78,940	83,018
Banjarmasin	30,650	34,093	36,969	40,197	43,353
Banjarmasin (ribu rupiah)	24,800	27,740	29,720	31,940	34,190

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

Kenaikan PDRB perkapita setiap tahunnya juga berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang juga tiap tahunnya meningkat.

➤ **LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI**

PDRB harga konstan atau rill dapat menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun, tabel berikut menunjukan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.

Tabel. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Hulu Sungai selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), 2014–2018

Kat	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/	4,37	4,03	4,83	1,67	4,33



Kat	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>					
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	9,09	10,98	15,67	19,25	15,44
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3,51	4,44	5,38	5,85	4,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	21,97	22,49	5,72	2,98	8,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	8,39	6,77	2,85	3,04	5,5
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,09	5,18	4,48	5,09	4,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	5,85	4,76	4,6	5,28	4,84
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	5,54	5,5	4,93	6,46	5,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation & food Service Activities</i>	6,69	6,72	6,79	7,22	6,5
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	8,43	8,79	7,8	8,07	6,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance Activities</i>	6,63	4,22	5,35	2,76	2,65
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	5,44	5,78	4,24	5,75	4,3
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	6,82	6,64	8,12	6,66	4,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	5,73	8,64	2,02	2,54	3,82
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,38	6,79	6,07	6,3	5,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	6,61	6,38	7,73	9,56	7,13
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	7,68	5,97	7,16	8,59	6,97
	Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	5,79	6,05	6,08	6,12	6,14

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

➤ **TINGKAT KEMISKINAN**

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan suatu daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Persoalan kemiskinan merupakan fenomena global, karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan.

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan yang baik disetiap tahunnya. Seperti yang ditunjukkan pada data tabel dibawah ini.

Tabel
Persentase Penduduk Miskin Prov. Kalimantan Selatan





Menurut Kab/Kota Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Tanah Laut	4,38	4,58	4,65	4,60	4,40
Kotabaru	4,76	4,62	4,56	4,38	4,52
Banjar	2,87	3,26	3,10	2,96	2,70
Barito Kuala	5,19	5,37	5,22	5,13	4,56
Tapin	3,63	3,88	3,70	3,77	3,70
Hulu Sungai Selatan	6,77	6,45	6,29	5,80	5,21
Hulu Sungai Tengah	5,65	5,81	6,18	6,09	6,01
Hulu Sungai Utara	7,00	7,07	6,76	6,65	6,38
Tabalong	6,21	6,59	6,35	6,09	5,95
Tanah Bumbu	5,21	5,55	5,27	4,99	4,88
Balangan	6,29	5,87	5,67	5,68	5,59
Banjarmasin	4,27	4,44	4,22	4,19	4,18
Banjarbaru	4,35	4,90	4,62	4,68	4,19

Sumber : Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka, 2018

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (*Family Based-Policy*), rumah tangga miskin, Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin menurut individu (sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga miskin). Dan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, yang bertujuan membiasakan para rumah tangga miskin untuk berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk rasa solidaritas sosial dan meningkatkan peran aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu satuan wilayah terkecil seperti Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) untuk berperan dalam meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada pelayanan sosial maupun sarana prasarana sosial dasar.

Penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok rumah tangga miskin yang ada di antara para anggotanya yang produktif dan mempunyai usaha mikro dan kecil. Sehingga mereka dapat meningkatkan akses mereka kepada permodalan, teknologi dan pasar, sehingga peningkatan pendapatan dapat lebih besar lagi. Strategi ini menyediakan bantuan modal atau





kredit mikro kepada kelompok rumah tangga miskin yang berada dalam satu satuan wilayah terkecil seperti RT atau RW.

Selain itu implementasi pembangunan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan inklusif, penguatan kelembagaan dan reorientasi kebijakan, menjadi pilar utama strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun hasil dari berbagai inovasi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial tersebut telah menunjukkan sisi manfaat pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada tabel berikut dapat diketahui perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Tabel Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,67	6,77	6,45	6,29	5,8	5,21
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen	0,76	0,81	0,76	0,62	0,83	0,71
3	Indeks Keparahannya Kemiskinan	Persen	0,17	0,22	0,15	0,10	0,15	0,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

➤ **KETIMPANGAN PENDAPATAN (RATIO GINI)**

Peningkatan PDRB Perkapita serta Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak menjamin adanya sebuah pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu indikator peningkatan pembangunan suatu daerah selain melihat dari faktor pertumbuhan ekonomi perlu dilihat pula tingkat pemerataannya yang dapat dilihat melalui indeks gini. Indeks gini merupakan salah satu ukuran pemerataan ekonomi atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang nilai indeksnya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Pada Gambar di bawah ini adalah capaian indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018.





Tabel
Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Gini Ratio (Indeks Gini)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Tanah Laut	0,239	0,272	0,279	0,259	0,234
Kotabaru	0,347	0,349	0,327	0,326	0,337
Banjar	0,351	0,320	0,310	0,348	0,327
Barito Kuala	0,335	0,366	0,310	0,308	0,338
Tapin	0,260	0,345	0,321	0,331	0,281
Hulu Sungai Selatan	0,269	0,312	0,355	0,336	0,317
Hulu Sungai Tengah	0,279	0,327	0,272	0,302	0,320
Hulu Sungai Utara	0,266	0,359	0,318	0,309	0,325
Tabalong	0,297	0,285	0,316	0,328	0,305
Tanah Bumbu	0,294	0,333	0,313	0,295	0,332
Balangan	0,247	0,403	0,333	0,411	0,310
Banjarmasin	0,325	0,388	0,347	0,333	0,377
Banjarnbaru	0,365	0,352	0,336	0,365	0,365

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

➤ **ANGKA PENGANGGURAN**

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 seperti Tabel dibawah ini.

Tabel
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan 2014-2018

NO	KAB/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tanah Laut	2,93	4,53	-	3,70	3,42
2	Kotabaru	3,94	6,10	-	4,28	4,89
3	Banjar	3,29	3,44	-	3,11	3,03
4	Barito Kuala	2,21	1,99	-	3,99	2,99





5	Tapin	1,79	5,14	-	4,39	4,22
6	Hulu Sungai Selatan	2,64	2,84	-	2,02	2,43
7	Hulu Sungai Tengah	4,05	2,97	-	4,13	3,63
8	Hulu Sungai Utara	3,37	3,14	-	4,11	3,91
9	Tabalong	4,12	3,15	-	3,88	3,09
10	Tanah Bumbu	4,76	8,44	-	6,53	6,34
11	Balangan	1,34	4,31	-	1,90	2,34
12	Banjarmasin	6,02	8,30	-	8,87	8,25
13	Banjarbaru	5,35	5,67	-	4,77	5,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1) CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

Dari Hasil capaian pengukuran secara mandiri (*self assessment*) terhadap 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019, 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama yang pencapaiannya $\geq 100\%$ dan terdapat 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama yang pencapaiannya $\leq 100\%$.

Hasil capaian pengukuran terhadap 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut:





No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2019	% Capaian Kinerja Tahun 2019
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM = (akar pangkat 3 dari (Indeks kesehatan x Indeks pendidikan x Indeks pengeluaran)) x 100 $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	67,8	68,41	98,56
		2. Harapan Lama Sekolah	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ I = Indeks HLS = Harapan Lama Sekolah min = angka minimal maks = angka maksimum	12,70	12,07	95,04
		3. Rata-rata Lama Sekolah	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ I = Indeks RLS = Rata-Rata Lama Sekolah min = angka minimal maks = angka maksimum	7,71	7,72	96,50
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	4. Angka Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. $\frac{\text{penjumlahan usia yang meninggal tahun itu}}{\text{jumlah orang yang meninggal tahun itu}} \times 100\%$	68,41	65,59	99,30
3	Tercukupinya Ketersediaan Pangan yang Beragam dan Aman	5. PPH Ketersediaan	Skor PPH Ketersediaan dihitung berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) disajikan angka rata-rata jumlah jenis Bahan Makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita pertahun dalam kilogram serta per kapita per hari dalam satuan gram, pada kurun waktu tertentu.	83,19	83,95	99,22



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2019	% Capaian Kinerja Tahun 2019
4	Meningkatnya Pelayanan Dasar bagi Masyarakat	6. Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	$\frac{\sum \text{Jumlah SPM yang terpenuhi}}{\sum \text{SPM perangkat daerah di Kab. HSS}} \times 100\%$	52,00	57,00	100,00
5	Menurunnya Kemiskinan dan Kesenjangan antar Wilayah	7. Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan)	5,14	5,33	96,30
		8. Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>Dimana : P_i = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Q_i = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini rasio berkisar antara 0 dan 1, jika : G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	0,32	0,32	99,37
6	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	9. Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\sum \text{Penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\sum \text{Penduduk angkatan kerja}} \times 100$	2,43	2,43	82,61





No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2019	% Capaian Kinerja Tahun 2019
7	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	10. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang tertentu $\frac{\text{PDRB}(t) - \text{PDRB}(t - 1)}{\text{PDRB}(t - 1)} \times 100\%$ ket :t = tahun berjalan t-1 = tahun sebelumnya tahun t	74,64	74,64	100,00
		11. Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori industri pengolahan tahun N} - \sum \text{Nilai tambah kategori industri pengolahan tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori pengolahan tahun (N-1)}} \times 100\%$	5,27	4,55	101,79
		12. Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (tahun N)} - \sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Tahun (N-1)}} \times 100\%$	5,41	4,84	89,96
		13. Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun N} - \sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun (N-1)}} \times 100\%$	2,06	4,33	132,42
8	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14. Persentase Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	S Retribusi dan Pajak Daerah Thn N	21,1 milyar	29,52 milyar	128,35

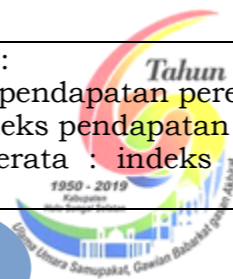


No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2019	% Capaian Kinerja Tahun 2019
9	Meningkatnya investasi PMDN	15. Persentase Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	$\frac{\sum \text{nilai PMDN Tahun } N - \sum \text{nilai PMDN Tahun } (N - 1)}{\sum \text{nilai PMDN Tahun } (N - 1)} \times 100\%$	3,00	9,08	189,17
10	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan bagi Masyarakat	16. Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of Money</i>)	Dihitung berdasarkan akumulasi jumlah pengeluaran wisatawan untuk konsumsi akhir dan transfer sosial bekerjasama dengan dinas / instansi / <i>stakeholders</i> terkait dan perhitungan akhir yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik Kab. HSS	Rp. 3.223.750 .000	Rp. 4.758.098. 000	112,63
11	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas	17. Persentase Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang berkualitas		71,35	67,49	135,96
		18. Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	$\frac{\sum \text{Panjang jalan kondisi mantap}}{\text{total jumlah panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$	74,50	64,03	102,53
		19. Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	$\frac{\sum \text{ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam}}{\sum \text{ketersediaan air irigasi seluruh hektar}} \times 100\%$	85,00	61,33	97,85
		20. Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Publik	$\frac{\sum \text{Sarana dan prasarana publik yang terbangun}}{\sum \text{sarana dan prasarana publik yang dibutuhkan}} \times 100\%$	14,00	23,80	99,17
		21. Persentase Kecukupan RTH Publik	$\frac{\sum \text{RTH publik yang terbangun}}{\sum \text{RTH publik yang dibutuhkan}} \times 100\%$	24,83	24,84	100,00





No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2019	% Capaian Kinerja Tahun 2019
		22. Persentase perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas x 100%	40,66	50,85	95,85
12	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	23. Indeks Desa Membangun (IDM)	$IDM = \frac{\sum IDM \text{ se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}}$ <p>IDM = rata-rata Indeks Desa Membangun Kab.HSS</p> $\frac{\sum IDM \text{ se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}} : \frac{\text{Jumlah IDM Desa se Kab.HSS}}{\text{Jumlah Desa se Kab.HSS}}$	0,62	0,65	101,56
13	Meningkatnya Pemberdayaan Responsif Gender dan Perlindungan terhadap Anak	24. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>IPG :</p> <p>1) Umur panjang dan sehat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. indikator angka harapan hidup perempuan 2. indeks dimensi : indeks harapan hidup perempuan 3. indeks sebaran merata : indeks / harapan hidup dengan sebaran merata <p>2) Pengetahuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. indikator AMH perempuan, MYS perempuan 2. Indeks dimensi : indeks pendidikan perempuan 3. Indeks sebaran merata : indeks pendidikan dengan sebaran merata <p>3) Kehidupan yang layak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator perkiraan pendapatan perempuan 2. Indeks dimensi : indeks pendapatan perempuan 3. Indeks sebaran merata : indeks dengan pendapatan sebaran merata 	89,96	89,1	98,70





No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2019	% Capaian Kinerja Tahun 2019
		25. Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan layak anak}}{\text{Jumlah desa/kelurahan yang ada}} \times 100$	0,68	2,03	100,00
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	26. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH dibentuk oleh komponen IKU + IKA + IKTL * IKU = Indeks Kualitas Udara * IKA = Indeks Kualitas Air * IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,94	55,96	100,00
15	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik	27. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	63,88 (B)	64,66 (B)	95,09
		28. Predikat AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	BB (75,18)	BB (76,23)	108,88
		29. Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri dari 6 aspek penilaian yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.	B	B (3,97)	88,03
16	Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja	30. Opini WTP BPK terhadap LKPD	Hasil Audit BPK RI yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah, penyajian laporan keuangan, meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang	WTP	WTP	100,00



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2019	% Capaian Kinerja Tahun 2019
	Birokrasi		berlaku, penguatan dan pengendalian internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.			
		31. Indeks profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN merupakan salah satu cara mengukur profesionalisme ASN. Pengukuran dihitung dari data-data : SAPK, E-PUPNS, Sistem Informasi Kepegawaian, Daftar Gaji dan Tunjangan ASN, sasaran kerja pegawai dan pegawai yang terkena hukuman.	49,04	58,00	159,97
17	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	32. Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Teknologi Informasi dengan baik	$\frac{\sum \text{Perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik}}{\sum \text{Perangkat daerah Se - Kab. HSS}} \times 100\%$	7,89	21,05	108,40
		33. Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	$\frac{\sum \text{Desa yang menggunakan aplikasi TI}}{\sum \text{Desa Se - Kab. HSS}} \times 100\%$	0,60	9,03	93,75





2) PENGUKURAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

Hasil Pengukuran secara mandiri (*self assessment*) terhadap 5 (lima) Tujuan, 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis dan 38 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran, yang dapat dirincikan bahwa dari 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis, 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang tercapai dengan pencapaian $\geq 100\%$, sedangkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis tidak tercapai dengan pencapaian $< 100\%$.

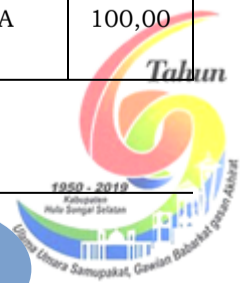
Dan dari 38 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran, sebanyak 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Sasaran yang pencapaian kinerjanya $\geq 100\%$, sedangkan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Sasaran yang pencapaian kinerjanya $< 100\%$.

Capaian indikator kinerja tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengungkapan capaian kinerja sasaran dilakukan secara berurutan seperti urutan pada RPJMD dan RKPD, yaitu mulai dari misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas.

Rincian capaian misi, tujuan, sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dirincikan pada tabel sebagai berikut :

Misi I : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	1 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1 Harapan lama sekolah	12,70	12,07	95,04
			2 Rata-rata lama sekolah	8,00	7,72	96,50
			3 Persentase PAUD formal terakreditasi A	2,50	1,25	50,00
			4 Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	6,59	6,88	104,40
		2 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1 Angka Harapan Hidup	66,05	65,59	99,30
			2 Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun	73,02	72,90	100,16
			3 Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	AA	AA	100,00

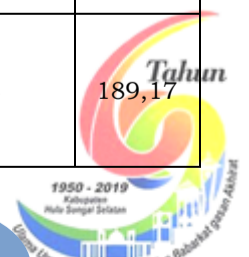




NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA		
			4	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	4,35	4,35	100,00	
		3	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	1	PPH Ketersediaan	84,61	83,95	99,22
		4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	1	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	57,00	57,00	100,00
		5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	1	Persentase angka PMKS yang mandiri	56,58	61,40	108,52

Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA				
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	1	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	1	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	5,14	5,33	96,30		
				2	Indeks Gini	0,318	0,320	99,37		
		2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	1	Tingkat pengangguran terbuka	2,07	2,43	82,61		
						3	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	4,47
		2	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	2	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,38	4,84	89,96		
						3	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	3,27	4,33	132,42
								4	Persentase koperasi sehat	2,35
		4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	23 milyar	29,52 milyar	128,35		
		5	Meningkatnya investasi PMDN	1	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	4,80	9,08	189,17		





Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA		
		6	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	1	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (Spending of money)	Rp. 4.224.480.000	Rp. 4.758.098.000	112,63

Misi III : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang menunjang Sektor Perekonomian.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA		
1	Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	1	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	62,45	64,03	102,53
				2	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	62,68	61,33	97,85
				3	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	24	23,80	99,17
				4	Persentase kecukupan RTH publik	24,48	24,84	100,00
				5	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	53,05	50,85	95,85

Misi IV : Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA				
1	Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	1	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	1	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,64	0,65	101,56		
				2	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,27	89,10	98,70
						2	Persentase desa/ kelurahan layak anak	2,03	2,03	100,00
				3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	55,08	55,96	101,60

Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis





NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA		
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	1	Predikat AKIP	BB (70,01)	BB (76,23)	108,88
				2	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,51)	B (3,97)	88,03
				3	Kualitas aspek perencanaan	60,28	56,81	94,24
		2	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	1	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100,00
				2	Indeks profesionalisme ASN	69,77	58,00	83,13
		3	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	1	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	13,16	21,05	159,97
				2	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	8,33	9,03	108,40
		4	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	1	Persentase peningkatan penerimaan zakat	8,00	23,62	295,25

3) EVALUASI DAN ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

Berikut adalah analisis atas Pengukuran secara mandiri (*self assessment*) hasil pengukuran secara mandiri (*self assessment*) terhadap 5 (lima) Tujuan, 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis dan 38 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran, yang dapat dirincikan bahwa dari 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis, 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang tercapai dengan pencapaian $\geq 100\%$, sedangkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis tidak tercapai dengan pencapaian $< 100\%$.

Dan dari 38 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran, sebanyak 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Sasaran yang pencapaian kinerjanya $\geq 100\%$, sedangkan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Sasaran yang pencapaian kinerjanya $< 100\%$. Ulasan capaian tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran tahun 2019 sebagai berikut.

MISI

MEWUJUDKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN BIDANG





1

PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KEBUTUHAN DASAR LAINNYA

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut;

TUJUAN

1

MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN DASAR LAINNYA

Capaian Tujuan Pertama pada Misi Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya yakni **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya.”**

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 5 (lima) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1; MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada **Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar Lainnya** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Harapan lama sekolah	12,70	12,07	95,04
Rata-rata lama sekolah	8,00	7,72	96,50
Persentase PAUD formal terakreditasi A	2,50	1,25	50,00
Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	6,59	6,88	104,40
Rata-rata Capaian			86,48%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan adalah Tidak Tercapai atau tercapai 86,48%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :





INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2023
Harapan lama sekolah	11,83	12,02	12,05	12,07	12,07	12,70	13,50
Rata-rata lama sekolah	7,67	7,68	7,71	7,71	7,72	8,00	8,53
Persentase PAUD formal terakreditasi A	NA	NA	NA	1,25	1,25	2,50	12,50
Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	NA	NA	NA	4,76	6,88	6,59	15,02

Adapun perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Sasaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dengan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

KAB.HSS Vs PROV.KALSEL	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Harapan lama sekolah	11,83	12,02	12,05	12,07	12,07
Provinsi Kalimantan Selatan		12,21	12,29	12,46	12,50	NA
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Rata-rata lama sekolah	7,67	7,68	7,71	7,71	7,72
Provinsi Kalimantan Selatan		7,76	7,89	7,99	8,00	NA
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persentase PAUD formal terakreditasi A	NA	NA	NA	1,25	1,25
Provinsi Kalimantan Selatan		NA	NA	NA	NA	NA
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	NA	NA	NA	4,76	6,88
Provinsi Kalimantan Selatan		NA	NA	NA	NA	NA

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	660.112.825	646.952.485	98,01%
2. Program Peningkatan Mutu	2.035.039.000	1.780.330.236	87,48%



Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Pendidikan Anak Usia Dini			
3. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	1.727.136.175	1.339.100.300	77,53%
4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	18.164.219.600	16.580.798.247	91,28%
5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.324.446.000	9.173.077.571	98,38%
6. Program Peningkatan Budaya Baca	502.850.000	483.538.940	96,16%
7. Program Peningkatan Mutu dan Akses Perpustakaan	222.536.250	200.486.250	90,09%

Pencapaian program penunjang pencapaian sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini

Realisasi kinerja keuangan program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 adalah sebesar Rp.646.473.485,00 atau 98,01% dari anggaran sebesar Rp.660.112.825,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

▪ Penambahan ruang kelas sekolah	Rp	177.021.000,00
▪ Pembangunan gedung sekolah	Rp	186.040.660,00
▪ Penambahan ruang kelas sekolah (DAK)	Rp	205.783.975,00
▪ Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	Rp	77.627.850,00
Jumlah	Rp	646.473.485,00

2. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Realisasi kinerja keuangan program Peningkatan Mutu Pendidikan anak usia dini Tahun 2019 adalah sebesar





Rp.1.780.330.236,00 atau 87,48% dari anggaran sebesar Rp.2.035.039.000,00.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

▪ Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rp	179.363.806,00
▪ Pengadaan meubeleir sekolah	Rp	108.650.000,00
▪ Pengadaan alat praktik dan alat peraga siswa	Rp	98.898.180,00
▪ Bimngan teknis pendidikan keluarga	Rp	61.395.000,00
▪ Sosialisasi akreditasi lembaga PAUD dan DIKMAS	Rp	16.135.000,00
▪ Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Rp	1.071.669.000,00
▪ Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Rp	36.635.000,00
▪ Penyelenggaraan Bantuan operasional penyelenggara (BOP) PAUD	Rp	207.584.250,00
Jumlah	Rp	1.780.330.236,00

3. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat

Realisasi kinerja keuangan program peningkatan mutu Pendidikan masyarakat Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.339.100.300,00 atau 77,53% dari anggaran sebesar Rp.1.727.136.175,00.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

▪ Penyelenggaraan paket C setara SMU	Rp	156.910.000,00
▪ Penyelenggaraan paket B setara SMP	Rp	103.339.400,00
▪ Penyelenggaraan lembaga non formal	Rp	114.485.400,00
▪ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal (DAK)	Rp	816.290.000,00
▪ Penyelenggaraan paket C setara SMU/BOP Kesetaraan (DAK)	Rp	44.425.000,00
▪ Penyelenggaraan paket B setara SMP /BOP Kesetaraan (DAK)	Rp	103.650.500,00
Jumlah	Rp	1.339.100.300

4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar

Realisasi kinerja keuangan program peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 16.580.798.247,00 atau 91,28% dari anggaran sebesar Rp.





18.164.219.600,00. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Rp	745.867.000,00
Pembangunan ruang ibadah	Rp	323.850.000,00
Pembangunan perpustakaan sekolah	Rp	136.896.000,00
Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	Rp	247.012.000,00
Pengadaan meubeleir sekolah	Rp	200.110.000,00
Pembangunan pagar sekolah	Rp	371.379.000,00
Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SD	Rp	369.328.700,00
Pelaksanaan ujian sekolah (US) SD	Rp	273.215.000,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rp	3.350.054.627,00
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Rp	7.012.400.000,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	Rp	1.908.400.000,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah (DAK)	Rp	110.038.000,00
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK)	Rp	261.285.000,00
Penyediaan buku pelajaran dan alat tulis untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs (DAK)	Rp	1.001.722.420,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)	Rp	166.543.500,00
Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan daerah (DAK)	Rp	102.697.000,00
Jumlah	Rp	16.580.798.247,00

5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Realisasi kinerja keuangan program peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah pertama Tahun 2019 adalah sebesar





Rp.9.173.077.571,00 atau 98,38% dari anggaran sebesar Rp.9.324.446.000,00.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

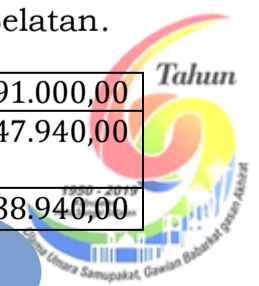
Pembangunan ruang ibadah	Rp	322.040.000,00
Pengadaan meubeleir sekolah	Rp	199.690.000,00
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Rp	613.435.000,00
Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SMP	Rp	191.238.000,00
Peaksanaan ujian sekolah (UN) SMP	Rp	571.108.400,00
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Rp	216.938.000,00
Rehabilitasi ruang kelas sekolah	Rp	1.172.785.171,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	Rp	2.055.850.000,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah (DAK)	Rp	791.010.000,00
Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK)	Rp	1.314.780.000,00
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)	Rp	1.027.390.000,00
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK)	Rp	258.000.000,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)	Rp	208.043.000,00
Pembangunan ruang pusat sumber belajar inklusif (DAK)	Rp	230.770.000,00
Jumlah	Rp	9.173.077.571,00

6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Realisasi Program Peningkatan Budaya Baca adalah sebesar Rp483.538.940,00 atau 96,16% dari anggarannya sebesar Rp502.850.000,00.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja Modal yang diwujudkan dalam kegiatan Pengadaan Buku atau Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah	Rp	267.291.000,00
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah (DAK)	Rp	216.247.940,00
JUMLAH	Rp	483.538.940,00





7. Program Peningkatan Mutu dan Akses Perpustakaan

Realisasi Program Peningkatan Mutu dan Akses Perpustakaan adalah sebesar Rp.200.486.250,00 atau 90,09% dari anggarannya sebesar Rp.222.536.250,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja Modal yang diwujudkan dalam kegiatan Pengadaan Buku atau Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Teknologi Perpustakaan	Rp	123.175.000,00
Pembinaan Perpustakaan Daerah	Rp	77.311.250,00
JUMLAH	Rp	200.486.250,00

SASARAN 2 : MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada **Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar Lainnya** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	66,05	65,59	99,30
Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <= 20 tahun	73,02	72,90	100,16
Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	AA	AA	100,00
Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	4,35	4,35	100,00
Rata-rata Capaian			99,87%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan adalah Tidak Tercapai atau tercapai 99,87%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :





INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2023
Angka Harapan Hidup	65,38	65,39	63,55	65,59	65,59	66,05	67,87
Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <= 20 tahun	NA	NA	NA	75,81	72,90	73,02	69,68
Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	NA	NA	NA	BB	AA	AA	AAA
Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	NA	NA	NA	4,35	4,35	4,35	17,39

Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	AA	AA	100,00

Pada indikator kinerja sasaran Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS) dari target berpredikat AA, terealisasi Berpredikat AA dengan nilai sebesar 83,6, yang berarti Tercapai atau sebesar 100%.

Adapun adanya indikator kinerja sasaran Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS) adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD.

Target kinerja/kesehatan rumah sakit adalah hasil penjumlahan nilai riil ke 3 aspek. Kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Sehat

- AAA jika total skor > 95
- AA jika total skor \geq 80-95
- A jika total nilai > 65-80

2. Kurang Sehat

- BBB jika total skor > 50-65
- BB jika total skor > 40-50
- B jika total skor > 30-40

3. Tidak Sehat

- CCC jika total skor > 20-30
- CC jika total skor > 10-20





- C jika total skor < 10

Tingkat kesehatan rumah sakit diukur berdasarkan 3 aspek penilaian yakni:

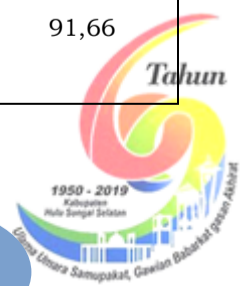
- 1) Indikator kinerja keuangan dengan bobot 20%; terdiri dari 7 indikator;
- 2) Indikator kinerja pelayanan, dengan bobot 40%; terdiri dari 26 indikator;
- 3) Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 40%; terdiri dari 18 indikator

Hasil survey dan perhitungan memberikan hasil berikut :

- 1) Indikator kinerja keuangan dengan bobot 20%, mendapatkan nilai 14,8 dari total nilai 20
- 2) Indikator kinerja pelayanan, dengan bobot 40%, mendapatkan nilai 34,05;
- 3) Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 40%; mendapatkan nilai 34,75.

Total nilai untuk tingkat kesehatan rumah sakit triwulan IV tahun 2019 adalah 83,6 dengan predikat AA. Capaian ini memenuhi target karena nilai minimal AA adalah 80. Upaya peningkatan masih harus dilakukan di ke 3 aspek.

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	%
1	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan			
	kegiatan Pelayanan Kesehatan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Sub Kegiatan:			
	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Umum	5.867.614.836	5.531.317.613	94,27
	2. Pelayanan Administrasi Pengelolaan BLUD	7.406.874.644	7.404.296.315	99,97
	3. Peningkatan Kualitas SDM	5.337.513.120	4.674.937.438	87,59
	4. Kehumasan dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	366.350.000	335.799.100	91,66





No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	%
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Penunjang			
	- Penunjang Medik - Penunjang Non Medik	32.373.180.194 5.274.298.039	32.042.058.752 5.210.986.756	98,80 98,98
6.	Peningkatan kualitas pelayanan keperawatan			
	- Asuhan Keperawatan - Logistik Keperawatan	2.115.884.000 1.560.050.009	1.987.888.960 1.555.235.411	93,95 99,69
7.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	35.379.843.600	35.346.879.339	99,91
8.	Peningkatan Sistem Informasi	792.614.100	697.699.940	88,03
9.	Perencanaan Startegis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta keuangan			
	- Akuntansi - Perencanaan	95.100.000 51.700.000	95.060.000 36.334.000	99,96 70,28
		96.621.022.542	94.918.493.624	98,24

MISI 2	MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN KEARIFAN LOKAL
-------------------	---

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut;

TUJUAN 1	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF YANG BERDAMPAK TERHADAP ANGKA KEMISKINAN
---------------------	--

Capaian Tujuan Pertama pada Misi Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan





Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal yakni **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan.”**

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 6 (enam) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 ; MENURUNNYA KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada **Tujuan I : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	5,14	5,33	96,30
Indeks Gini	0,318	0,320	99,37
Rata-rata			97,84

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah adalah Tidak Tercapai atau tercapai 97,84%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2023
Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	6,45	6,29	5,80	5,21	5,33	5,14	4,28
Indeks Gini	0,312	0,355	0,336	0,317	0,320	0,318	0,284

Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	5,14	5,33	96,30





Pada indikator kinerja sasaran Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) dari target 5,14, terealisasi 5,33 yang berarti Tercapai atau sebesar 96,30%.

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan suatu daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Persoalan kemiskinan merupakan fenomena global, karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan.

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan yang baik disetiap tahunnya. Seperti yang ditunjukkan pada data tabel dibawah ini.

Tabel
Persentase Penduduk Miskin Prov. Kalimantan Selatan
Menurut Kab/Kota Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Tanah Laut	4,38	4,58	4,65	4,60	4,40
Kotabaru	4,76	4,62	4,56	4,38	4,52
Banjarnegara	2,87	3,26	3,10	2,96	2,70
Barito Kuala	5,19	5,37	5,22	5,13	4,56
Tapin	3,63	3,88	3,70	3,77	3,70
Hulu Sungai Selatan	6,77	6,45	6,29	5,80	5,21
Hulu Sungai Tengah	5,65	5,81	6,18	6,09	6,01
Hulu Sungai Utara	7,00	7,07	6,76	6,65	6,38
Tabalong	6,21	6,59	6,35	6,09	5,95
Tanah Bumbu	5,21	5,55	5,27	4,99	4,88
Balangan	6,29	5,87	5,67	5,68	5,59
Banjarmasin	4,27	4,44	4,22	4,19	4,18
Banjarbaru	4,35	4,90	4,62	4,68	4,19

Sumber : Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka, 2018

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (*Family Based-Policy*), rumah tangga miskin, Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin menurut individu (sebagai anggota keluarga dalam rumah





tangga miskin). Dan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, yang bertujuan membiasakan para rumah tangga miskin untuk berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk rasa solidaritas sosial dan meningkatkan peran aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu satuan wilayah terkecil seperti Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) untuk berperan dalam meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada pelayanan sosial maupun sarana prasarana sosial dasar.

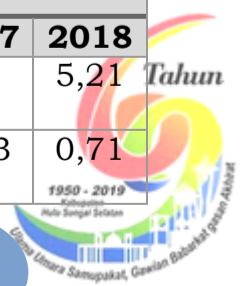
Penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok rumah tangga miskin yang ada di antara para anggotanya yang produktif dan mempunyai usaha mikro dan kecil. Sehingga mereka dapat meningkatkan akses mereka kepada permodalan, teknologi dan pasar, sehingga peningkatan pendapatan dapat lebih besar lagi. Strategi ini menyediakan bantuan modal atau kredit mikro kepada kelompok rumah tangga miskin yang berada dalam satu satuan wilayah terkecil seperti RT atau RW.

Selain itu implementasi pembangunan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan inklusif, penguatan kelembagaan dan reorientasi kebijakan, menjadi pilar utama strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun hasil dari berbagai inovasi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial tersebut telah menunjukkan sisi manfaat pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada tabel berikut dapat diketahui perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Tabel Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,67	6,77	6,45	6,29	5,8	5,21
2	Indeks Kedalaman	Persen	0,76	0,81	0,76	0,62	0,83	0,71





	Kemiskinan							
3	Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen	0,17	0,22	0,15	0,10	0,15	0,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tabel
Tingkat Kemiskinan berdasarkan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Hulu Sungai Selatan	15.233 jiwa	14.590 jiwa	14.420 jiwa	13.450 jiwa	12.224 jiwa	12.636 jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

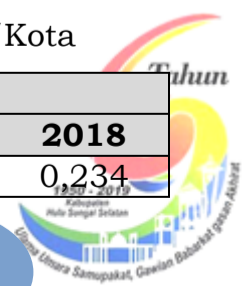
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Indeks Gini	0,318	0,320	99,37

Pada indikator kinerja sasaran Indeks Gini dari target 0,318, terealisasi 0,320 yang berarti Tercapai atau sebesar 99,37%.

Indeks gini merupakan salah satu ukuran pemerataan ekonomi atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang nilai indeksnya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Pada Gambar di bawah ini adalah capaian indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018.

Tabel
Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Gini Ratio (Indeks Gini)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Tanah Laut	0,239	0,272	0,279	0,259	0,234





Kotabaru	0,347	0,349	0,327	0,326	0,337
Banjar	0,351	0,320	0,310	0,348	0,327
Barito Kuala	0,335	0,366	0,310	0,308	0,338
Tapin	0,260	0,345	0,321	0,331	0,281
Hulu Sungai Selatan	0,269	0,312	0,355	0,336	0,317
Hulu Sungai Tengah	0,279	0,327	0,272	0,302	0,320
Hulu Sungai Utara	0,266	0,359	0,318	0,309	0,325
Tabalong	0,297	0,285	0,316	0,328	0,305
Tanah Bumbu	0,294	0,333	0,313	0,295	0,332
Balangan	0,247	0,403	0,333	0,411	0,310
Banjarmasin	0,325	0,388	0,347	0,333	0,377
Banjarbaru	0,365	0,352	0,336	0,365	0,365

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	541.006.500	532.926.300	98,51
Program perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	7.740.646.000	7.507.623.850	96,99

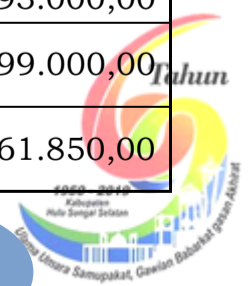
Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Realisasi kinerja keuangan Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 adalah sebesar Rp.7.507.623.850,00 atau 96,99% dari anggarannya sebesar Rp.7.740.646.000,00.

Realisasi keuangan Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar	Rp	17.793.000,00
Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar	Rp	35.299.000,00
Penyaluran Pangan Bagi Masyarakat Miskin	Rp	7.364.361.850,00





Perlindungan Sosial korban Bencana	Rp 90.170.000,00
Jumlah	Rp 7.507.623.850,00

2. Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 adalah sebesar Rp.452.629.700,00. atau 95,45% dari anggarannya sebesar Rp.474.195.000,00. Realisasi keuangan Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Lainnya tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Peningkatan Kopetensi dan sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS)	Rp 452.629.700,00
Jumlah	Rp 452.629.700,00

SASARAN 2 ; MENURUNNYA TINGKAT PENGANGURAN TERBUKA

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 pada **Tujuan I : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Tingkat pengangguran terbuka	2,07	2,43	82,61
Rata-rata			82,61

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Menurunnya tingkat pengangguran terbuka adalah Tidak Tercapai atau tercapai 82,61%.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat





menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

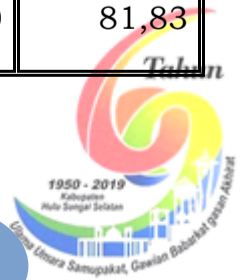
INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI						TARGET RPJMD	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2023
Tingkat pengangguran terbuka	2,64	2,84	NA	2,02	2,43	2,43	2,07	1,86

Adapun perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tingkat pengangguran terbuka dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

NO	KAB/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Tanah Laut	2,93	4,53	-	3,70	3,42
2	Kotabaru	3,94	6,10	-	4,28	4,89
3	Banjar	3,29	3,44	-	3,11	3,03
4	Barito Kuala	2,21	1,99	-	3,99	2,99
5	Tapin	1,79	5,14	-	4,39	4,22
6	Hulu Sungai Selatan	2,64	2,84	-	2,02	2,43
7	Hulu Sungai Tengah	4,05	2,97	-	4,13	3,63
8	Hulu Sungai Utara	3,37	3,14	-	4,11	3,91
9	Tabalong	4,12	3,15	-	3,88	3,09
10	Tanah Bumbu	4,76	8,44	-	6,53	6,34
11	Balangan	1,34	4,31	-	1,90	2,34
12	Banjarmasin	6,02	8,30	-	8,87	8,25
13	Banjarbaru	5,35	5,67	-	4,77	5,20

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Tingkat pengangguran terbuka didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	185.143.000	163.930.605	88,54
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	17.751.250	14.525.000	81,83





Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Tingkat pengangguran terbuka tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja

Realisasi capaian kinerja dan keuangan dari program ini adalah sebesar Rp. Rp. 177.444.605 ,00 atau 95,70 % dari pagu anggaran sebesar Rp. Rp. 185.143.000,-,00. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja yang diwujudkan dalam 4 kegiatan yaitu ;

- Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Rp. 11.012.000,00
- Pelatihan otomotif tehnik roda 4 Rp. 96.820.605,00
- Pelatihan calon pencari kerja kerjasama dgn BLK Rp. 27.048.000,00
- Pemagangan bagi pencari kerja Rp. 42.564.000,00
- Jumlah realisasi keuangan Rp. 177.444.605,00

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

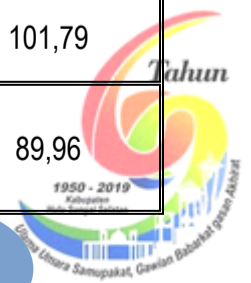
Realisasi capaian kinerja dan keuangan dari program ini adalah sebesar Rp. 14.525.000,00 atau 82,40 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 17.751.250,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja yang diwujudkan dalam 1 kegiatan yaitu penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.

SASARAN 3 ; MENINGKATNYA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 pada **Tujuan I : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	4,47	4,55	101,79
Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,38	4,84	89,96





Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	3,27	4,33	132,42
Persentase koperasi sehat	2,35	2,35	100,00
Rata-rata			106,04

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan adalah Tercapai atau tercapai 106,04%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

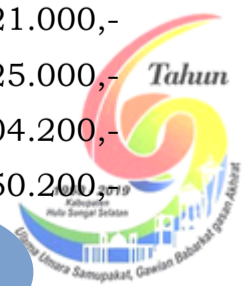
INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI			TARGET RPJMD	
	2017	2018	2019	2019	2023
Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	5,27	5,27	4,55	4,47	5,85
Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,41	5,41	4,84	5,38	5,83
Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	2,06	2,06	4,33	3,27	4,92
Persentase koperasi sehat	1,18	1,18	2,35	2,35	5,10

Dalam pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan didukung oleh program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan			
Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan Mutu Produk Industri	330.746.000	262.450.200	79,35

Realisasi capaian kinerja dan keuangan dari program ini adalah sebesar Rp. 262.450.200,00 atau 90,98 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 330.746.000,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja yang diwujudkan dalam 3 kegiatan yaitu ;

- Sertifikasi halal produk IKM Pangan, Rp. 64.821.000,-
 - Bintek diversifikasi produk IKM Pangan. Rp. 66.625.000,-
 - Bintek Grafir Logam Rp. 131.004.200,-
- Jumlah realisasi keuangan Rp. 262.450.200,-





Indikator Kinerja Sasaran : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			
Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan usaha sektor perdagangan	827.098.000	824.148.000	99,64
Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1.572.728.000	1.463.909.200	93,08
Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan	4.527.732.000	4.306.373.086	95,11

Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Usaha Sektor Perdagangan

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Usaha Sektor Perdagangan Tahun 2019 adalah sebesar Rp.824.148.000,00 atau 99,64% dari anggarannya sebesar Rp.827.098.000,00.

Realisasi keuangan Peningkatan Sarana dan Jaringan Distribusi Perdagangan tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Promosi/Pameran Produk Unggulan Daerah	Rp 743.900.000,00
Penyuluhan Kemampuan Kewirausahaan Pedagang Non Formal	Rp 40.915.000,00
Pengendalian Harga Bahan Pokok	Rp 39.333.000,00
Jumlah	Rp 824.148.000,00

2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Realisasi kinerja keuangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.457.943.200,00 atau 92,70% dari anggarannya sebesar Rp.1.572.728.000,00.

Realisasi keuangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan tersebut merupakan realisasi belanja barang





dan jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan,	Rp	5.588.000,00
Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Sosialisasi	Rp	73.204.000,00
Perlindungan Konsumen dan	Rp	60.250.000,00
Pelayanan Tera dan Tera Ulang (DAK)	Rp	1.318.901.200,00
Jumlah	Rp	1.457.943.200,00

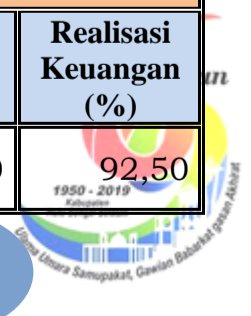
3. Program Peningkatan Sarana dan Jaringan Distribusi Perdagangan

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Sarana dan Jaringan Distribusi Perdagangan Tahun 2019 adalah sebesar Rp.4.306.373.086,00 atau 95,11% dari anggarannya sebesar Rp.4.527.732.000,00

Realisasi keuangan Peningkatan Sarana dan Jaringan Distribusi Perdagangan tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Kandangan	Rp	1.112.594.018,00
Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Nagara	Rp	256.666.000,00
Peningkatan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Kandangan	Rp	3.272.000,00
Peningkatan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Nagara	Rp	235.000,00
Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Kandangan (DAK)	Rp	2.933.303.068,00
Jumlah	Rp	4.306.373.086,00

Indikator Kinerja Sasaran : Laju pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			
Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan Produktivitas Tanaman	497.802.500	460.458.500	92,50





Indikator Kinerja Sasaran : Laju pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			
Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Pangan			
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	407.109.500	39.140.000	9,61
Program Peningkatan Produksi Hortikultura	510.041.500	437.690.090	85,81
Program Peningkatan Populasi Ternak	1.295.568.555	1.071.925.000	82,74
Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak	201.279.200	71.882.000	35,71
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	201.279.200	191.586.000	95,18
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	263.534.900	213.189.700	80,90
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	3.484.281.750	2.089.593.500	59,97
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	27.900.000	27.900.000	100,00
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	775.780.000	742.195.750	95,67
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.599.369.000	1.516.176.500	94,80
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	16.551.600	16.347.000	98,76

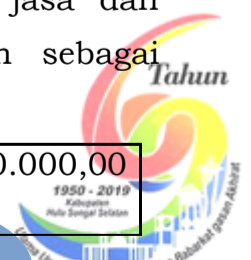
Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan

Realisasi kinerja keuangan Program Produktivitas Tanaman Pangan tahun 2019 adalah sebesar Rp.460.458.500,00 atau 94,04% dari anggarannya sebesar Rp.497.802.500,00.

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija	Rp	109.300.000,00
--	----	----------------





Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	Rp	15.405.000,00
Pengembangan Perbenihan / Pembibitan Tanaman Pangan	Rp	28.630.000,00
Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Pangan	Rp	276.503.500,00
Pengembangan Intensifikasi Jagung dan Umbi	Rp	30.620.000,00
Jumlah	Rp	460.458.500,00

2. Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Produksi Perkebunan Tahun 2019 adalah sebesar Rp.307.958.640,00 atau 87,00% dari anggarannya sebesar Rp.407.109.500,00.

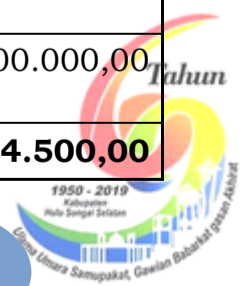
Realisasi keuangan Peningkatan Produksi Perkebunan tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pengembangan Pembenihan / Pembibitan Perkebunan	Rp	83.963.000,00
Pengembangan /Peremajaan Karet	Rp	31.200.000,00
Pengembangan /Peremajaan Kelapa	Rp	7.940.000,00
Perlindungan Tanaman Perkebunan	Rp	53.807.500,00
Peningkatan Sistem Insentif dan Insentif Bagi Petani / Kelompok Tani,	Rp	131,048.140,00
Jumlah	Rp	307.958.640,00

3. Program Peningkatan Produksi Hortikultura

Realisasi kinerja keuangan Program Produksi Hortikultura Tahun 2019 adalah sebesar Rp.445.494.500,00 atau 97,95% dari anggarannya sebesar Rp.510.041.500,00. Realisasi keuangan Program Peningkatan Produksi Hortikultura tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Pengembangan Diversifikasi Tanaman	Rp	326.934.500,00
Pengembangan kawasan Hortikultura (Tanaman Buah)	Rp	108.670.000,00
Pengembangan Biofarmaka (Tanaman Obat) dan Florikultura (Tanaman Hias)	Rp	9.900.000,00
Jumlah	Rp	445.494.500,00





4. Program Peningkatan Populasi Ternak

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Populasi Ternak Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.295.568.555,00 atau 98,85% dari anggarannya sebesar Rp.1.090.885.443,00. Realisasi keuangan Peningkatan Populasi Ternak tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	Rp	22.310.000,00
Pembibitan dan Perawatan Ternak	Rp	255.410.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Permodalan Peternakan	Rp	14.301.000,00
Pengembangan Pakan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak	Rp	144.844.443,00
Pengembangan Agribisnis Peternakan	Rp	654.020.000,00
Jumlah	Rp	1.090.885.443,00

5. Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak

Realisasi kinerja keuangan Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak 2019 adalah sebesar Rp145.785.200,00 atau 79,85% dari anggarannya sebesar Rp201.792.200,00. Realisasi keuangan Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak,	Rp	71.882.000,00
Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan	Rp	63.283.200,00
Sosialisasi Kesehatan dan Kesmavet Kepada Petugas dan Peternak	Rp	10.620.000,00
Jumlah	Rp	145.785.200,00

6. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2019 adalah sebesar Rp.191.586.000,00 atau 89,54% dari anggarannya sebesar Rp.219.392.000,00. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian merupakan realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagai berikut :





Penanganan Pasca Panen Pembiayaan dan Investasi Pertanian	Rp 76.676.000,00
Pembiayaan dan Investasi Pertanian	Rp 114.910.000,00
Jumlah	Rp 191.586.000,00

7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2019 adalah sebesar Rp.191.586.000,00 atau 89,54% dari anggarannya sebesar

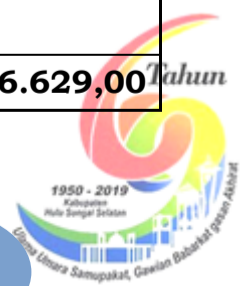
Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tahun 2019 adalah sebesar Rp.213.189.700,00 atau 89,00% dari Anggarannya sebesar Rp.263.534.900,00. Program Peningkatan kesejahteraan Petani tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Rp 60.980.000,00
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Rp 117.499.500,00
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Rp 34.710.200,00
Jumlah	Rp 213.189.700,00

8. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian 2019 adalah sebesar Rp.2.073.026.629,00 atau 80,00% dari anggarannya sebesar Rp.3.484.281.750,00. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Rp 199.093.500,00
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan, Pupuk dan Pestisida	Rp 71.733.129,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air (DAK)	Rp 1.802.200.000,00
Jumlah	Rp 2.073.026.629,00





9. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Realisasi Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah sebesar Rp.27.900.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp.27.900.000,00.

Realisasi keuangan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Pengembangan teknologi pengolahan dan pengendalian mutu hasil perikanan	Rp	8.250.000,00
Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	Rp	7.750.000,00
Peningkatan sarana pemasaran hasil perikanan	Rp	11.900.000,00
JUMLAH	Rp	27.900.000,00

10. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Realisasi Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp.742.196.750,00 atau 97,00% dari anggarannya sebesar Rp.775.780.000,00.

Realisasi keuangan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Pengembangan bibit ikan unggul	Rp	101.142.500,00
Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan	Rp	173.823.000,00
Budidaya ikan air tawar	Rp	313.175.000,00
Pengelolaan ikan dan lingkungan	Rp	14.595.000,00
Pelatihan budidaya perikanan	Rp	24.161.250,00
Budidaya ikan air tawar (DAK)	Rp	115.300.000,00
JUMLAH	Rp	742.196.750,00

11. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap adalah sebesar Rp1.537.806.000,00 atau 98,00% dari anggarannya sebesar Rp1.632.369.000,00.

Realisasi keuangan Peningkatan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Pemberdayaan kelompok nelayan perikanan tangkap	Rp	18.654.000,00
---	----	---------------





Pengawasan dan kelestarian perikanan tangkap	Rp	360.319.500,00
Penyediaan sarana dan prasarana nelayan perikanan tangkap (DAK)	Rp	920.162.500,00
Penyediaan sarana dan prasarana nelayan perikanan tangkap	Rp	238.670.000,00
JUMLAH	Rp	1.537.806.000,00

12. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan

Realisasi Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan adalah sebesar Rp16.347.000,00 atau 98.15% dari anggarannya sebesar Rp16.551.600,00.

Realisasi keuangan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Pelatihan Petani Ikan / nelayan dan pelaku agribisnis perikanan	Rp	16.347.000,00
JUMLAH	Rp	16.347.000,00

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Koperasi Sehat			
Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan Kualitas Koperasi	233.406.000	212.947.500	91,23

Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Koperasi Sehat tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Koperasi

Realisasi capaian kinerja dan keuangan dari program ini adalah sebesar Rp. 212.947.500,00 atau 90,98 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 233.406.000,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja yang diwujudkan dalam 2 kegiatan yaitu ;

- Penyusunan dokumen hasil penilaian kesehatan Koperasi Rp. 52.069.000,-
- Pembinaan koperasi usaha kecil Rp.160.878.500,-
- Jumlah realisasi keuangan sebesar Rp.212.947.500





SASARAN 4 ; MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Capaian kinerja Sasaran Strategis 4 pada **Tujuan I : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Peningkatan retribusi dan pajak daerah	23 milyar	29,52 milyar	128,35
Rata-rata			128,35

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Tercapai atau tercapai 128,35%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI			TARGET RPJMD	
	2017	2018	2019	2019	2023
Peningkatan retribusi dan pajak daerah	21,10 Milyar	22,50 Milyar	29,52 milyar	23 milyar	28 milyar

Jumlah realisasi penerimaan semua Retribusi dan Pajak berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah	Rp.	14.412.031.504,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	15.116.946.827,00
JUMLAH	Rp.	29.528.978.331,00

Untuk tahun 2019, realisasi pendapatan Pajak Daerah dapat memenuhi/melebihi target yang telah direncanakan. Pencapaian tersebut tentunya adalah hasil upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah. Upaya yang dilakukan antara lain :

1. Sosialisasi pajak daerah, baik secara langsung maupun melalui media.





2. Penerbitan surat himbauan, surat teguran dan surat tagihan terhadap objek pajak.
3. Pembuatan dan pendistribusian sarana promosi pajak. (banner dan leaflet)
4. Koordinasi/rapat yang intens dengan SKPD terkait.
5. Pelaksanaan kegiatan anugerah pajak sebagai salah satu bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap objek pajak.
6. Pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak.

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi daerah diatur melalui Peraturan Daerah dan pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD pengelola penerimaan.

Untuk pencapaian realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2019 ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan, namun mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi tahun 2018. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna meningkatkan penerimaan pada sektor Retribusi Daerah yakni :

1. Koordinasi yang intens dengan SKPD pengelola Retribusi Daerah.
2. Pendataan objek Retribusi Daerah baru.
3. Revisi terhadap Peraturan Daerah sebagai bentuk tindak lanjut pendataan objek Retribusi Daerah baru.
4. Revisi terhadap tarif Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di masyarakat.

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan	479.023.000	277.351.230	57,90
Program Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB	922.585.000	804.013.750	87,15

Pencapaian program penunjang pencapaian sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:





1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan	1. Penyediaan Karcis dan Blanko	248.523.000	231.129.750
	2. Promosi Pajak Daerah	230.500.000	146.587.880

Pencapaian kinerja bidang PAD dan Dana Perimbangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai sasaran strategis dan mempunyai target yang juga harus dicapai. Untuk realisasi sasaran Bidang PAD dan Dana Perimbangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada akhir tahun 2019 ini sudah menyajikan hasil akhir dari pencapaian kegiatan.

Realisasi program peningkatan pajak daerah sebesar Rp. 29,52 miliar atau sebesar 102,45% dari target 28,82 miliar sedangkan untuk program penerimaan dana perimbangan realisasi sebesar Rp. 1.057.953.649.787,00 atau sebesar 104,89% dari target yang direncanakan sebesar 100%.

Kegiatan Penyediaan Karcis dan Blanko pada akhir tahun telah direalisasikan sebanyak 73 jenis karcis dan blanko, proses cetak karcis dan blanko untuk pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan pada triwulan IV.

Kegiatan Pendataan subjek/objek pajak daerah sudah dilakukan pada awal tahun dengan melakukan kunjungan atau datang langsung ke pemilik usaha Hotel, Restoran/Rumah Makan/ Warung, tempat hiburan, reklame, parkir, air tanah dan sarang burung walet. Untuk tahun 2019 realisasi sudah mencapai 52 Wajib Pajak baru yang telah dilakukan pendataan yaitu Wajib Pajak Rumah Makan sehingga mencapai 104% dari target yang ditentukan sebanyak 50 Wajib Pajak.

Kegiatan promosi pajak daerah atau rekonsiliasi dan penyampaian data dengan kementerian dilakukan setiap triwulan sekali yang mana tujuan rekonsiliasi dan penyampaian data tersebut untuk kelancaran penyaluran dana transfer dari pusat.

2. Program Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB





Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB	1. Pemutakhiran Data PBB – P2 dan BPHTB	212.909.500	193.045.750
	2. Promosi PBB dan BPHTB	84.290.000	69.390.000
	3. Pelayanan PBB dan BPHTB	625.385.500	594.098.000

Pencapaian kinerja bidang PBB dan BPHTB pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai sasaran strategis dan mempunyai target yang harus dicapai. Untuk realisasi sasaran Bidang PBB dan BPHTB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada akhir tahun 2019 sebesar Rp.1.967.537.883,00 atau 139,98% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp.1.406.055.770 dari capaian terlihat bahwa target telah tercapai bahkan melampaui 100%.

Kegiatan Pemutakhiran PBB-P2 dan BPHTB dengan sasaran jenis objek-objek PBB-P2 dan BPHTB sampai saat ini sudah terealisasi sebesar 67.330 wajib pajak dari target tahun 2019 sebesar 67.328 wajib pajak atau 100% Wajib Pajak. Pencapaian realisasi ini merupakan kegiatan yang telah dipenuhinya pemutakhiran data PBB dan BPHTB dari aplikasi SIMPBB sehingga dengan adanya pemutakhiran data ini memudahkan dalam perhitungan dan penerimaan PBB dan BPHTB sehingga dapat meningkatkan PAD.

Kegiatan PBB dan BPHTB dan sasaran dan jenis Jumlah Dokumen SPPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan tepat waktu yaitu pada triwulan I lalu terealisasi sebesar 67.330 dari target sebesar 67.328. Hal ini menggambarkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) sudah dicetak dan didistribusikan ke masing-masing Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Target SPPT dan Ketetapan PBB P2
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2019

No	Kecamatan	SPPT	Ketetapan
1.	Padang Batung	7.288	107.939.397
2.	Loksado	2.744	45.335.356
3.	Telaga Langsat	4.339	57.247.324
4.	Angkinang	6.825	79.320.478
5.	Kandangan	12.966	401.543.182
6.	Sungai Raya	8.410	186.735.191
7.	Simpur	6.414	99.807.084





No	Kecamatan	SPPT	Ketetapan
8.	Kalumpang	2.543	32.795.293
9.	Daha Selatan	7.407	120.611.527
10.	Daha Utara	6.561	92.163.450
11.	Daha Barat	2.133	33.422.350
JUMLAH		67.630	1.256.920.632

Kegiatan Promosi PBB dan BPHTB yang mana kegiatan tersebut hanya dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun yaitu di triwulan II dan triwulan IV. Kegiatan telah di realisasikan di triwulan II lalu dan pada triwulan ke IV Tahun 2019 yaitu rapat dan pemasangan umbul-umbul penyampaian himbauan lunas PBB dan BPHTB yang dilaksanakan di kecamatan untuk memotivasi masyarakat agar lunas PBB dan BPHTB tepat waktu sehingga pembayaran PBB dan BPHTB tepat waktu.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang bertujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tidak hanya dilakukan dalam rangka peningkatan PAD, namun juga harus melihat dampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Artinya peningkatan PAD tidak boleh berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan kelompok masyarakat. Peningkatan kapasitas fiskal daerah juga harus mempertimbangkan tata kelola keuangan daerah, karena peningkatan anggaran yang besar jika tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan masalah, sehingga arah pengelolaan pendapatan daerah adalah optimalisasi fungsi anggaran yaitu anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting System*).

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih banyak tergantung pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada era otonomi, daerah diharapkan dapat memacu tingkat kemampuan keuangan daerah yang lebih baik. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber pendapatan daerah dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Intensifikasi lebih ditujukan pada sumber pendapatan



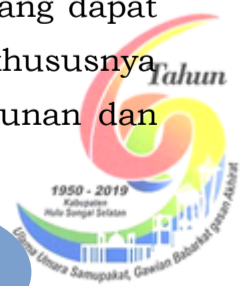


yang sudah ada namun belum optimal pemungutannya, sedangkan ekstensifikasi lebih ditujukan pada sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan, yang disesuaikan dengan potensi daerah.

Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi :

- a. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan secara rutin terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui penyesuaian tarif, perluasan subyek, obyek pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan percepatan proses penyusunan peraturan daerah berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Meningkatkan peran BUMD dalam memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penerimaan daerah.
- e. Peningkatan kualitas Pelayanan publik antara lain peningkatan peran pemerintah daerah dalam bidang perizinan.
- f. Optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak Pusat Dan Provinsi (PPh perorangan, PBB, dan PKB-BBNKB). Serta bagi hasil bukan pajak /sumber daya alam (SDA).
- g. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi penerimaan daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga perolehan dana perimbangan yang memadai.
- h. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah diatas, perlu menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini diimbangi dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal, serta memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD sehingga berbagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.





Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja. Kebijakan alokasi belanja sudah mendasarkan pada prioritas program dan kegiatan dengan pengendalian yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya untuk tercapainya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

SASARAN 5 ; MENINGKATNYA INVESTASI PMDN

Capaian kinerja Sasaran Strategis 5 pada **Tujuan I : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	4,80	9,08	189,17
Rata-rata			189,17

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya investasi PMDN adalah Tercapai atau tercapai 189,17%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI			TARGET RPJMD	
	2017	2018	2019	2019	2023
Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	3,00	4,20	9,08	4,80	7,00

Tahun 2019 persentase penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 201,78%, hal ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal seperti keterbatasan pengembangan inventarisasi potensi keunggulan daerah, belum optimalnya sosialisasi dan promosi untuk menunjang peningkatan Iklim Investasi, masih kurangnya sarana dan prasarana serta infrastruktur sebagai penguatan investasi di daerah dan belum tersedianya jaminan kepastian penanaman modal di daerah.





Sehingga perumusan kebijakan dalam arah perencanaan untuk Penguatan dan Peningkatan serta Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat dibutuhkan untuk melakukan Kesepakatan Kerjasama (MoU) dengan berbagai stakeholder dan pihak pengusaha dalam bentuk kemitraan yang telah maju merintis Pengembangan Potensi Daerah dalam hal Peningkatan Produktifitas pengusaha kecil dan UMKM maupun Koperasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Meningkatkan Promosi baik dalam daerah maupun luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui event Indonesian week maupun kegiatan sejenisnya untuk pengembangan informasi Budaya, Pariwisata dan Peluang Investasi, mewujudkan Sarana dan Prasarana pendukung pengembangan Investasi, menyusun Regulasi sebagai perangkat dan landasan hukum dalam upaya peningkatan serta memberikan jaminan berusaha di daerah serta membentuk dan mengoperasikan kinerja Tim Percepatan Berusaha di daerah sebagai dukungan Pemerintah dalam upaya peningkatan Iklim Investasi yang lebih baik.

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan Realisasi Investasi	124.113.000	115.626.500	93,16
Program Penguatan Iklim Investasi	2.055.000	2.055.000	100,00

Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Realisasi Investasi

Realisasi Program Peningkatan Realisasi Investasi adalah sebesar Rp.115.626.500,00 atau 93,16 % dari anggarannya sebesar Rp.124.113.000,00.

Realisasi tersebut merupakan realisasi Belanja Penyusunan dan pembuatan Modul Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).





2. Program Penguatan Iklim Investasi

Realisasi Program Penguatan Iklim Investasi adalah sebesar Rp. 2.055.000,00 atau 100 % dari anggarannya sebesar Rp. 2.055.000,00. Realisasi tersebut merupakan realisasi Belanja Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.

SASARAN 6 ; MENINGKATNYA PEMANFAATAN POTENSI PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BAGI MASYARAKAT

Capaian kinerja Sasaran Strategis 6 pada **Tujuan I : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>)	Rp.4.224.480.000	Rp.4.758.098.000	112,63
Rata-rata			112,63

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat adalah Tercapai atau sebesar 112,63%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI			TARGET RPJMD	
	2017	2018	2019	2019	2023
Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>)	Rp. 3.223.750.000	Rp. 3.904.175.000	Rp 4.758.098.000	Rp. 4.224.480.000	Rp. 9.073.800.000

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Tingkat Pengeluaran Wisatawan (*Spending of money*) didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.775.026.000	4.711.804.567	98,68
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	227.170.000	224.516.000	98,83



Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pengembangan Kemitraan	102.995.000	101.765.000	98,81
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	2.457.099.000	2.446.626.500	99,57

Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Tingkat Pengeluaran Wisatawan (*Spending of money*) tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Realisasi kinerja keuangan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebesar Rp. 4.711.804.567,00 atau 98.68 % dari anggarannya sebesar

Rp. 4.775.026.000,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa dan belanja Modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana pariwisata.	Rp	774.478.700,00
Peningkatan Pelayanan Obyek Wisata Kawasan Loksado	Rp	40.862.000,00
Peningkatan Layanan Hotel Rakat Mufakat	Rp	348.014.792,00
Penggalian Potensi Wisata Minat Khusus Jelajah Hutan.	Rp	12.260.000,00
Peningkatan Pelayanan Obyek Wisata Dermaga Bamboo Rafting Ni'ih	Rp	141.300.075,00
Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan (DAK)	Rp	2.642.719.000,00
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Wisata (DAK Non Fisik)	Rp	652.170.000,00
Dukungan Operasional Non Rutin Fasilitas Pariwisata (DAK Non Fisik)	Rp	100.000.000,00
JUMLAH		4.711.804.567,00

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Realisasi capaian kinerja dan keuangan dari program ini adalah sebesar Rp. Rp. 177.444.605 ,00 atau 95,70 % dari pagu anggaran sebesar Rp. Rp. 185.143.000,-,00. Realisasi ter

Realisasi kinerja keuangan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata sebesar Rp. 224.516.000,00 atau 98.83 % dari anggarannya





sebesar Rp. 227.170.000,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa dan belanja Modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah	Rp	129.396.000,00
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Festival Loksado	Rp	95.120.000,00
JUMLAH	Rp	224.516.000,00

3. Program Pengembangan Kemitraan

Realisasi kinerja keuangan Program Pengembangan Kemitraan adalah sebesar Rp.101.765.000,00 atau 98.81 % dari anggarannya sebesar Rp. 102.995.000,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pembinaan Bagi Pelaku Usaha Jasa Pariwisata.	Rp	22.500.000,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan kemitraan.	Rp	79.265.000,00
JUMLAH	Rp	101.765.000,00

4. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Realisasi kinerja keuangan program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya, Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.391.030.488,00 atau 97,3% dari anggaran sebesar Rp. 2.457.099.000,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :





▪ Perkembangan keragaman budaya daerah	Rp	175.345.000,00
▪ Pembinaan dan pelestarian nilai sejarah dan perjuangan bangsa	Rp	404.066.000,00
▪ Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Rp	704.030.988,00
▪ Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Rp	271.291.500,00
▪ Festival budaya meratus	Rp	56.100.000,00
▪ Festival olahraga tradisional dan permainan rakyat	Rp	157.157.000,00
▪ Festival karasmin banua	Rp	111.990.000,00
▪ Festival luar daerah	Rp	61.050.000,00
▪ Pengelolaan permuseuman	Rp	450.000.000,00
Jumlah	Rp	2.391.030.488,00

Pencapaian indikator kinerja sasaran Tingkat Pengeluaran Wisatawan (Spending of money) dipengaruhi oleh Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan Lama tinggal wisatawan (Length of Stay).

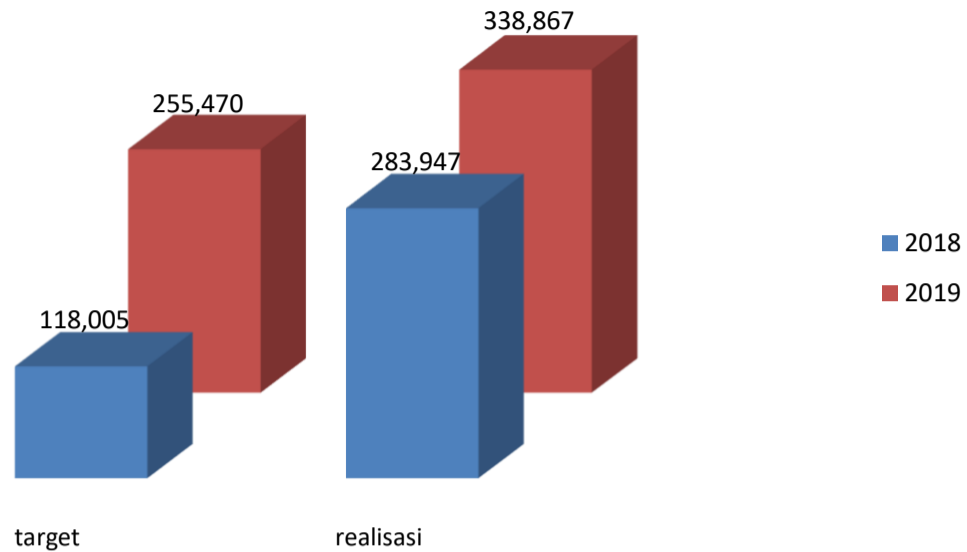
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	REALISASI
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	$\frac{\text{Realisasi kunjungan wisatawan}}{\text{Target kunjungan wisatawan}} \times 100$ $\frac{338.867}{255.470} \times 100 = 132,64\%$	338.867 wisatawan
Lama tinggal wisatawan (Length of Stay)	$\frac{\text{Realisasi lama tinggal wisatawan}}{\text{Target lama tinggal wisatawan}} \times 100$ $\frac{1,5}{1,5} \times 100 = 100 \%$	1,5 malam

Pencapaian kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 yakni sebanyak 338.867 wisatawan, terdiri dari 338,169 wisatawan nusantara (wisnus) dan 698 wisatawan mancanegara (wisman). Sebagai perbandingan, tahun 2018 capaian kunjungan wisatawan berjumlah 283,259 wisatawan.





Data Kunjungan Wisatawan di Kab. HSS Tahun 2018 -2019



Secara lebih rinci data kunjungan wisatawan per bulan disajikan dalam tabel berikut:

NO	BULAN	2015			2016			2017			2018			2019		
		WISMAN	WISNUS	JUMLAH	WISMAN	WISNUS	JUMLAH	WISMAN	WISNUS	JUMLAH	WISMAN	WISNUS	JUMLAH	WISMAN	WISNUS	JUMLAH
1	JANUARI	10	10.878	10.888	24	12.290	12.314	18	11.616	11.634	34	12.435	12.469	47	32.170	32.217
2	FEBRUARI	9	4.381	4.390	15	6.344	6.359	26	26.962	26.988	45	27.094	27.139	39	25.347	25.386
3	MARET	14	3.185	3.199	37	5.056	5.093	42	15.613	15.655	66	17.886	17.952	114	28.339	28.453
4	APRIL	12	5.227	5.239	29	6.034	6.063	38	27.105	27.143	49	30.077	30.126	42	21.445	21.487
5	MEI	11	3.883	3.894	16	6.957	6.973	16	26.721	26.737	31	29.500	29.531	52	19.893	19.945
6	JUNI	9	4.479	4.488	35	4.349	4.384	24	11.606	11.630	86	34.753	34.839	34	35.113	35.147
7	JULI	7	11.332	11.339	56	15.054	15.110	45	27.972	28.017	47	28.174	28.221	39	29.347	29.386
8	AGUSTUS	3	4.665	4.668	49	4.677	4.726	55	32.986	33.041	65	33.970	34.035	47	26.807	26.854
9	SEPTEMBER	5	2.984	2.989	75	5.828	5.903	75	11.654	11.729	75	12.775	12.850	127	32.576	32.703
10	OKTOBER	3	3.166	3.169	87	4.637	4.724	84	14.918	15.002	85	15.005	15.090	39	22.517	22.556
11	NOVEMBER	18	3.778	3.796	77	6.177	6.254	46	18.257	18.303	50	19.120	19.170	46	33.164	33.210
12	DESEMBER	11	10.710	10.721	137	15.435	15.572	59	17.367	17.426	55	22.470	22.525	72	31.451	31.523
JUMLAH		112	68.668	68.780	637	92.838	93.475	528	242.777	243.305	688	283.259	283.947	698	338.169	338.867

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Hulu Sungai Selatan

MISI
MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR FISIK




3

DAN SOSIAL YANG MENUNJANG SEKTOR PEREKONOMIAN

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut;

TUJUAN 1	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL YANG BERKUALITAS
---------------------------	---

Capaian Tujuan pertama pada Misi Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang menunjang Sektor Perekonomian yakni **“Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas.”**

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 1 (satu) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1; MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL YANG BERKUALITAS

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada **Tujuan I : Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	62,45	64,03	102,53
Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	62,68	61,33	97,85
Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	24	23,80	99,17
Persentase kecukupan RTH publik	24,48	24,84	100,00
Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	53,05	50,85	95,85
Rata-rata Capaian			99,08%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas adalah Tidak Tercapai atau tercapai 99,08%.





Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI			TARGET RPJMD	
	2017	2018	2019	2019	2023
Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	74,00	74,50	64,03	62,45	67,00
Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	80,00	85	61,33	62,68	71,43
Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	10	14,00	23,80	24	100
Persentase kecukupan RTH publik	24,82	24,83	24,84	24,48	24,87
Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	40,16	40,66	50,85	53,05	82,32

Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	62,45	64,03	102,53

Pada indikator kinerja sasaran Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam dari target 62,45, terealisasi 64,03 yang berarti Tercapai atau sebesar 102,53%.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bina Marga No. 77 Tahun 1990, jaringan jalan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Jalan dengan kondisi yang mantap (stabil) adalah jalan yang selalu dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama yang kondisinya sudah baik/sedang yang hanya memerlukan pemeliharaan.
2. Jalan dengan kondisi tidak mantap adalah jalan yang tidak dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama kondisinya rusak/rusak berat yang memerlukan pekerjaan berat (rehabilitasi, perbaikan, konstruksi) termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda 4.





Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang (kondisi mantap) ditargetkan 60% harus terpenuhi tahun 2019, dengan Jumlah kumulatif panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan produksi yang terbangun harus 100%.

Rumus Perhitungan Persentase jalan dalam kondisi mantap :

Jumlah panjang jalan kondisi mantap (baik + sedang) dibagi dengan total jumlah panjang jalan kabupaten dikali 100%

$$\frac{550,27}{859,36} \times 100\% = 64,03\%$$

Capaian Indikator Persentase Jalan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2019 sepanjang 550,27 Km dari total 859,36 Km panjang jalan kabupaten atau sebesar 64,03%. Hal ini lebih besar dari target SPM sebesar 60% yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam didukung oleh program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam			
Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	62.066.173.000	60.182.399.926	96,96%
Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	44.998.075.475	43.203.430.233	96,01%
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	864.544.000	853.169.000	98,68%
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau	362.979.700	362.248.334	99,80%

Realisasi capaian kinerja dan keuangan dari program ini adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini





Tabel
Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				
	1. Kegiatan Pembangunan Jalan	31.625.095.000,00	30.405.244.217,00	96,14	100
	2. Kegiatan Pembangunan Jembatan	6.137.700.000,00	5.689.171.287,00	92,69	100
	3. Pembangunan Jalan (DAK Reguler)	13.301.428.000,00	13.210.001.483,84	99,31	100
	4. Pembangunan Jembatan (DAK Reguler)	11.001.950.000,00	10.877.982.938,00	98,87	100
2.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				
	1. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	36.728.062.000,00	35.566.056.931,75	96,84	100
	2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	8.270.013.475,00	7.637.373.301,00	92,35	97,62
JUMLAH		107.064.248.475,00	103.385.830.158,59	96,56	99,60

Dokumentasi kegiatan peningkatan jalan dalam kondisi baik TA. 2019 sebagai berikut.

Rehabilitasi Jalan Ruas Batang Kulur - Sp. 3 Muara Paring Agung
Kec. Sungai Raya



Penanganan Longsor di Desa Mawangi
Kec. Padang Batung



Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Pariangan
Kec. Padang Batung



Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	62,68	55,85	89,10

Pada indikator kinerja sasaran Persentase kinerja sistem jaringan irigasi dari target 62,68, terealisasi 55,85 yang berarti Tercapai atau sebesar 89,10%.

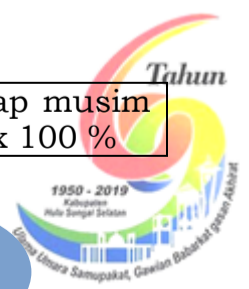
Standar Pelayanan Minimum di bidang Sumber Daya Air sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, persentase tingkat kondisi sistem irigasi baik ditargetkan 70% harus terpenuhi tahun 2019.

Rumus Perhitungan Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi adalah sebagai berikut :

Jumlah ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam dibagi jumlah ketersediaan air irigasi seluruh hektar x 100 %

$$\frac{10.517,60}{17.149,20} \times 100 = 61,33$$

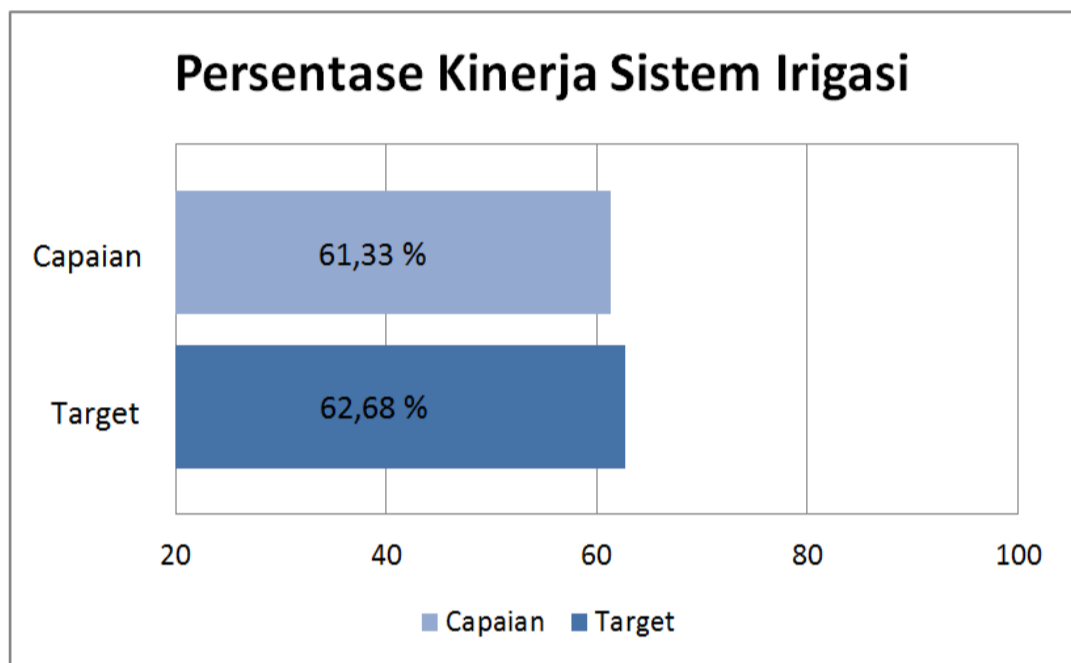
Laporan Kinerja (Kj) Kab. HSS Tahun 2019





Berdasarkan perhitungan di atas, maka capaian indikator persentase kinerja sistem irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 teralisasi sebesar 61,33 % sedikit lebih rendah dari target semula yang ingin dicapai yakni 62,68%.

Grafik
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi



Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase kinerja sistem jaringan irigasi didukung oleh program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kinerja sistem jaringan irigasi			
Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	35.888.505.000	34.786.381.729	96,93%
Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Lainnya	4.075.067.000	3.910.039.998	95,95%

Realisasi capaian kinerja dan keuangan dari program ini adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel
Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Sumber Daya Air





No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya				
	1. Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai	4.196.042.000	3.858.858.092	91,96	94,44
	2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	1.181.159.000	1.020.540.000	86,40	100
	3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	7.130.002.000	7.057.299.235	98,98	100
	4. Pengembangan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	7.952.527.000	7.769.240.190	97,70	100
	5. Pembangunan Daerah Irigasi Baru (DAK)	15.428.775.000	15.080.443.000	97,74	100
2.	Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Lainnya :				
	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	3.899.478.000	3.734.750.000	95,77	100
	2. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali	175.589.000	175.589.000	100	100
JUMLAH		39.963.572.000	34.841.720.283	95,51	99,21

Dokumentasi kegiatan yang menunjang capaian Persentase kinerja sistem jaringan irigasi TA. 2019 sebagai berikut.

Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Palimbuaian Kec. Telaga Langsat



Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong Belakang RT.01, Ds. Padang batung, Kec. Padang batung

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbil Kec. Telaga Langsat



Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong Belakang Ds. Panggungan Kec. Loksado



Normalisasi Sungai Watun I Desa Teluk haur Kec.Daha utara

Normalisasi Sungai Murung raya, Kec.Daha utara



Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	24	23,80	99,17

Pada indikator kinerja sasaran Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik dari target 24, terealisasi 23,80 yang berarti Tidak Tercapai atau sebesar 99,17%.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor indikator sebagai berikut:

- a. Pencapaian persentase Bangunan Publik yang terbangun;

Pengukuran persentase Bangunan Publik yang terbangun sebagai berikut: Jumlah Bangunan Publik yang terbangun dibagi jumlah total bangunan pelayanan publik yang dibutuhkan X 100%

$$\frac{21 \text{ Buah}}{33 \text{ Buah}} \times 100\% = 63,64\%$$





- b. Persentase penduduk/ rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih;

Pengukuran Persentase penduduk/ rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih sebagai berikut: Jumlah KK yang mendapatkan akses air bersih yang aman dibagi jumlah KK se Kab. X 100%

$$\frac{40,511 \text{ KK}}{47,852 \text{ KK}} \times 100\% = 84,66\%$$

- c. Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar

Pengukuran Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar sebagai berikut: Jumlah KK yang mendapatkan akses air limbah yang memadai dibagi jumlah KK se Kab. X 100%

$$\frac{38,188 \text{ KK}}{47,852 \text{ KK}} \times 100\% = 81,89\%$$

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik didukung oleh program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik			
Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	17.593.000.000	17.172.543.911	97,61%
Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	7.357.100.000	7.211.519.710	98,02%
Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	9.300.534.601	9.061.009.230	97,42%

Realisasi capaian kinerja dan keuangan dari program ini adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel
Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan





No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah				
	1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sanitasi/Air Limbah	1.510.434.101,00	1.306.147.100,00	83,00	100
	2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	3.422.952.500,00	3.218.948.500,00	95,32	100
	3. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi/Air Limbah	100.062.500,00	64.825.000,00	64,78	100
	4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK)	4.222.841.000,00	4.199.288.400 ,00	99,44	100
	5. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi/Air Limbah (DAK)	7.690.038.000,00	7.690.037.130,00	100,00	100
2.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				
	1. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	8.580.675.000,00	8.275.213.890,00	96,44	100
	2. Kegiatan Penataan Bangunan Gedung	81.400.000,00	12.250.000,00	15,05	100
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				
	1. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	8.930.925.000,00	8.885.080.021,00	99,49	100
JUMLAH		34.539.328.101,00	33.651.790.041,00	81,69	100

Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik TA. 2019 sebagai berikut.

Pembangunan Sekretariat Islamic Center

Rehabilitasi Gedung Serba Guna Kec. Angkinang





Pembangunan tangki septik skala komunal Desa Paharangan Kec. Daha Utara

Rehabilitasi Saluran Air Drainase Desa Baluti Kec. Kandangan



Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kab. HSS



Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Persentase kecukupan RTH publik	24,48	24,84	100,00

Pada indikator kinerja sasaran Persentase kecukupan RTH publik dari target 24,48, terealisasi 24,84 yang berarti Tercapai atau sebesar 100%.





Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Triwulan Tahun 2019			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7
Persentase RTH public	Persen	24,84	24,83	24,83	24,83	24,84
Persentase Taman dalam kondisi baik	Persen	35	25	25	25	35
Luasan RTH public (Ha)	Ha	106,202	106,166	106,166	106,166	106,202

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase kecukupan RTH publik didukung oleh program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kecukupan RTH publik			
Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan areal pemakaman	4.635.450.000	4.548.259.000	98,12%
Program Penataan dan Penguasaan Tanah	14.839.670.000	13.887.018.940	93,58%

Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Kinerja Sasaran Persentase kecukupan RTH publik tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

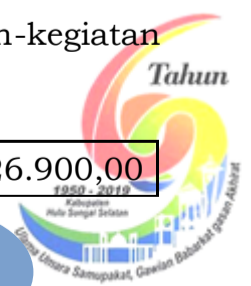
1. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan areal pemakaman

Realisasi kinerja keuangan Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat Tahun 2019 adalah sebesar Rp6.367.807.596,00 atau 97,94 % dari anggarannya sebesar Rp6.501.606.000,00.

Realisasi kinerja keuangan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2019 adalah sebesar Rp4.549.214.000,00 atau 98,14 % dari anggarannya sebesar Rp.4.635.750.000,00.

Realisasi keuangan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2019 tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pembangunan RTH	Rp 2.536.226.900,00
-----------------	---------------------





Pemeliharaan RTH	Rp 2.012.987.100,00
Jumlah	Rp 4.549.214.000,00

2. Program Penataan dan Penguasaan Tanah

Realisasi kinerja Program Penataan dan Penguasaan Tanah tahun 2019 adalah sebesar Rp13.887.018.940,00 atau 93,58% dari anggarannya sebesar Rp.14.839.670.000,00.

Realisasi keuangan Program Penataan dan Penguasaan Tanah Tahun 2019 tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan Tanah Aset Daerah	Rp 13.772.037.940,00
Inventarisasi Tanah Jalan Lingkungan	Rp 114.981.000,00
Jumlah	Rp 13.887.018.940,00

Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	53,05	50,85	95,85

Pada indikator kinerja sasaran Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dari target 53,05, terealisasi 50,85 yang berarti Tidak Tercapai atau sebesar 95,85%.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor capaian program/kegiatan dan indikator sebagai berikut:

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	9	10	11	12



Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	9	10	11	12
Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	44,55	41,75	41,75	43,15	44,55
	Persentase jumlah perumahan sehat	Persen	28,95	21,06	21,06	25,79	28,95
	Persentase panjang jalan lingk. Dalam kondisi baik	Persen	73,61	67,01	67,01	68,33	73,61
Kegiatan Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Jumlah rumah layak huni	Buah	600	0	0	300	600
Kegiatan Peningkatan jalan perumahan	Jumlah perumahan sehat	Locus	5	0	0	3	5
Kegiatan Peningkatan jalan permukiman	Jumlah jalan kawasan permukiman kondisi baik	KM	8,935	0	0	1,787	8,935
Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase Jumlah titik PJU terhadap panjang jalan	Persen	23,97	18,78	18,78	18,78	22,97
Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU dalam kondisi baik	Titik	4.078	3.152	3,152	3,152	4,078
Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Persentase titik PJU dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	100	100
Program Penataan dan Penguasaan Tanah	Persentase penguasaan fisik tanah yang teradministrasi	persen	12	8	8	8	12
Kegiatan Pembuatan dokumen administrasi tanah pemerintah daerah	Jumlah dokumen tanah pemerintah Daerah yang teradministrasi	Dok	20	0	0	0	0
Kegiatan Inventarisasi Tanah Jalan Lingkungan	Jumlah dokumen tanah jalan Lingkungan yang teradministrasi	Dok	10	0	0	0	10
Kegiatan Pengadaan Tanah asset Daerah	Persentase pelayanan pengadaan tanah	Persen	100	0	35	65	100

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas didukung oleh program sebagai berikut :





Indikator Kinerja Sasaran : perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas			
Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	6.501.606.000	6.367.807.596	97,94%
Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	7.357.100.000	7.211.519.710	98,02%

Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat

Realisasi kinerja keuangan Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat Tahun 2019 adalah sebesar Rp6.367.807.596,00 atau 97,94 % dari anggarannya sebesar Rp6.501.606.000,00.

Realisasi keuangan Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat Perumahan Tahun 2019 tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan serta belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

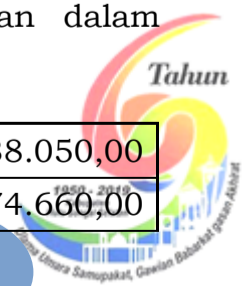
Peningkatan Jalan Perumahan	Rp 4.333.066.024,00
Peningkatan Jalan Permukiman	Rp 1.899.313.572,00
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Rp 135.428.000,00
Jumlah	Rp 6.367.807.596,00

2. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

Realisasi kinerja Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tahun 2019 adalah sebesar Rp7.213.412.710,00 atau 98,05 % dari anggarannya sebesar Rp7.357.100.000,00

Realisasi Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tahun 2019 berupa berupa belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pembangunan PJU	Rp 3.989.538.050,00
Pemeliharaan PJU	Rp 3.223.874.660,00





Jumlah	Rp 7.213.412.710,00
---------------	----------------------------

MISI 4	MENGOPTIMALKAN SUMBERDAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
-------------------	--

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut;

TUJUAN 1	MENINGKATKAN SUMBER DAYA DAERAH DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
---------------------	---

Capaian Tujuan pertama pada Misi Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan yakni **“Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan”**

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 3 (tiga) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1; MENINGKATNYA KAPASITAS PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada **Tujuan I : Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,64	0,65	101,56
Rata-rata Capaian			101,56%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat adalah **Tercapai atau tercapai 101,56%**.





Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI			TARGET RPJMD	
	2017	2018	2019	2019	2023
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,58	0,62	0,65	0,64	0.71

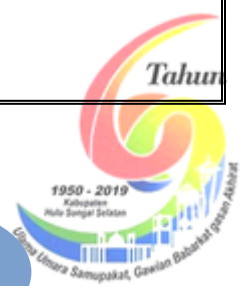
Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir capaian rata-rata IDM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan.

Pengukuran IDM dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Desa dan verifikasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan tingkat Nasional. Secara resmi nilai IDM ditetapkan oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah nilai komposit dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. IDM yang dimaksud rata-rata IDM yang dicapai oleh seluruh Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Cara pengukuran Realisasi Capaian indikator Kinerja Sasaran Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULAS I/ PENJELASAN	KET
Indeks Desa Membangun (IDM)	$IDM = \frac{\sum IDM \text{ se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}}$ <p>IDM = rata-rata Indeks Desa Membangun Kab.HSS</p>	$\frac{93.7545}{144} = 0,6511$
	$\sum IDM \text{ se Kab.HSS}$: Jumlah IDM Desa se Kab.HSS $\sum \text{Desa se Kab.HSS}$: Jumlah Desa se Kab.HSS	





Proses pengukuran IDM dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa kemudian diverifikasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten serta provinsi dan nasional. Untuk pengukuran IDM tahun 2019 saat ini telah dilakukan pengukuran mulai tingkat Desa, Kabupaten dan datanya sudah diserahkan ke tingkat Provinsi, dan sedang dalam proses evaluasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nilai IDM menunjukkan tingkat kemajuan dan kemandirian suatu Desa. Klasifikasi status desa dikategorikan dengan ambang batas sebagai berikut :

- 1). Desa Sangat Tertinggal, dengan nilai IDM $< 0,4907$
- 2). Desa Tertinggal, dengan nilai $0,4907 < \text{IDM} \leq 0,5989$
- 3). Desa Berkembang, dengan nilai $0,5989 < \text{IDM} \leq 0,7072$
- 4). Desa Maju, dengan nilai $0,7072 < \text{IDM} \leq 0,8155$
- 5). Desa Mandiri, dengan nilai $0,7072 < \text{IDM} \leq 0,8155$

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Nilai IDM dan Status Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel
Nilai IDM dan Status Perkembangan Desa
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

NO	NAMA DESA	IKS 2019	IKE 2019	IKL 2019	NILAI IDM 2019	STATUS IDM 2019
1	Hamalau	0.8171	0.7833	0.6667	0.7557	Maju
2	Telaga Bidadari	0.6857	0.5667	0.6000	0.6175	Berkembang
3	Karasikan	0.7829	0.5000	0.6667	0.6499	Berkembang
4	Sungai Raya Utara	0.7257	0.4667	0.6667	0.6197	Berkembang
5	Sungai Raya Selatan	0.7314	0.5833	0.6667	0.6605	Berkembang
6	Hariti	0.7886	0.5667	0.6000	0.6518	Berkembang
7	Ida Manggala	0.6686	0.5667	0.6667	0.6340	Berkembang
8	Bumi Berkat	0.6686	0.5000	0.6667	0.6118	Berkembang
9	Batang Kulur Kiri	0.7771	0.6167	0.6000	0.6646	Berkembang
10	Batang Kulur Tengah	0.7657	0.5667	0.6667	0.6664	Berkembang
11	Batang Kulur Kanan	0.7200	0.4667	0.6667	0.6178	Berkembang
12	Baru	0.7257	0.5333	0.6667	0.6419	Berkembang
13	Tamiyang	0.7943	0.5167	0.6000	0.6370	Berkembang
14	Asam	0.7657	0.4333	0.6667	0.6219	Berkembang
15	Sungai Kali	0.7371	0.5000	0.7333	0.6568	Berkembang
16	Sarang Halang	0.7143	0.5000	0.6667	0.6270	Berkembang
17	Paring Agung	0.7143	0.6000	0.6667	0.6603	Berkembang
18	Tanah Bangkang	0.7886	0.5167	0.6667	0.6573	Berkembang
19	Karang Jawa Muka	0.8571	0.6333	0.6000	0.6968	Berkembang
20	Karang Jawa	0.7486	0.4500	0.6000	0.5995	Berkembang





NO	NAMA DESA	IKS 2019	IKE 2019	IKL 2019	NILAI IDM 2019	STATUS IDM 2019
21	Tabihi	0.7771	0.6000	0.6667	0.6813	Berkembang
22	Pandulangan	0.7086	0.6333	0.6667	0.6695	Berkembang
23	Kaliring	0.7886	0.5833	0.5333	0.6351	Berkembang
24	Jambu Hulu	0.7143	0.5000	0.6000	0.6048	Berkembang
25	Pahampangan	0.7829	0.5833	0.6000	0.6554	Berkembang
26	Padang Batung	0.7486	0.6333	0.6000	0.6606	Berkembang
27	Jembatan Merah	0.7086	0.5333	0.6000	0.6140	Berkembang
28	Batu Bini	0.6000	0.7167	0.8000	0.7056	Berkembang
29	Mawangi	0.7429	0.7500	0.4667	0.6532	Berkembang
30	Madang	0.6971	0.4667	0.8667	0.6768	Berkembang
31	Durian Rabung	0.7714	0.4833	0.6000	0.6182	Berkembang
32	Jelatang	0.6857	0.5500	0.6667	0.6341	Berkembang
33	Batu Laki	0.7429	0.5667	0.6667	0.6588	Berkembang
34	Malutu	0.7314	0.5333	0.5333	0.5993	Berkembang
35	Malilingin	0.7714	0.5667	0.6000	0.6460	Berkembang
36	Lok Bnuang	0.7657	0.5000	0.7333	0.6663	Berkembang
37	Telaga Langsung	0.6571	0.6667	0.6667	0.6635	Berkembang
38	Mandala	0.8686	0.6333	0.6000	0.7006	Berkembang
39	Ambutun	0.7371	0.4500	0.6667	0.6179	Berkembang
40	Hamak	0.7200	0.6167	0.7333	0.6900	Berkembang
41	Hamak Timur	0.7657	0.6167	0.7333	0.7052	Berkembang
42	Hamak Utara	0.7486	0.3833	0.6000	0.5773	Tertinggal
43	Pakuan Timur	0.7429	0.5500	0.6667	0.6532	Berkembang
44	Gumbil	0.7143	0.5167	0.6667	0.6326	Berkembang
45	Longawang	0.7486	0.5000	0.6667	0.6384	Berkembang
46	Pandulangan	0.7371	0.6000	0.6667	0.6679	Berkembang
47	Bamban Utara	0.7886	0.5000	0.6667	0.6518	Berkembang
48	Bamban	0.7429	0.6833	0.8000	0.7421	Maju
49	Bamban Selatan	0.7429	0.6333	0.6667	0.6810	Berkembang
50	Kayu Abang	0.7714	0.6833	0.5333	0.6627	Berkembang
51	Angkinang	0.8629	0.7000	0.5333	0.6987	Berkembang
52	Telaga Sili-Sili	0.7486	0.5000	0.6667	0.6384	Berkembang
53	Angkinang Selatan	0.7543	0.6500	0.6667	0.6903	Berkembang
54	Tawia	0.6686	0.6333	0.6667	0.6562	Berkembang
55	Taniran Kubah	0.8000	0.6333	0.4667	0.6333	Berkembang
56	Taniran Selatan	0.8171	0.6000	0.8667	0.7613	Maju
57	Bakarung	0.7771	0.6667	0.6000	0.6813	Berkembang
58	Gambah Luar	0.8000	0.6000	0.6667	0.6889	Berkembang
59	Gambah Luar Muka	0.8229	0.6667	0.6000	0.6965	Berkembang
60	Gambah Dalam	0.7714	0.6333	0.6667	0.6905	Berkembang
61	Gambah Dalam Barat	0.6857	0.6333	0.8000	0.7063	Berkembang
62	Sungai Kupang	0.8800	0.5000	0.7333	0.7044	Berkembang
63	Bangkau	0.6914	0.5833	0.8000	0.6916	Berkembang
64	Lungau	0.8686	0.5500	0.5333	0.6506	Berkembang
65	Sungai Paring	0.7714	0.5667	0.8000	0.7127	Maju
66	Bariang	0.7771	0.5667	0.6667	0.6702	Berkembang
67	Amawang Kiri	0.6971	0.7333	0.6667	0.6990	Berkembang
68	Amawang Kiri Muka	0.7886	0.5500	0.6000	0.6462	Berkembang
69	Amawang Kanan	0.8800	0.5167	0.6667	0.6878	Berkembang





NO	NAMA DESA	IKS 2019	IKE 2019	IKL 2019	NILAI IDM 2019	STATUS IDM 2019
70	Tibung Raya	0.9429	0.7500	0.6667	0.7865	Maju
71	Baluti	0.9086	0.6000	0.8667	0.7918	Maju
72	Tebing Tinggi	0.8057	0.4833	0.6667	0.6519	Berkembang
73	Simpur	0.7486	0.6833	0.6667	0.6995	Berkembang
74	Garunggang	0.7314	0.6000	0.6667	0.6660	Berkembang
75	Amparaya	0.7200	0.5167	0.6667	0.6345	Berkembang
76	Panjampang Bahagia	0.7200	0.4833	0.6667	0.6233	Berkembang
77	Ulin	0.7086	0.6333	0.6667	0.6695	Berkembang
78	Pantai Ulin	0.7257	0.5667	0.6000	0.6308	Berkembang
79	Wasah Hulu	0.7600	0.5667	0.6000	0.6422	Berkembang
80	Wasah Tengah	0.8000	0.7000	0.5333	0.6778	Berkembang
81	Wasah Hilir	0.7371	0.6667	0.6667	0.6902	Berkembang
82	Kapuh	0.7657	0.6333	0.6667	0.6886	Berkembang
83	Muning Baru	0.7486	0.6000	0.9333	0.7606	Maju
84	Muning Dalam	0.7486	0.3000	0.6000	0.5495	Tertinggal
85	Muning Tengah	0.7200	0.5667	0.5333	0.6067	Berkembang
86	Banjarbaru	0.7657	0.5833	0.5333	0.6274	Berkembang
87	Bayanan	0.8057	0.6667	0.6000	0.6908	Berkembang
88	Pandan Sari	0.8114	0.6000	0.4667	0.6260	Berkembang
89	Pihanin Raya	0.7371	0.7167	0.4000	0.6179	Berkembang
90	Tumbukan Banyu	0.8971	0.8667	0.6667	0.8102	Maju
91	Sungai Pinang	0.8171	0.5333	0.7333	0.6946	Berkembang
92	Habirau	0.7543	0.5667	0.6000	0.6403	Berkembang
93	Habirau Tengah	0.8400	0.6500	0.4667	0.6522	Berkembang
94	Parigi	0.8057	0.4667	0.6000	0.6241	Berkembang
95	Banua Hanyar	0.7543	0.6667	0.6000	0.6737	Berkembang
96	Tambangan	0.7943	0.6333	0.8000	0.7425	Maju
97	Baruh Jaya	0.7943	0.5833	0.6000	0.6592	Berkembang
98	Samuda	0.7771	0.6000	0.6667	0.6813	Berkembang
99	Pakapuran Kecil	0.8743	0.6167	0.5333	0.6748	Berkembang
100	Panggandingan	0.7943	0.6500	0.6667	0.7037	Berkembang
101	Tambak Bitin	0.8971	0.7667	0.5333	0.7324	Maju
102	Pakan Dalam	0.7429	0.6333	0.5333	0.6365	Berkembang
103	Paramaian	0.7200	0.6000	0.6000	0.6400	Berkembang
104	Pandak Daun	0.8343	0.5833	0.4667	0.6281	Berkembang
105	Murung Raya	0.8229	0.6833	0.5333	0.6798	Berkembang
106	Balah Paikat	0.7200	0.5667	0.5333	0.6067	Berkembang
107	Sungai Garuda	0.7714	0.6167	0.6000	0.6627	Berkembang
108	Sungai Mandala	0.8171	0.5833	0.4000	0.6001	Berkembang
109	Mdl. Murung Mesjid	0.7257	0.5667	0.6667	0.6530	Berkembang
110	Baruh Kembang	0.8629	0.6500	0.6000	0.7043	Berkembang
111	Teluk Haur	0.7829	0.6000	0.6667	0.6832	Berkembang
112	Pasungkan	0.7429	0.5500	0.5333	0.6087	Berkembang
113	Teluk Kabak	0.8057	0.5667	0.6667	0.6797	Berkembang
114	Hamayung	0.6514	0.6000	0.6667	0.6394	Berkembang
115	Hamayung Utara	0.7371	0.5667	0.6000	0.6346	Berkembang
116	Paharangan	0.7943	0.5000	0.6000	0.6314	Berkembang
117	Hakurung	0.7486	0.5000	0.5333	0.5940	Tertinggal
118	Balimau	0.7257	0.4333	0.8667	0.6752	Berkembang





NO	NAMA DESA	IKS 2019	IKE 2019	IKL 2019	NILAI IDM 2019	STATUS IDM 2019
119	Karang Paci	0.6857	0.5000	0.6667	0.6175	Berkembang
120	Bago Tanggul	0.7143	0.3500	0.5333	0.5325	Tertinggal
121	Karang Bulan	0.7200	0.5167	0.8000	0.6789	Berkembang
122	Balanti	0.7714	0.5833	0.4667	0.6071	Berkembang
123	Kalumpang	0.7029	0.5000	0.7333	0.6454	Berkembang
124	Tambingkar	0.7371	0.5000	0.6667	0.6346	Berkembang
125	Sirih	0.7943	0.6000	0.6667	0.6870	Berkembang
126	Sirih Hulu	0.7771	0.4333	0.6667	0.6257	Berkembang
127	Halunuk	0.6000	0.5500	0.6667	0.6056	Berkembang
128	Panggungan	0.6743	0.4667	0.6667	0.6026	Berkembang
129	Lumpangi	0.6571	0.5500	0.6667	0.6246	Berkembang
130	Malinau	0.7029	0.4833	0.6667	0.6176	Berkembang
131	Hulu Banyu	0.6057	0.5333	0.6667	0.6019	Berkembang
132	Tumingki	0.6286	0.3667	0.9333	0.6429	Berkembang
133	Kamawakan	0.5486	0.2833	0.6667	0.4995	Tertinggal
134	Lok Lahung	0.7029	0.4333	0.6667	0.6010	Berkembang
135	Loksado	0.7086	0.5500	0.9333	0.7306	Maju
136	Haratai	0.6857	0.4667	0.6667	0.6064	Berkembang
137	Ulang	0.7943	0.5000	0.6667	0.6537	Berkembang
138	Siang Gantung	0.6914	0.3667	0.5333	0.5305	Tertinggal
139	Baru	0.7029	0.2500	0.6000	0.5176	Tertinggal
140	Tanjung Selor	0.5486	0.4000	0.6000	0.5162	Tertinggal
141	Badaun	0.6457	0.3667	0.6000	0.5375	Tertinggal
142	Bajayau	0.7086	0.4000	0.5333	0.5473	Tertinggal
143	Bajayau Tengah	0.6171	0.3667	0.6000	0.5279	Tertinggal
144	Bajayau Lama	0.6229	0.5500	0.5333	0.5687	Tertinggal

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tingkat perkembangan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2019 menurut kategori perkembangannya, sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Tingkat Perkembangan Desa
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

NO	KATEGORI DESA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Mandiri	0	0%
2	Maju	11	7,64%
3	Berkembang	121	84,03%
4	Tertinggal	12	8,33%
5	Sangat Tertinggal	0	0%
JUMLAH		144	100%





Adapun tingkat perkembangan desa dalam beberapa tahun terakhir terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel
Perkembangan Kategori Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2017, 2018, 2019

NO	KATEGORI STATUS DESA	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Mandiri	-	-	-
2	Maju	6	6	11
3	Berkembang	100	99	121
4	Tertinggal	38	39	12
5	Sangat Tertinggal	-	-	-
JUMLAH		144	144	144

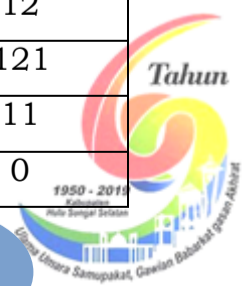
Pada tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan kategori Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tiga tahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik, yaitu dengan berkurangnya jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal, serta meningkatnya jumlah desa berkembang, maju dan mandiri.

Jika ditreprestasikan sesuai dengan interval penilaian maka perkembangan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, rata-rata berkembang.

Pada RPJMN 2014-2019 terkait IDM indikator kinerja sasaran strategis pada Pemerintah Pusat khususnya pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yaitu berkurangnya 5.000 Desa Tertinggal dan meningkatkan 2.000 Desa Mandiri. Adapun target kinerja pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu meningkatnya Desa mandiri dan menurunnya Desa tertinggal sebanyak 750 Desa atau 150 Desa setiap tahun.

Tabel
Perbandingan Capaian Status Desa berdasarkan IDM
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Nasional Tahun 2019

No	Status Desa	Nasional	Prov. Kalsel	Kab. HSS
1	Mandiri	-	4	0
2	Maju	2	121	12
3	Berkembang	22	1303	121
4	Tertinggal	8	407	11
5	Sangat Tertinggal	2	28	0





Jumlah	34	1863	144
--------	----	------	-----

IDM merupakan komposit dari nilai indeks ketahanan sosial (IKS) indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan ekologi (IKEkolog). Untuk dapat meningkatkan nilai rata-rata IDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu ditingkatkan nilai semua aspek pada IKS, IKE dan IKEkologi.

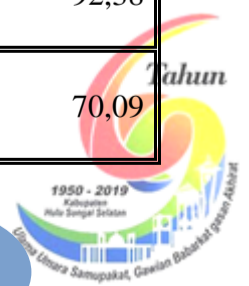
Berdasarkan evaluasi pencapaian IDM pada masing-masing komponen yang masih rendah pada aspek ketahanan Ekonomi rata-rata 0,5609 Sedangkan pada aspek ketahanan sosial dan ketahanan ekologi masing-masing 0,7502 dan 0,6421. Adapun faktor yang menjadi penunjang pencapaian IDM, sebagai berikut :

- a. Pemerintahan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang menggunakan IDM sebagai salah satu acuan dalam penyusunan kegiatan dalam APBDes.
- b. Adanya dukungan program listas sektor pada SKPD terkait seperti penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan untuk akses masyarakat ke sarana pendidikan, kesehatan maupun pusat ekonomi masyarakat .

Dalam rangka untuk meningkatkan nilai pada aspek-aspek penyusun nilai IDM diperlukan sinergitas program lintas sektor, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lainnya. Namun Pada Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sebagai SKPD utama yang bertanggungjawab dalam pencapaian nilai IDM, pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) program yang terkait langsung dengan upaya peningkata nilai IDM yaitu Program peningkatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi 5 kegitan, dan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, yang terdiri atas 2 Kegiatan.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Desa Membangun (IDM) didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	166.665.000	153.972.400	92,38
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	38.950.000	27.300.000	70,09





Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	479.656.000	450.444.300	93,91
Program Peningkatan Prestasi Dan Pemasarakatan Olahraga	952.296.000	907.831.500	95,33

Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Desa Membangun (IDM) tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaaan

Realisasi kinerja keuangan Program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp153.972.400,00 atau 92,38 % dari anggarannya sebesar Rp166.665.000,00. Realisasi keuangan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaaan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Bimbingan Teknis Pengurus LPM Desa	Rp 31.300.000
Penilaian Gotong Royong Masyarakat	Rp 59.275.000
Penilaian Inovasi Teknologi Tepat Guna	Rp 20.400.000
Penilaian Posyandu	Rp 47.090.000
Bimbingan Teknis RT/RW	Rp 8.600.000
Jumlah	Rp 166.665.000

Adapun indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan Program Peningkatan pemberdayaan masyarakat yaitu Persentase Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif. Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, LKD adalah mitra Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat 1.627 LKD terdiri atas jenis LKD yaitu : 148 LPM Desa/Kel, 148 PKK Desa/Kel, 1.030 RT/RK, 296 Posyandu serta 5 Lembaga Adat.

LKD yang Aktif, yaitu jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki sekretariat yang tetap
- b. Memiliki legalitas, yaitu ditetapkan dengan Keputusan Kades
- c. Berpartisipasi ikut secara aktif dalam forum Musrenbang di desa





- d. Aktif terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa
- e. Aktif menggerakkan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi LKD yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2019 terdapat 1.202 LKD Aktif. Dengan demikian persentase LKD Aktif pada tahun 2019, yaitu :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase LKD Aktif} &= \frac{\text{Jumlah LKD Aktif}}{\text{Jumlah LKD se Kab.HSS}} \\
 &= \frac{1.202}{1.627} \\
 &= 73,87 \%
 \end{aligned}$$

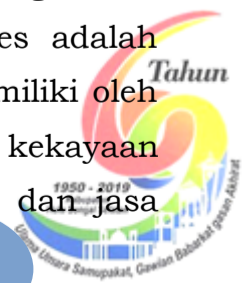
Dengan semakin besarnya Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif, maka upaya menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat semakin besar pula sehingga berkontribusi dalam meningkatkan nilai IDM dari indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan ekologi.

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Realisasi kinerja keuangan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp.27.300.000,00 atau 70,09 % dari anggarannya sebesar Rp.38.950.000,00 Realisasi keuangan Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Workshop Kemitraaan Bumdes	Rp	24.520.000
Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp	14.430.000
Jumlah	Rp	38.950.000

Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan untuk mengukur keberhasilan program dengan indikator persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang. Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan jasa





usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Upaya pembentukan BUMDes melalui fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilaksanakan sehingga pada tahun 2018 ini semua Desa sudah memiliki BUMDesa. Upaya selanjutnya yaitu membina BUMDes yang sudah terbentuk tersebut sehingga tetap eksis dan berkembang. BUMDes dinyatakan berkembang jika memenuhi kriteria, sebagai berikut :

- a. Memiliki minimal 2 (dua) unit usaha yang produktif
- b. Memberi kontribusi ke PADes minimal 10 % dari penyertaan modal per tahun.
- c. Memberi kontribusi minimal 50 % untuk Rumah Tangga Miskin di Desa tersebut.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas BUMDes-BUMDes yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pada tahun 2019 terdapat 20 BUMDes yang memenuhi kriteria sebagai BUMDes yang berkembang, yaitu :

- 1). BUMDes “Bhakti” Desa Gambah Dalam Barat
- 2). BUMDes “ Al Karomah” Desa Sungai Mandala
- 3). BUMDes “ Antaludin Makmur Desa Madang
- 4). BUMDes “Oasis” Desa panjampang Bahagia
- 5). BUMDes “Sasain Maju” Desa Hamak
- 6). BUMDes “ Laris Manis” Desa Gambah Luar Muka
- 7). BUMDes “ Surya Mitra sejati” Desa Muning Baru
- 8). BUMDes “ Serumpun” Desa Mawangi
- 9). BUMDes “ Berkah Bersama” Desa Sungai raya Selatan
- 10). BUMDes “ Sehati” Desa Hulu Banyu
- 11). BUMDes “ Tambak Rejeki Sejahtera” Desa Tambak Bitin
- 12). BUMDes “ Serumpun Bambu” Desa Durian Rabung
- 13). BUMDes “ Berkat sekumpul” Desa Amawang Kiri
- 14). BUMDes “ Berkah” Desa Amawang Kanan
- 15). BUMDes “ Karya Bersama” Desa Muning Dalam
- 16). BUMDes “ Jumjung Buih ” Desa Banua Hanyar
- 17). BUMDes “ Rejeki Bersama” Desa Angkinang
- 18). BUMDes “ Madani kapuh” Desa Kapuh
- 19). BUMDes “ Karya Mandiri” Desa Mandiri
- 20). BUMDes “ Anugerah Lestari” Desa Bajayau Lama

Keberadaan BUMDes ini sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan nilai IDM dari komponen nilai indeks ketahanan





ekonomi. Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas PMD dalam meningkatkan jumlah BUMDes yang berkembang yaitu dengan memaksimalkan peran pendamping P3MD untuk lebih intensif dalam pembinaan BUMDes.

3. Program Peningkatan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan sebesar Rp. 447.199.100,00 atau 93.23 % dari anggarannya sebesar Rp. 479.656.000,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Partisipasi dan Pemberdayaan Pemuda	Rp	34.945..000,00
Pembinaan Paskibra Kabupaten	Rp	412.254.100,00
JUMLAH	Rp	447.199.100,00

4. Program Peningkatan Prestasi Dan Pemasarakatan Olahraga

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Prestasi dan Permasyarakatan Olahraga sebesar Rp. 910.690.750,00 atau 96.41 % dari anggarannya sebesar Rp. 952.296.000,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Partisipasi pada Pekan Olahraga Pelajar (POPDA)	Rp	846.606.500,00
Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Motor Trail	Rp	64.084.250,00
JUMLAH	Rp	910.690.750,00

SASARAN 2; MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN RESPONSIF GENDER DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada **Tujuan I : Meningkatkan Tahun Sumber Daya Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin**





Pembangunan Berkelanjutan ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,27	89,10	98,70
Persentase desa/ kelurahan layak anak	2,03	2,03	100,00
Rata-rata Capaian			99,35%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak adalah Tidak Tercapai atau tercapai 99,35%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI			TARGET RPJMD	
	2017	2018	2019	2019	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,07	89,96	89,10	90,27	91,27
Persentase desa/ kelurahan layak anak	0,68	0,68	2,03	2,03	7,43

Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,27	89,10	98,70

Pada indikator kinerja sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari target 90,27, terealisasi 89,10, yang berarti Tidak Tercapai atau sebesar 98,70%.

IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati 100, maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

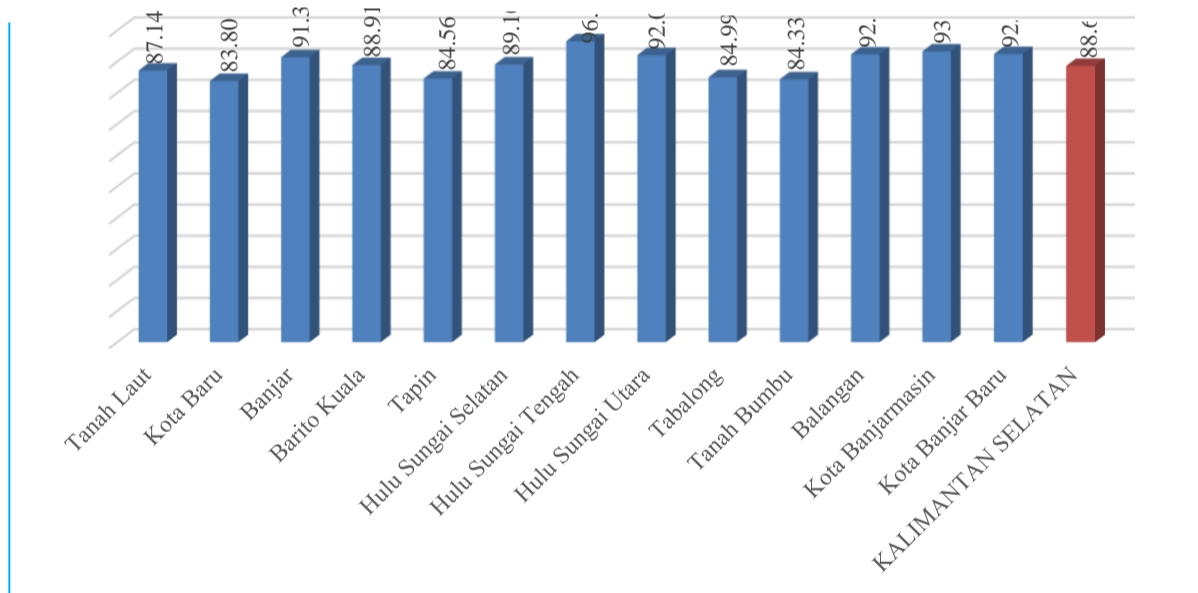




Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) (KPPPA dan BPS, 2018).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kalimantan Selatan pada tahun 2018 sudah mencapai 88,61 poin, meningkat 0,01 poin dibandingkan capaian IPG pada tahun 2017. Peningkatan IPG tersebut menunjukkan pembangunan perempuan memiliki akselerasi yang lebih cepat dibandingkan pembangunan laki-laki terkait pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Meskipun, capaian IPG Kalimantan Selatan mengalami peningkatan, tetapi masih ditemukan kesenjangan antar kabupaten/kota. Dilihat dari Gambar 8.1, terdapat 5 kabupaten yang pencapaian IPG masih di bawah rata-rata pencapaian IPG di tingkat provinsi, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kota Baru, Tapin, Tabalong, dan Tanah Bumbu.



Gambar 8.1. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2018

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

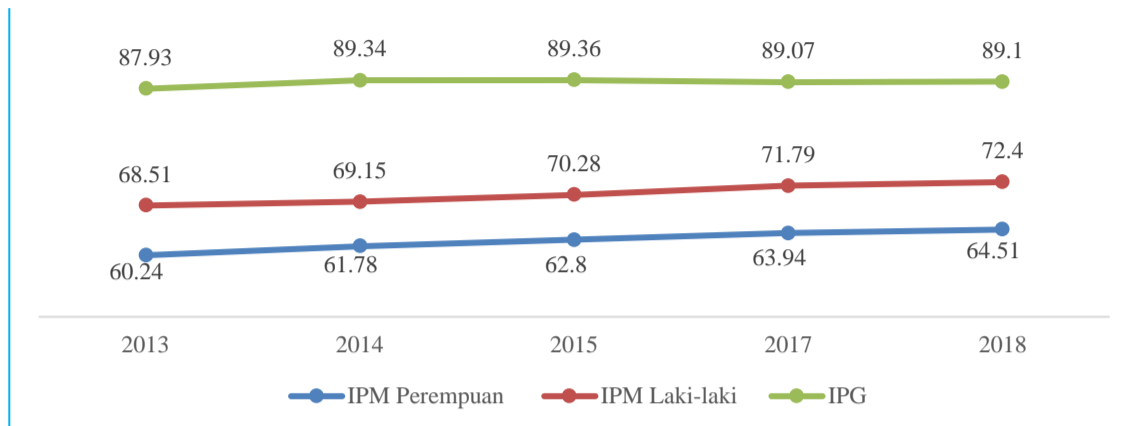
Capaian IPG tertinggi untuk tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2018 adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan IPG sebesar 96,52 poin. Sementara itu, IPG terendah yaitu Kabupaten Kota





Baru dengan IPG sebesar 83,80 poin. Capaian IPG Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada peringkat 7 dengan IPG sebesar 89,10 poin.

Gambar menunjukkan perkembangan IPM laki-laki, IPM perempuan, dan IPG Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 2013 – 2018.



Gambar . Tren Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2013 – 2018
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Gambar 8.2 dapat dilihat bahwa IPM laki-laki dan IPM perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sama-sama mengalami peningkatan selama periode 2013 – 2018. Secara umum kualitas perempuan masih tertinggal daripada laki-laki. Selama periode 2013 - 2015, dari sisi kecepatannya, capaian pembangunan perempuan memiliki akselerasi yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi pendorong peningkatan IPG selama periode 2013 - 2015. Dengan demikian, peningkatan IPG selama periode tersebut menunjukkan bahwa program-program pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender telah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan Indonesia.

IPG Kabupaten Hulu Sungai Selatan sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 0,29 poin. Hal ini disebabkan capaian pembangunan laki-laki memiliki akselerasi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Capaian IPG mengalami kenaikan kembali selama setahun terakhir. Pada tahun 2018, capaian IPG sebesar 89,1 yang mana meningkat 0,03 poin dibanding tahun 2017. Meskipun capaian IPG mengalami peningkatan, besar kenaikannya dapat dibilang tidak terlalu signifikan. Dengan demikian, upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender perlu dimaksimalkan lagi.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) didukung oleh program sebagai berikut :





Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	38.497.500	32.397.500	84,15
Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	10.045.000	7.650.000	76,16

Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Realisasi Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan adalah sebesar Rp. 32.397.500,00 atau 84,15% dari anggarannya sebesar Rp. 38.497.500,00, realisasi tersebut merupakan realisasi dari kegiatan :

Kegiatan	Rp.	Realisasi
Pelaksanaan Manajemen PUG di tingkat Daerah	Rp	32.397.500,00
Jumlah		32.397.500,00

Pada program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan mempunyai indikator kinerja program Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender yang mana pada tahun 2019 mempunyai target 36,84 % dan sudah direalisasikan sebesar 36,84% dengan capaian 100% pada triwulan II. Adapun SKPD yang sudah menerapkan anggaran yang responsif gender tersebut yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, dan Dinas Sosial. Dalam menerapkan anggaran yang responsif gender SKPD dipantau oleh 4 driver Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu Inspektorat, Bakeuda, Bappelitbangda dan Dinas PPKBPPPA.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor capaian indikator sebagai berikut:

Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan Tahun 2019
--------------------	-------------------	--------	-------------------------------





		Satuan	Tahun 2019	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	Persen	36,84	0	36,84	0	0
Kegiatan Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	Jumlah SKPD yang perencanaan dan penganggaran responsif gender	SKPD	10	0	10	0	0

2. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan

Realisasi Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan adalah sebesar Rp. 7.650.000,00 atau 76,16% dari anggarannya sebesar Rp. 10.045.000,00, realisasi tersebut merupakan realisasi dari kegiatan :

Kegiatan	Rp.	Realisasi
Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	Rp	7.650.000,00
Jumlah		7.650.000,00

Untuk Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan mempunyai indikator kinerja program yaitu Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif yang mana pada tahun 2019 ditargetkan 8,11% dan sudah direalisasikan 8,11 % dengan capaian 100%. Adapun organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif pada tahun 2019 yaitu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab. HSS, Gabungan Isteri Wakil Rakyat (GATRIWARA) Kab. HSS, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. HSS, Muslimat NU Kab. HSS, Salimah Kab. HSS dan Katalia Kab. HSS. Untuk mendukung indikator tersebut juga dilaksanakan sosialisasi perlindungan perempuan dalam rumah tangga yang dilaksanakan di kecamatan Loksado.

Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Triwulan Tahun 2019			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	Persen	8,11	0	5,95	8,11	8,11



Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Triwulan Tahun 2019			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang dibina	organisasi	6	0	3	6	0

Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Persentase desa/ kelurahan layak anak	2,03	2,03	100,00

Pada indikator kinerja sasaran Persentase desa/ kelurahan layak anak dari target 2,03, terealisasi 2,03, yang berarti Tercapai atau sebesar 100%.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase desa/ kelurahan layak anak didukung oleh program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase desa/ kelurahan layak anak			
Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	92.724.300	82.294.300	88,75
Program Peningkatan Perlindungan Anak	23.966.000	20.786.590	86,73

Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase desa/ kelurahan layak anak tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak





Realisasi Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak adalah sebesar Rp. 89.494.300,00 atau 96,52% dari anggarannya sebesar Rp. 92.724.300,00, realisasi tersebut merupakan realisasi dari kegiatan :

Kegiatan	Rp.	Realisasi
Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Rp	89.494.300,00
Jumlah		89.494.300,00

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor capaian indikator sebagai berikut:

Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Triwulan Tahun 2019			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis kluster	Persen	27,78	5,56	11,11	18,52	27,78
Kegiatan Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah indikator yang terpenuhi	kluster	15	3	3	4	5

2. Program Peningkatan Perlindungan Anak

Realisasi Program Peningkatan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp. 20.786.590,00 atau 86,73% dari total anggaran sebesar Rp.23.966.000,00, realisasi tersebut merupakan realisasi dari kegiatan :

Kegiatan	Rp.	Realisasi
Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Rp	20.786.590,00
Jumlah		20.786.590,00

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor capaian indikator sebagai berikut:

Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Triwulan Tahun 2019			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Pelindungan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Jumlah PATBM desa yang aktif	buah	2	0	1	0	2



SASARAN 3; MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada **Tujuan I : Meningkatkan Sumber Daya Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin Pembangunan Berkelanjutan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Indeks kualitas lingkungan hidup	55,08	55,96	101,60
Rata-rata Capaian			101,60%

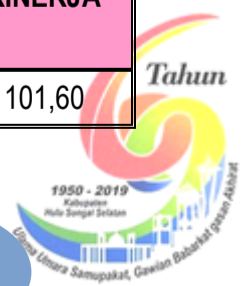
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah Tercapai atau tercapai 101,60%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI			TARGET RPJMD	
	2017	2018	2019	2019	2023
Indeks kualitas lingkungan hidup	54,55	54,94	55,96	55,08	55,77

Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Indeks kualitas lingkungan hidup	55,08	55,96	101,60



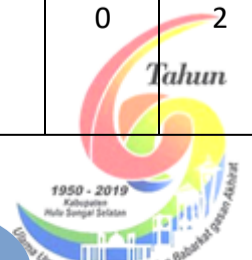


Pada indikator kinerja sasaran Indeks kualitas lingkungan hidup dari target 55,08, terealisasi 55,96, yang berarti Tercapai atau sebesar 101,60%.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor capaian program/kegiatan dan indikator sebagai berikut:

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	9	10	11	12
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase indeks kualitas udara titik pantau yang memenuhi standar	Persen	85	85	85	85	85
	Persentase indeks kualitas air titik pantau yang memenuhi standar	Persen	51	51	51	51	51
	Persentase tutupan lahan pada areal bekas tambang	Persen	35,70	35,34	35,34	35,70	35,70
Kegiatan Pengadaan alat dan bahan laboratorium untuk pengujian kualitas air dan kualitas udara	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	Persen	50	40	40	40	50

Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	Dok	2	0	0	0	1
Kegiatan Peningkatan Kualitas Lahan Keanekaragaman Hayati	Lahan kehati yang memenuhi aspek kualitas	Aspek	2	0	0	0	2
Kegiatan Pelaksanaan Pemenuhan Kriteria Sekolah adiwiyata	Pemberdayaan terhadap perlindungan dan konservasi lingkungan	Sekolah	10	0	0	5	10
Kegiatan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kampung Iklim (Proklim)	Jumlah Kampung Iklim (Proklim) yang dibentuk dan dikembangkan	Locus	4	0	0	0	4
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui Aksi Kebersihan susur sungai Amandit	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan melalui Aksi Kebersihan susur sungai Amandit	Kelompok	2	0	0	0	2

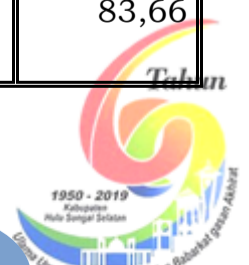




Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	9	10	11	12
Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan sampah yang dikelola secara Control landfill	Persen	52,53	53,78	53,36	52,95	52,53
	Persentase cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R	Persen	21	19,27	19,90	20,52	21
	Persentase luasan layanan persampahan	Persen	72,60	66,77	68,71	70,66	72,60
Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah tonase sampah di TPA yang dikelola secara controlled landfill	Ton/Th	17,842	4,460	8,92	13,38	17,842
Kegiatan Pengembangan Teknologi Persampahan	Jumlah tonase sampah yang diolah secara 3R	Ton/Th	7,133	1,783	3,566	5,349	7,133
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah luas layanan persampahan (Km2)	Km2	106	95	95	100	106
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase tingkat layanan persampahan	Persen	100	0	45	65	100

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks kualitas lingkungan hidup didukung oleh program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran : Indeks kualitas lingkungan hidup			
Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.214.019.200	659.740.000	54,34
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.141.558.000	5.974.638.081	83,66





Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks kualitas lingkungan hidup tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Realisasi kinerja keuangan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tahun 2019 adalah sebesar Rp.636.655.000,00 atau 52,44% dari anggarannya sebesar Rp.1.214.019.200,00.

Realisasi keuangan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tahun 2019 tersebut merupakan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan alat dan bahan laboratorium untuk pengujian kualitas air dan udara	Rp	123.695.000,00
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp	169.650.000,00
Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung untuk RPPLH	Rp	0,00
Peningkatan Kualitas Lahan Keanekaragaman Hayati	Rp	51.215.000,00
Pelaksanaan Pemenuhan Kriteria Sekolah Adiwiyata	Rp	53.085.000,00
Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kampung Iklim (Proklim)	Rp	180.850.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Aksi Kebersihan dan Aksi Susur Sungai Amandit	Rp	58.160.000,00
Jumlah	Rp	636.655.000,00

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Realisasi kinerja keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2019 adalah sebesar Rp5.966.006.581,00 atau 83,54% dari anggarannya sebesar Rp7.141.558.000,00.

Realisasi keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2019 tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan serta belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :





Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Rp 479.489.750,00
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Rp 2.537.456.271,00
Pengembangan Teknologi Persampahan	Rp 2.135.280.310,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Rp 51.964.450,00
Jumlah	Rp 5.966.006.581,00



MISI 5	MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM BINGKAI KEHIDUPAN YANG AGAMIS
-------------------	---

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut;

TUJUAN 1	MENINGKATKAN SUMBER DAYA DAERAH DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
---------------------	---

Capaian Tujuan pertama pada Misi Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis yakni **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi”**

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 4 (empat) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1; MENINGKATNYA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
--

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada **Tujuan I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang**





berkualitas berbasis teknologi informasi ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Predikat AKIP	BB (70,01)	BB (76,23)	108,88
Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,51)	B (3,97)	88,03
Kualitas aspek perencanaan	60,28	56,81	94,24
Rata-rata Capaian			97,05%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik adalah Tidak Tercapai atau tercapai 97,05%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI			TARGET RPJMD	
	2017	2018	2019	2019	2023
Predikat AKIP	BB (70,03)	BB (75,18)	BB (76,23)	BB (70,01)	A (80,01)
Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	B	B	B (3,97)	A (4,51)	A (4,51)
Kualitas aspek perencanaan	53,33	56,81	56,81	60,28	67,09

Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Predikat AKIP	BB (70,01)	BB (76,23)	108,88

Pada indikator kinerja sasaran Predikat AKIP dari target BB (70,01), terealisasi BB (76,23), yang berarti Tercapai atau sebesar 108,88%.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai berikut :





Komponen yang Dinilai		Bobot	2019
			Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,44
b.	Pengukuran Kinerja	25	19,96
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,49
d.	Evaluasi Kinerja	10	7,14
e.	Capaian Kinerja	20	12,20
Nilai Hasil Evaluasi		100	76,23
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB (Sangat Baik)

Sumber data. Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 KemenPAN RB Nomor B/311/AA.05/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Adapun perbandingan capaian indikator Predikat AKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2014 s.d 2019 adalah sebagai berikut :

Komponen yang Dinilai	Bobot	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30	19,42	19,42	22,96	25,36	24,36	25,44
b. Pengukuran Kinerja	25	10,39	12,35	17,23	19,15	18,89	19,96
c. Pelaporan Kinerja	15	7,87	8,77	9,90	11,43	10,66	11,49
d. Evaluasi Kinerja	10	3,98	5,29	5,51	7,08	6,04	7,14
e. Capaian Kinerja	20	11,73	14,49	9,83	12,16	10,08	12,20
Nilai Hasil Evaluasi	100	52,98	60,32	65,43	70,03	75,18	76,23
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC (Cukup)	B (Baik)	B (Baik)	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

Capaian kinerja indikator Predikat AKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2012 s.d 2019 adalah sebagai berikut :

Ket	Nilai SAKIP 2012	Nilai SAKIP 2013	Nilai SAKIP 2014	Nilai SAKIP 2015	Nilai SAKIP 2016	Nilai SAKIP 2017	Nilai SAKIP 2018	Nilai SAKIP 2019	Capaian Kinerja
Nilai Hasil Evaluasi	51,43	50,14	52,98	60,32	65,43	70,03	75,18	76,23	Naik
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	Naik

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Target RPJMD	
									2019	2023
Predikat Akuntabilitas	CC	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	BB	A



Kinerja										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Apabila dilihat pada tabel diatas, capaian indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2012 s.d tahun 2019 terus naik, dan pencapaian hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 naik 1,05 dibandingkan dengan nilai hasil evaluasi di tahun 2018.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dan dalam rangka lebih mengefektifkan manajemen kinerja, rekomendasi KemenPAN RB yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Mereviu kembali perencanaan yang ada di tingkat perangkat daerah, khususnya sasaran dan indikator kinerja untuk lebih berorientasi hasil dan terukur, relevan dan cukup sehingga pencapaian kinerja dapat memberikan dampak manfaat bagi masyarakat.
2. Menyempurnakan penjabaran kinerja dari level pemerintah kabupaten sampai ke individu dengan memperhatikan kerangka berpikir logis sehingga membentuk keselarasan dan keterkaitan kinerja antar jenjang organisasi dan juga kontribusi kinerja secara berjenjang sesuai levelnya dalam pencapaian sasaan pembangunan daerah.
3. Mereviu peta proses bisnis dengan mengacu pada hasil pohon kinerja, sehingga dapat memberikan gambaran keterkaitan proses dalam pencapaian kinerja pada berbagai tingkatan organisasi sampai ke pelaksana paling bawah. Proses bisnis tersebut selanjutnya dijadikan acuan untuk menyeleraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam mencapai kinerja pemerintah daerah.
4. Mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemkab. Hulu Sungai Selatan dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan menggambarkan tolok ukur keberhasilan kinerja individu serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.
5. Mengoptimalkan keterlibatan Bappelitbangda, Organisasi dan Inspektorat dalam pengelolaan SAKIP, agar keberlangsungan penerapan SAKIP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi lebih berkualitas.
6. Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan dalam penerapan manajemen kinerja melalui pengintegrasian sistem perencanaan kinerja dan penganggaran serta mendorong adanya mekanisme monitoring





pengukuran kinerja organisasi dan individu yang dilakukan secara berkala sehingga dapat memicu perbaikan kinerja dan juga sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

7. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada pohon kinerja, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk prioritas pembangunan dan memiliki daya ungkit yang efektif dalam pencapaian kinerja serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
8. Meningkatkan kualitas evaluasi internal akuntabilitas, agar hasil evaluasi yang dilakukan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan penerapan SAKIP yang lebih efektif. Perlu dilakukan monitoring terhadap tindaklanjut saran atau rekomendasi guna mengetahui sejauh mana hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk perbaikan.

Menindaklanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor B/311/AA.05/2019 Tanggal 30 Desember 2019 yang diterima oleh Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan pada tanggal 27 Januari 2020 di Bali, TIM SAKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan rapat untuk mengambil langkah strategis terhadap rekomendasi tersebut, salah satu *output* hasil rapat adalah melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 065/171/ORPAD Tanggal 05 Februari 2020 meminta kepada Kepala Bappelitbangda Kab. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Inspektur Kab. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala BKD, Diklat Kab. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Kominfo Kab. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda Kab. Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar :

1. Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan segera mereviu kembali perencanaan yang ada di tingkat perangkat daerah, khususnya sasaran dan indikator kinerja untuk lebih berorientasi hasil dan terukur, relevan dan cukup, sehingga pencapaian kinerja dapat memberikan dampak manfaat bagi masyarakat.
2. Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan segera menyempurnakan penjabaran kinerja dari level pemerintah kabupaten sampai ke individu dengan memperhatikan kerangka berpikir logis sehingga membentuk keselarasan dan keterkaitan kinerja antar jenjang organisasi dan juga





kontribusi kinerja secara berjenjang sesuai levelnya dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

3. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda Kab. Hulu Sungai Selatan segera mereviu Peta Proses Bisnis dengan mengacu pada hasil Pohon Kinerja, sehingga dapat memberikan gambaran keterkaitan proses dalam pencapaian kinerja pada berbagai tingkatan organisasi sampai ke pelaksana paling bawah. Proses Bisnis tersebut selanjutnya dijadikan acuan untuk menyeleraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam mencapai kinerja pemerintah daerah.
4. BKD, Diklat Kab. Hulu Sungai Selatan segera mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemkab. Hulu Sungai Selatan dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan menggambarkan tolok ukur keberhasilan kinerja individu serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.
5. Mengoptimalkan keterlibatan Bappelitbangda, Organisasi dan Inspektorat dalam pengelolaan SAKIP, agar keberlangsungan penerapan SAKIP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi lebih berkualitas.
6. Bappelitbangda, Inspektorat dan Bagian Organisasi segera berupaya mendorong peningkatan komitmen seluruh Pimpinan SKPD dalam penerapan manajemen kinerja melalui pengintegrasian sistem perencanaan kinerja dan penganggaran serta mendorong adanya mekanisme monitoring pengukuran kinerja organisasi dan individu yang dilakukan secara berkala sehingga dapat memicu perbaikan kinerja dan juga sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
7. Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan segera mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada pohon kinerja, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk prioritas pembangunan dan memiliki daya ungkit yang efektif dalam pencapaian kinerja serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
8. Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan segera meningkatkan kualitas evaluasi internal akuntabilitas, agar hasil evaluasi yang dilakukan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan penerapan SAKIP yang lebih efektif. Perlu dilakukan monitoring terhadap tindaklanjut saran atau rekomendasi guna mengetahui sejauh mana hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk perbaikan.





9. Dinas Kominfo Kab. Hulu Sungai Selatan segera menyiapkan aplikasi yang menunjang penerapan manajemen kinerja/ SAKIP yang lebih berkualitas.

Selain langkah strategis tersebut di atas, Langkah nyata membangun SAKIP kabupaten hulu sungai selatan adalah:

1. Memperbaiki rumusan tujuan/sasaran yang dilengkapi dengan ukuran/indikator kinerja yang jelas dan berorientasi hasil (*outcome*);
2. Memastikan *cascading* kinerja telah ditetapkan sampai ke level organisasi terkecil dengan memanfaatkan logic model yang berfokus pada pencapaian tujuan/sasaran sehingga terwujud perencanaan pembangunan yang terintegrasi (*Integrated Development Plan*);
3. Dilakukan refocusing atas program dan kegiatan yang akan mendukung tercapainya tujuan/sasaran secara efektif dan efisien;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) secara berkala sehingga terwujud pembangunan berorientasi hasil yang berkesinambungan.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Predikat AKIP didukung oleh program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran : Predikat AKIP			
Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	309.081.100	207.946.516	67,28
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.136.503.900	727.287.050	63,99
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	15.865.000	315.250	1,99
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			#DIV/0!

Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Predikat AKIP tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:





1. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah

Realisasi kinerja keuangan Program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun 2019

Realisasi kinerja Keuangan Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dan Instansi Pemerintah Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 207.946.516,00 atau 67,28 % dari anggarannya sebesar Rp. 309.081.100,00.

Realisasi keuangan Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dan Instansi Pemerintah Tahun 2019 tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dan Instansi Pemerintah			
a.	Kegiatan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	309.081.100	207.946.516	67,28
	JUMLAH	309.081.100	207.946.516	67,28

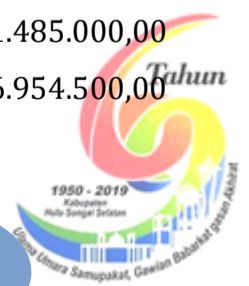
2. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Realisasi kinerja keuangan Program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun 2019

Realiasi kinerja keuangan Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 adalah sebesar Rp.737.270.450,00 atau 63,99% dari anggarannya sebesar Rp1.136.503.900,00.

Realisasi keuangan Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Rp368.832.550,00
- Kegiatan Penyusunan LKPJ dan LPPD Kepala Daerah Rp131.485.000,00
- Kegiatan Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Rp226.954.500,00





Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

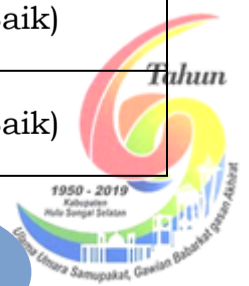
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,51)	B (3,97)	88,03

Pada indikator kinerja sasaran Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) dari target A (4,51), terealisasi B (3,97), yang berarti Tidak Tercapai atau sebesar 88,03%.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Nomor B/3/PP.00.02/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019, telah dilakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap 3 (tiga) SKPD penyelenggara pelayanan publik yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan. Aspek dalam Evaluasi Pelayanan Publik meliputi : Kebijakan Pelayanan; Profesionalisme SDM; Sarana dan Prasarana; Sistem Informasi Pelayanan Publik; Konsultasi dan Pengaduan; serta Inovasi serta tindak lanjut hasil rekomendasi tahun 2018.

Berikut hasil Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

No	Unit Penyelenggara	Nilai Indeks	Kategori
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,1	A- (Sangat Baik)
2	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	3,98	B (Baik)
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,83	B (Baik)





	Nilai Rata-Rata Pemda	3,97	B (Baik)
--	------------------------------	-------------	-----------------

Berikut tindak lanjut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD unit penyelenggara tersebut di atas.





DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. HULU SUNGAI SELATAN

No	Aspek Pengamatan dan Penilaian	Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator	Rencana Aksi dan Tindak Lanjut SKPD terhadap Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator (berdasarkan dari SKPD terkait)
1.	KEBIJAKAN PUBLIK (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Pelayanan disarankan dipublikasikan di ruang layanan - Disarankan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan laporan SKM dilaksanakan setiap bulan dan hasilnya dilaporkan kepada KemenPAN RB 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Sudah ditindaklanjuti.</u> Standar Pelayanan sudah dipublikasikan di ruang layanan dalam bentuk <i>Standing Banner</i> dan ditampilkan pada layar TV, serta diupload pada aplikasi SIPP sebagai <i>update</i> data dukung - Sesuai arahan dan saran dari Tim Evaluator SIPP pada DPMPSTSP untuk SKM dilaksanakan setiap bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Kementerian PANRB, akan ditindak lanjuti mulai bulan Oktober 2019.
2.	PROFESIONALISME SDM (Kompetensi Pegawai, Aturan Perilaku dan Kode Etik, Budaya Pelayanan)	<ul style="list-style-type: none"> - Aturan Kode Etik dan budaya layanan masih belum memuat klausul tentang hak dan kewajiban, larangan, sanksi dan penghargaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Sudah ditindaklanjuti.</u> Aturan Kode Etik telah ditetapkan oleh Kepala SKPD yang memuat klausul tentang hak dan kewajiban, larangan, sanksi dan penghargaan dan di publikasikan di ruang layanan serta diupload pada aplikasi SIPP sebagai <i>update</i> data dukung.
3.	SARANA PRASARANA (Tempat Parkir, Ruang Tunggu, Toilet Khusus, Sarana Prasarana bagi Pengguna Layanan Berkebutuhan Khusus, Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Laktasi disarankan untuk dilengkapi dengan <i>Cooler Box</i>/kulkas untuk penyimpanan ASI. 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Sudah ditindaklanjuti.</u> <i>Cooler Box</i>/kulkas untuk penyimpanan ASI sudah ditempatkan di Ruang Laktasi serta diupload pada aplikasi SIPP sebagai <i>update</i> data dukung.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. HULU SUNGAI SELATAN

No	Aspek Pengamatan dan Penilaian	Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator	Rencana Aksi dan Tindak Lanjut SKPD terhadap Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator (berdasarkan dari SKPD terkait)
	Laktasi, Arena Bermain Anak, Kantin/Fotocopy)		
4.	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (Sistem Informasi Elektronik dan Non Elektronik, Pemutakhiran Data)		
5.	KONSULTASI DAN PENGADUAN (Sarana Konsultasi dan Pengaduan yang digunakan)		
6.	INOVASI (Inovasi yang dimiliki Unit Layanan)		<ul style="list-style-type: none"> - Inovasi yang telah dijalankan minimal 1 tahun akan diikutsertakan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 (SINOVIK). - Judul inovasi yang akan disertakan dalam Sinovik 2020 : <ul style="list-style-type: none"> ➤ SI USAI SAJA (Surat Izin Usaha Selesai Satu Jam) ➤ SIPPOLIN (Sistem Pelayanan Perizinan Online)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. HULU SUNGAI SELATAN**

No	Aspek Pengamatan dan Penilaian	Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator	Rencana Aksi dan Tindak Lanjut SKPD terhadap Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator (berdasarkan dari SKPD terkait)
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ PELARI SIPA (Pelayanan Perizinan Sistem Paket) ➤ GO-ZIN (Gojek Izin/Antar Izin Selesai)

RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN

No	Aspek Pengamatan dan Penilaian	Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator	Rencana Aksi dan Tindak Lanjut SKPD terhadap Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator (berdasarkan dari SKPD terkait)
1.	KEBIJAKAN PUBLIK (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat)		<ul style="list-style-type: none"> - Masukan dan pengaduan dari masyarakat akan terus dilibatkan dalam penyusunan Standar Pelayanan - Terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk meningkatnya Nilai IKM
2.	PROFESIONALISME SDM (Kompetensi Pegawai, Aturan Perilaku dan Kode Etik, Budaya Pelayanan)		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi pegawai melalui Diklat - Terus memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan akan terus menindak tegas bagi pegawai yang melakukan pelanggaran, - Kedisiplinan dan Kinerja pegawai akan terus ditingkatkan sesuai dengan motto RSUD "Pelayanan yang Memuaskan"



RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN

No	Aspek Pengamatan dan Penilaian	Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator	Rencana Aksi dan Tindak Lanjut SKPD terhadap Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator (berdasarkan dari SKPD terkait)
			Selalu Kami Utamakan”.
3.	SARANA PRASARANA (Tempat Parkir, Ruang Tunggu, Toilet Khusus, Sarana Prasarana bagi Pengguna Layanan Berkebutuhan Khusus, Ruang Laktasi, Arena Bermain Anak, Kantin/Fotocopy)	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Rawat Inap Anak masih kurang representatif karena tidak di imbangi fasilitas yang layak (gedung, ranjang, toilet, lantai, plafon, taman, lahan parkir) - Perlu disiapkan gedung yang layak pada Ruangan Rawat Inap Anak beserta fasilitas pendukung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Gedung, lantai, flapon, dan penambahan fasilitas lainnya pada Rawat Inap Anak sudah dianggarkan pada RBA Tahun 2020.
4.	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (Sistem Informasi Elektronik dan Non Elektronik, Pemutakhiran Data)		
5.	KONSULTASI DAN PENGADUAN (Sarana Konsultasi dan Pengaduan)		





RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN

No	Aspek Pengamatan dan Penilaian	Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator	Rencana Aksi dan Tindak Lanjut SKPD terhadap Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator (berdasarkan dari SKPD terkait)
	yang digunakan)		
6.	INOVASI (Inovasi yang dimiliki Unit Layanan)	← →	- Akan terus melakukan penambahan inovasi untuk perbaikan layanan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HULU SUNGAI SELATAN





No	Aspek	Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator	Rencana Aksi dan Tindak Lanjut SKPD terhadap Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator (berdasarkan dari SKPD terkait)
1.	KEBIJAKAN PUBLIK (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat)	- Standar Pelayanan (SP) disarankan memisahkan menjadi 2 kategori <i>service delivery</i> dan <i>manufacturing</i> yang mengacu pada PermenPAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.	- <u>Sudah ditindaklanjuti</u> . Standar Pelayanan sudah dipisahkan menjadi 2 kategori <i>service delivery</i> dan <i>manufacturing</i> yang mengacu pada PermenPAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, serta diupload pada media elektronik dan pada aplikasi SIPP sebagai <i>update</i> data dukung.
2.	PROFESIONALISME SDM (Kompetensi Pegawai, Aturan Perilaku dan Kode Etik, Budaya Pelayanan)	- Aturan Kode Etik dan Kode Etik Pelaksana Layanan belum memuat hak dan kewajiban serta larangan. - Disarankan Kode Etik memuat klausul tentang hak, kewajiban dan larangan dan dibuatkan dalam bentuk buku saku.	- <u>Sudah ditindaklanjuti</u> . Aturan Kode Etik telah ditetapkan oleh Kepala SKPD yang memuat klausul tentang hak dan kewajiban, larangan, sanksi dan penghargaan dan di publikasikan di ruang layanan serta diupload pada aplikasi SIPP sebagai <i>update</i> data dukung.
3.	SARANA PRASARANA (Tempat Parkir, Ruang Tunggu, Toilet Khusus, Sarana Prasarana bagi Pengguna Layanan Berkebutuhan Khusus, Ruang Laktasi, Arena Bermain Anak,	- Belum ada pilihan kloset duduk atau jongkok. - Ruang Laktasi sebaiknya tidak menyatu dengan ruang kerja, selain itu disarankan dalam Ruang Laktasi dalam kondisi	- Dianggarkan pada anggaran tahun berikutnya - Penataan ruang akan di anggarkan pada APBD 2020 - <i>Cooler Box</i> /kulkas untuk penyimpanan ASI sudah ditempatkan di Ruang Laktasi serta diupload pada aplikasi SIPP sebagai <i>update</i> data dukung.



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HULU SUNGAI SELATAN

No	Aspek	Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator	Rencana Aksi dan Tindak Lanjut SKPD terhadap Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator (berdasarkan dari SKPD terkait)
	Kantin/Fotocopy)	bersih dan memiliki <i>Cooler Box</i> /Kulkas	
4.	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (Sistem Informasi Elektronik dan Non Elektronik, Pemutakhiran Data)	- Tampilan <i>website</i> Disdukcapil perlu dioptimalkan lagi dengan menambah fitur yang terkait dengan penilaian kinerja dan pelayanan publik.	- <u>Sudah ditindaklanjuti</u> . Tampilan <i>website</i> Dinas Dukcapil sudah diperbarui dengan menampilkan fitur yang terkait dengan penilaian kinerja dan pelayanan publik serta diupload pada aplikasi SIPP sebagai <i>update</i> data dukung.
		- Pemutakhiran data dan informasi situs disarankan untuk memperbarui pemutakhiran informasi secara berkala.	- pemutakhiran informasi secara berkala akan dilaksanakan dengan memuat foto dan video kegiatan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
5.	KONSULTASI DAN PENGADUAN (Sarana Konsultasi dan Pengaduan yang digunakan)		
6.	INOVASI (Inovasi yang dimiliki)		





DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HULU SUNGAI SELATAN

No	Aspek	Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator	Rencana Aksi dan Tindak Lanjut SKPD terhadap Hasil Rekomendasi dan Pengamatan Lapangan Tim Evaluator (berdasarkan dari SKPD terkait)
	Unit Layanan)		<p>ikutsertakan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 (SINOVIK).</p> <p>- Judul inovasi yang akan disertakan dalam Sinovik 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ PELAYANAN AKTA ONLINE➤ JEMBOL (Pelayanan Jemput Bola)➤ SAHRITUNG (pelayanan satu hari tuntung)➤ TELADAN RATU (tempat layanan daha selatan, daha barat dan daha utara)➤ AKI ARGA (permintaan 1 Akta Kelahiran dapat 3 dokumen)➤ SATUGA (satu layanan dapat tiga)➤ LAKSA (layanan untuk masyarakat loksado)➤ Lahir dapat Akta➤ Bela Sungkawa kirim Akta Kematian➤ LACANA (Layanan Cepat Tanggap Bencana)➤ KIWA (KIA via WA)





Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) didukung oleh program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran : Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)			
Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	241.665.900	151.633.570	62,75
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	151.762.500	145.959.800	96,18
Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medik/Non Medik	17.766.614.637	15.395.305.789	86,65
Prog.Peningkatan Pelayanan Kependudukan	940.795.000	865.843.009	92,03
Program Pelayanan Informasi Data Kependudukan	242.118.000	170.142.000	70,27
Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	167.880.000	147.386.000	87,79
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	956.804.000	880.027.150	91,98

Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Realisasi kinerja Keuangan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 241.665.900,00 atau 62,75 % dari anggarannya sebesar Rp. 151.633.570,00.

Realisasi keuangan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2019 tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
a.	Kegiatan Penataan Prosedur Kerja di Lingkungan Pemkab. HSS	34.794.500	17.305.000	49,73





No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
b.	Kegiatan Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemkab. HSS	28.184.000	16.125.000	57,21
c.	Kegiatan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	178.687.400	118.203.570	66,15
JUMLAH		241.665.900	151.633.570	62,75

2. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Perizinan adalah sebesar Rp. 145.959.800,00 atau 96,17 % dari anggarannya sebesar Rp.151.762.500,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi Penyusunan kebijakan pelayanan publik yang berupa sosialisasi dan peningkatan profesionalisme SDM yang berupa pelatihan *Service Excellent*.

3. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medik/Non Medik

Realisasi Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah sebesar Rp15.395.305.789,00 atau 86,65% dari anggarannya sebesar Rp17.766.614.637,00.

Realisasi keuangan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Peralatan Penunjang Medik/Non Medik tersebut merupakan realisasi modal yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

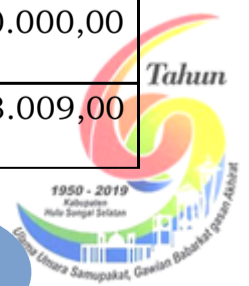
Pengadaan Peralatan Kesehatan	Rp	3.050.048.109,00
Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK)	Rp	12.345.257.680,00
JUMLAH	Rp	15.395.305.789,00

4. Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan

Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan adalah sebesar Rp.865.843.009,00 atau 92,03% dari anggarannya sebesar Rp.940.795.000,00.

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Rp	158.400.000,00
Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Rp	707.443.009,00





JUMLAH	Rp	865.843.009,00
---------------	-----------	-----------------------

5. Program Pelayanan Informasi Data Kependudukan

Realisasi Program Pelayanan Informasi Data Kependudukan adalah sebesar Rp.170.142.000,00 atau 70,27% dari anggarannya sebesar Rp.242.118.000,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Inovasi Pelayanan Publik Dukcapil	Rp	50.850.000,00
Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jaringan SIAK (DAK)	Rp	91.905.000,00
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	Rp	87.387.000,00
JUMLAH	Rp	170.142.000,00

6. Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil

Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil adalah sebesar Rp.147.386.000,00 atau 87,79% dari anggarannya sebesar Rp.167.880.000,00

Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil	Rp	28.600.000,00
Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil (DAK)	Rp	118.786.000,00
JUMLAH	Rp	147.386.000,00

7. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Realisasi keuangan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Tahun 2019 adalah sebesar Rp880.027.150,00 atau 91.98 % dari anggarannya sebesar Rp956.804.000,00

Realisasi keuangan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat tersebut merupakan realisasi belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Rp 878.527.150,00





2. Sistem perlindungan pelapor pengadaan barang/jasa	Rp 1.500.000,00
Jumlah	Rp 880.027.150,00

Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Kualitas aspek perencanaan	60,28	56,81	94,24

Pada indikator kinerja sasaran Kualitas aspek perencanaan dari target 60,28, terealisasi 56,81, yang berarti Tidak Tercapai atau sebesar 94,24%.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kualitas Aspek Perencanaan didukung oleh program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran : Kualitas Aspek Perencanaan			
Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	92.724.300	82.294.300	88,75
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	59.600.000	33.224.300	55,75
Program Evaluasi Pembangunan Daerah	203.100.000	163.299.500	80,40
Program Perencanaan Pembangunan Sektoral	358.750.000	164.826.800	45,94
Program Penelitian dan Pengembangan	598.427.000	212.378.500	35,49
Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	645.650.000	17.112.500	2,65





SASARAN 2; MENINGKATNYA KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA BIROKRASI

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada **Tujuan I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100,00
Indeks Profesionalisme ASN	69,77	58,00	83,13
Rata-rata Capaian			91,57%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi adalah Tidak Tercapai atau tercapai 91,57%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI			TARGET RPJMD	
	2017	2018	2019	2019	2023
Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Profesionalisme ASN	48,63	49,04	58,00	69,77	81,33

Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Opini Audit Eksternal dari BPK pada tahun 2019 telah tercapai, dari target penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana realisasi di tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan penilaian dari





hasil audit BPK RI dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK R.I telah melakukan audit dan hasilnya disampaikan pada Tanggal 21 Mei 2019 dengan predikat Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

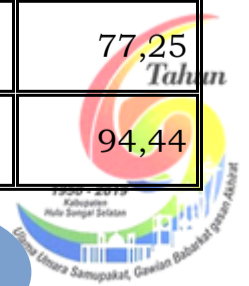
INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Target RPJMD	
								2019	2023
Opini WTP BPK terhadap LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Apabila dilihat dari tabel diatas, Capaian indikator Opini Audit Eksternal di tahun 2019 mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mana capaian Tahun 2019 ini adalah dalam mempertahankan opini yang sudah diraih pada tahun 2014. Capaian opini WTP pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ke enam ditetapkan oleh audit BPK dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Keberhasilan ini tak lepas dari faktor pendukung seperti halnya :

- Laporan keuangan yang semakin baik dan tepat waktu dari semua SKPD.
- Pembinaan dan pengawasan dari inspektorat kabupaten hulu sungai selatan yang lebih optimal, serta
- Terlaksananya SPIP (sistem pengendalian internal pemerintah) yang lebih baik.

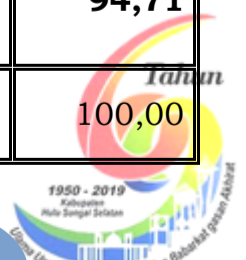
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2019 yaitu melalui :

Indikator Kinerja Sasaran : Opini WTP BPK terhadap LKPD			
Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	244.038.000	225.477.000	92,39
Kegiatan Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS	50.560.000	39.060.000	77,25
Kegiatan Penyusunan Dokumen Realisasi JKN	6.120.000	5.780.000	94,44





Indikator Kinerja Sasaran : Opini WTP BPK terhadap LKPD			
Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDHTtg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	54.660.000	54.588.000	99,87
Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	42.478.000	41.728.000	98,23
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	90.220.000	84.321.000	93,46
Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6.160.065.000	5.050.798.470	81,99
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.231.185.000	861.322.850	69,96
Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	452.524.000	310.702.800	68,66
Kegiatan Penyusunan Dok.DPA	46.820.000	17.285.000	36,92
Kegiatan Bimtek Penyusunan RKA SKPD	9.850.000	6.200.000	62,94
Kegiatan Penyusunan Dok. KUA dan PPAS	41.994.000	9.735.000	23,18
Kegiatan Penyusunan Dokumen DPPA	51.400.000	17.310.000	33,68
Kegiatan Bimtek Penyusunan RKA Sekolah	31.410.000	27.200.000	86,60
Kegiatan Penyusunan Rancangan APBD	109.900.000	81.741.200	74,38
Kegiatan Penyusunan Ranc. Perubahan APBD	119.800.000	97.070.600	81,03
Kegiatan Penyusunan Dok. Pergeseran APBD	41.350.000	38.533.000	93,19
Program Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan Keu. Daerah	58.100.000	55.027.500	94,71
Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda	30.800.000	30.800.000	100,00





Indikator Kinerja Sasaran : Opini WTP BPK terhadap LKPD			
Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	27.300.000	24.227.500	88,75

Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Indeks profesionalisme ASN	69,77	58,00	83,13

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian Indeks profesionalisme ASN pada tahun 2019 tidak tercapai, dari target 69,77 Indeks profesionalisme ASN dimana realisasi di tahun 2019 sebesar 58,00 atau tercapai 83,13%.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan salah satu cara mengukur profesionalisme ASN. Pengukuran dihitung dari data-data kualifikasi pendidikan, kompetensi, sasaran kerja pegawai (SKP) dan disiplin PNS.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menargetkan Indeks Profesionalitas ASN tahun 2019 sebesar 69,77% dengan melaksanakan teknik pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV, Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah, Pembinaan dan Pengembangan Pola Karier Aparatur dan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah. Sampai Pada triwulan IV tahun 2019 capaian indeks profesionalisme ASN masih belum diketahui karena hasil yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara Regional VIII pada triwulan I tahun 2020. Kondisi awal indeks profesionalisme ASN Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikeluarkan oleh BKN Regional VIII yaitu 58,00.

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2019 yaitu melalui :

Indikator Kinerja Sasaran : Indeks profesionalisme ASN





Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.142.548.000	1.209.834.150	56,47
Program Pembinaan Disiplin Aparatur	117.063.000	68.558.000	58,57
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	623.394.400	145.401.300	23,32
Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Aparatur Daerah	172.012.750	41.398.750	24,07
Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	42.478.000	41.728.000	98,23

Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks profesionalisme ASN tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.209.834.150,00 atau 56,47 % dari anggarannya sebesar Rp2.142.548.000,00.

Realisasi keuangan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	Rp 693.700.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Pola Karier Aparatur	Rp 236.659.150,00
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	Rp. 142.875.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	Rp. 136.600.000,00
Jumlah	Rp 1.209.834.150,00

2. Program Pembinaan Disiplin Aparatur





Realisasi kinerja keuangan Program Pembinaan Disiplin Aparatur Tahun 2019 adalah sebesar Rp68.558.000,00 atau 58,56 % dari anggarannya sebesar Rp.117.063.000,00.

Realisasi keuangan Pembinaan Disiplin Aparatur tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Penyusunan Laporan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Rp 4.185.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kepegawaian	Rp 64.373.000,00
Jumlah	Rp 68.558.000,00

3. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tahun 2019 adalah sebesar Rp145.401.300,00 atau 23,32 % dari anggarannya sebesar Rp623.394.400,00.

Realisasi keuangan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Seleksi penerimaan Calon PNS	Rp 91.025.500,00
Penyusunan Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat	Rp 41.603.300,00
Penyusunan Nominatif Pegawai	Rp 12.772.500,00
Jumlah	Rp 145.401.300,00

4. Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Aparatur Daerah

Realisasi kinerja Keuangan Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi Dan Aparatur Daerah Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 41.398.750,00 atau 24,07 % dari anggarannya sebesar Rp. 172.012.750,00.

Realisasi keuangan Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi Dan Aparatur Daerah Tahun 2019 tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja





Modal Peralatan dan Mesin diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1.	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi Dan Aparatur Daerah			
a.	Kegiatan Pengkajian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan Perangkat Daerah	172.012.750	41.398.750	24,07
	JUMLAH	172.012.750	41.398.750	24,07

5. Program Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

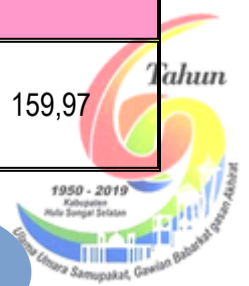
Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Perijinan adalah sebesar Rp. 145.959.800,00 atau 96,17 % dari anggarannya sebesar



SASARAN 3; MENINGKATNYA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DAERAH

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada **Tujuan I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	13,16	21,05	159,97





Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	8,33	9,03	108,40
Rata-rata Capaian			134,19%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah adalah Tercapai atau tercapai 134,19%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI			TARGET RPJMD	
	2017	2018	2019	2019	2023
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	7,89	7,89	21,05	13,16	100
Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	0,60	0,60	9,03	8,33	38,88

Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	13,16	21,05	159,97

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik pada tahun 2019 telah tercapai, dari target 13,16% perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik dimana terealisasi 21,05% di tahun 2019, atau Tercapai dengan 159,97%.

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2019 yaitu melalui :

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik





Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.320.040.000	1.918.421.576	145,33
Program Pelayanan Informasi dan Media Massa	3.425.235.000	2.852.881.083	83,29
Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah	88.055.000	73.835.000	83,85

Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi

Realisasi Program Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah sebesar Rp 1.320.040.000,00 atau 77,03% dari anggaran Rp.1.016.801.788,00.

Realisasi tersebut merupakan realisasi dari belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

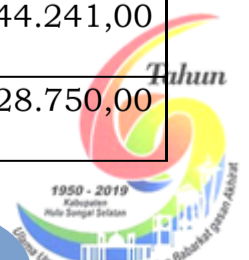
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Rp	901.619.788,00
Sosialisasi Kegiatan Teknologi dan Informatika	Rp	31.877.000,00
Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Rp	33.505.000,00
Peningkatan Pelayanan Akses Internet	Rp	49.800.000,00
Jumlah	Rp	1.016.801.788,00

2. Program Pelayanan Informasi dan Media Massa

Realisasi Program Pelayanan Informasi dan Media Massa adalah sebesar Rp 2.852.881.083,00 atau 83,29% dari anggarannya sebesar Rp. 3.425.235.000,00.

Realisasi tersebut merupakan realisasi dari belanja barang/jasa dan belanja modal yang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Peningkatan Sarana dan Prasarana LPPL Kandungan TV	Rp	457.974.745,00
Paket Acara LPPL Kandungan TV	Rp	108.133.347,00
Penyebarluasan Informasi dan Pembangunan Daerah	Rp	2.282.944.241,00
Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	Rp	3.828.750,00





Jumlah	Rp	2.852.881.083,00
---------------	-----------	-------------------------

3. Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah

Realisasi Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah adalah sebesar Rp.73.835.000,00 atau 83,85% dari anggaran Rp.88.055.000,00.

Realisasi tersebut merupakan realisasi dari belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Peningkatan Pelayanan Sandi	Rp	6.820.000,00
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Rp	67.015.000,00
Jumlah	Rp	73.835.000,00

Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	8,33	9,03	108,40

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan pada tahun 2019 telah tercapai, dari target 8,33% perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik dimana terealisasi 9,03% di tahun 2019, atau Tercapai dengan 108,40%.

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit.

Pengukuran terhadap pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan dilakukan secara mandiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ke Desa-Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.





Desa merupakan bagian wilayah pemerintahan terkecil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka wajah dan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercermin dari kualitas pelayanan di Desa selaku lembaga pemerintah pada level paling bawah. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan pemerintah desa sampai dengan tahun 2019 terdapat 13 Desa dari 144 desa yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menerapkan penggunaan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu melalui aplikasi berbasis komputer yaitu :

1. Desa Gambah Luar Muka
2. Desa Bamban Selatan
3. Desa Bamban
4. Desa Banjarbaru
5. Desa Pihanin Raya
6. Desa Muning Baru
7. Desa Tibung Raya
8. Desa Amawang Kanan
9. Desa Sungai Paring
10. Desa Amawang Kiri
11. Desa Sungai Kupang
12. Desa Gumbil



Cara pengukuran Realisasi Capaian indikator Kinerja Sasaran Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULAS // PENJELASAN	KET
Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	$\frac{\sum \text{Desa yang menggunakan aplikasi TI}}{\sum \text{Desa Se - Kab. HSS}} \times 100$	$\frac{13 \times 100}{144} = 9,03$

Tabel
Pemerintah Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam
Pemberian Pelayanan Tahun 2018-2019

Indikator Kinerja	2018	2019





Jumlah Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan	1	13
Jlh Desa se Kab.HSS	144	144
Persentase	0,6%	9,03%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. HSS Tahun 2019

Pada tabel menunjukkan bahwa perkembangan jumlah desa yang menggunakan IT cukup baik, dengan penambahan sebanyak 12 Desa dari kondisi tahun 2018.

Meskipun Jumlah Desa yang menggunakan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan pada tahun 2019 telah mencapai target yang ditetapkan, namun begitu banyak, hal ini karena adanya beberapa kondisi yang menyebabkan pencapaiannya lambat, antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Lemahnya SDM Perangkat Desa dalam penggunaan IT
- b. Jaringan internet yang belum menjangkau seluruh desa
- c. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan.

Adapun upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan penggunaan IT pelayanan di Desa antara lain :

- a. Penyediaan sarana prasarana pelayanan dan jaringan internet yang memadai di Kantor Desa menggunakan anggaran keuangan Desa.
- b. Disamping itu kerjasama dengan Dinas Kominfo kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan pembinaan
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap Perangkat Desa dalam pengelolaan pelayanan di desa.
- d. Memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi ke desa.

Adapun program di Dinas PMD untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu melalui Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja program yaitu persentase pemerintah desa yang berkinerja baik. Kriteria Pemerintah Desa berkinerja baik yaitu :

- a. Melaksanakan administrasi Desa dengan tertib
- b. Memiliki perencanaan keuangan dan pembangunan desa dengan baik
- c. Pelaporan keuangan desa yang akuntabel
- d. Pelaporan Penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu

Upaya meningkatkan persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan disamping





melalui pelaksanaan program yang ada pada Dinas PMD juga didukung oleh kegiatan yang dianggarkan pada APBDes, antara lain melalui penyediaan sarana prasarana konektivitas internet.

Secara rinci Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2019 yaitu melalui :

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan			
Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	217.125.000	174.569.500	80,40

Pencapaian program penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa

Realisasi kinerja keuangan Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa Tahun 2019 adalah sebesar Rp.174.569.500,00 atau 80,40 % dari anggarannya sebesar Rp.217.125.000,00. Realisasi keuangan Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang diwujudkan dalam kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

Evaluasi Perencanaan dan Rancangan APBDes	Rp	136.455.000
Pelaksanaan e-Monitoring System Desa	Rp	44.370.000
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Rp	36.300.000
Jumlah	Rp	217.125.000





SASARAN 4; MENINGKATNYA KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada **Tujuan I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Persentase peningkatan penerimaan zakat	8,00	23,62	295,20
Rata-rata Capaian			295,20%

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan adalah Tercapai atau tercapai 295,20%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan target RPJMD tahun 2019 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI			TARGET RPJMD	
	2017	2018	2019	2019	2023
Persentase peningkatan penerimaan zakat	7	7,5	23,62	8,00	12,00

Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA
Persentase peningkatan penerimaan zakat	8,00	23,62	295,20

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Persentase peningkatan penerimaan zakat pada tahun 2019 tidak tercapai, dari target 8,00% Persentase peningkatan penerimaan zakat dimana terealisasi 23,62% di tahun 2019, atau Tercapai dengan 295,20%.

Tabel





Penerimaan Zakat Tahun 2018-2019
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahun	Penerimaan Zakat (Rp)
2018	900.544.847
2019	1.113.220.047

Sumber: Bagian Kesra Setda Kab. Hulu Sungai Selatan

Indikator ini dicanangkan sebagai salah satu parameter dalam kehidupan social keagamaan. Dengan peningkatan penerimaan zakat yang terus meningkat bisa menjadi salah tanda bahwa ada kepatuhan dalam pembayaran zakat dilingkungan pemerintahan Kabupaten HULU Sungai Selatan.

Cara pengukuran Realisasi Capaian indikator Kinerja Sasaran Persentase peningkatan penerimaan zakat sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Penerimaan Zakat Th 2019} - \sum \text{Penerimaan Zakat Th 2018}}{\sum \text{Penerimaan Zakat Th 2018}} \times 100$$

Untuk periode tahun anggaran 2019, realisasi capaian indikator penerimaan zakat mengalami kenaikan yang sangat drastic dimana realisasi capaian peningkatan penerimaan zakat mencapai 23,62% dibandingkan target sebesar 8%. Peningkatan drastis penerimaan zakat ini sangat dipengaruhi dengan adanya edaran dari Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 400/120/KESRA/2019 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan/Profesi, Infaq dan Shadaqah. Tanggal 19 September 2019. Dimana pembayaran zakat untuk ASN di lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan langsung dibayarkan bersamaan dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai. Diharapkan realisasi penerimaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan semakin lebih baik untuk kedepannya.

Secara rinci Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2019 yaitu melalui :

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase peningkatan penerimaan zakat			
Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)

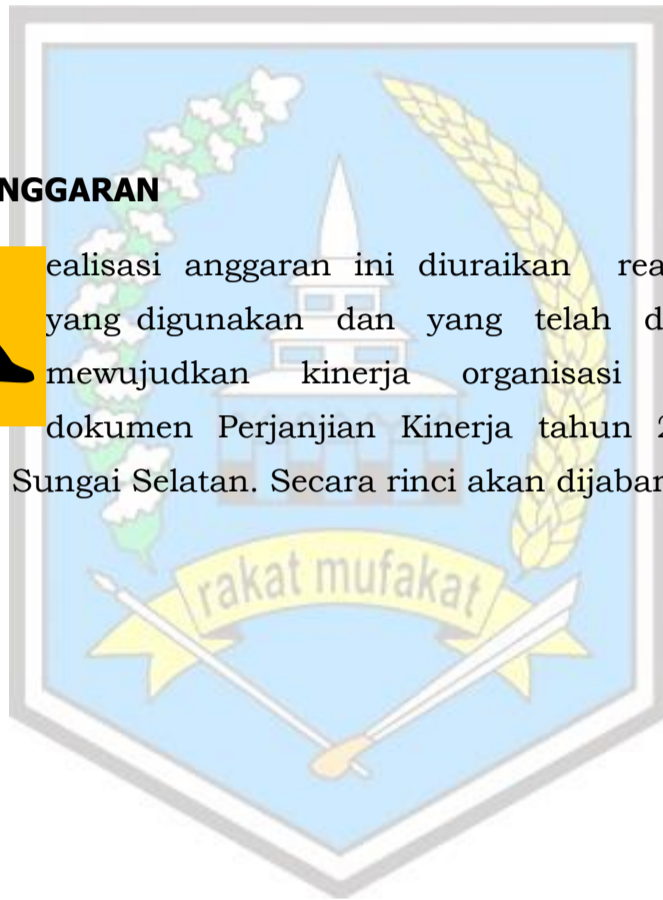




Indikator Kinerja Sasaran : Persentase peningkatan penerimaan zakat			
Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	6.402.387.500	4.720.471.849	73,73

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara rinci akan dijabarkan melalui tabel dibawah ini.



**REALISASI ANGGARAN YANG DIGUNAKAN DAN YANG TELAH DIGUNAKAN UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA ORGANISASI**

Misi I : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2019	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	12,07	Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	660.112.825	646.952.485	98,01%
		2	Rata-rata lama sekolah	7,72	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	2.035.039.000	1.780.330.236	87,48%
		3	Persentase PAUD formal terakreditasi A	1,25	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	1.727.136.175	1.339.100.300	77,53%
		4	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	6,88	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	18.164.219.600	16.580.798.247	91,28%
					Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.324.446.000	9.173.077.571	98,38%
			Program Peningkatan Budaya Baca	502.850.000	483.538.940	96,16%		
			Program Peningkatan Mutu dan Akses Perpustakaan	222.536.250	200.486.250	90,09%		
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	65,59	Program Perbaikan Gizi masyarakat	314.051.000	303.251.000	96,56%
					Program peningkatan akses sarana dan prasarana kesehatan	1.480.290.735	1.316.229.448	88,92%





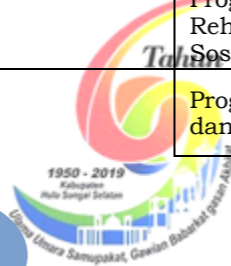
Misi I : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2019	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN	
			Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kesehatan	5.300.764.265	5.171.513.188	97,56%	
			Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	31.643.791.000	31.607.222.699	99,88%	
			Program Promosi kesehatan	116.232.500	95.711.000	82,34%	
			Program Pengendalian dan pencegahan penyakit	265.140.600	157.403.800	59,37%	
	2	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <= 20 tahu	72,90	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	4.522.722.500	2.493.720.761	55,14%
	3	Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	AA	Program Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Pelayanan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandungan	41.205.095.400	40.501.178.002	98,29%
	4	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	4,35	Program Peningkatan kualitas layanan rumah sakit	15.705.754.663	14.642.159.364	93,23%
				Program Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas dan Jaringannya	6.107.793.000	4.413.422.086	72,26%
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (BLUD)	96.621.022.542	94.918.493.624	98,24%



Misi I : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2019	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
3	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	1	PPH Ketersediaan	83,95	Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	761.282.500	742.053.472	97,47%
					Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	154.585.500	123.369.500	79,81%
4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	1	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	57,00	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	2.035.039.000	1.780.330.236	87,48%
					Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	1.727.136.175	1.339.100.300	77,53%
					Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	18.164.219.600	16.580.798.247	91,28%
					Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.324.446.000	9.173.077.571	98,38%
					Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	31.643.791.000	31.607.222.699	99,88%
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	590.146.200	496.328.600	84,10%
					Program Peningkatan Akses dan Mutu Air Bersih	7.645.793.500	7.418.236.900	97,02%





Misi I : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2019	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
			Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	9.300.534.601	9.061.009.230	97,42%
			Program Penegakan Peraturan Daerah	86.030.000	76.734.950	89,20%
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran	137.880.000	130.405.000	94,58%
			Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	101.150.000	92.414.000	91,36%
5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	61,40	Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	474.195.000	452.629.700	95,45%
	1		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	590.146.200	496.328.600	84,10%
			Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	63.008.650	62.222.650	98,75%

Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal





SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2019	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN	
1	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	1	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	5,33	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	541.006.500	532.926.300	98,51	
		2	Indeks Gini	0,320	Program perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	7.740.646.000	7.507.623.850	96,99	
2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	1	Tingkat pengangguran terbuka	2,43	Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	185.143.000	163.930.605	88,54	
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja	17.751.250	14.525.000	81,83	
3	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	4,55	Program Peningkatan Mutu Produk Industri	330.746.000	262.450.200	79,35	
			2	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,84	Program Peningkatan usaha sektor perdagangan	827.098.000	824.148.000	99,64
						Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1.572.728.000	1.463.909.200	93,08
						Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan	4.527.732.000	4.306.373.086	95,11
		3	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	4,33	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	497.802.500	460.458.500	92,50	
				Program Peningkatan Produksi Perkebunan	407.109.500	39.140.000	9,61		



Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2019	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
			Program Peningkatan Produksi Hortikultura	510.041.500	437.690.090	85,81
			Program Peningkatan Populasi Ternak	1.295.568.555	1.071.925.000	82,74
			Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak	201.279.200	71.882.000	35,71
			Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	201.279.200	191.586.000	95,18
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	263.534.900	213.189.700	80,90
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	3.484.281.750	2.089.593.500	59,97
			Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	27.900.000	27.900.000	100,00
			Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	775.780.000	742.195.750	95,67
			Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.599.369.000	1.516.176.500	94,80



Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2019	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN		
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	16.551.600	16.347.000	98,76		
	4	Persentase koperasi sehat	2,35	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	233.406.000	212.947.500	91,23	
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	29,52 milyar	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan	479.023.000	277.351.230	57,90
					Program Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB	922.585.000	804.013.750	87,15
5	Meningkatnya investasi PMDN	1	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	9,08	Program Peningkatan Realisasi Investasi	124.113.000	115.626.500	93,16
					Program Penguatan Iklim Investasi	2.055.000	2.055.000	100,00
6	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	1	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>)	4.758.098.000	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.775.026.000	4.711.804.567	98,68
					Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	227.170.000	224.516.000	98,83
					Program Pengembangan Kemitraan	102.995.000	101.765.000	98,81
					Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	2.457.099.000	2.446.626.500	99,57

Misi III : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang menunjang Sektor Perekonomian
Laporan Kinerja (LKj) Kab. HSS Tahun 2019





SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2019	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	1	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	64,03	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	62.066.173.000	60.182.399.926	96,96%
					Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	44.998.075.475	43.203.430.233	96,01%
					Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	864.544.000	853.169.000	98,68%
					Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau	362.979.700	362.248.334	99,80%
		2	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	61,33	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	35.888.505.000	34.786.381.729	96,93%
					Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Lainnya	4.075.067.000	3.910.039.998	95,95%
		3	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	23,80	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	17.593.000.000	17.172.543.911	97,61%
					Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	7.357.100.000	7.211.519.710	98,02%
					Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	9.300.534.601	9.061.009.230	97,42%
		4	Persentase kecukupan RTH publik	24,84	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan areal pemakaman	4.635.450.000	4.548.259.000	98,12%
Program Penataan dan Penguasaan Tanah	14.839.670.000				13.887.018.940	93,58%		



Misi III : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang menunjang Sektor Perekonomian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2019	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN	
	5	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	50,85	Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	6.501.606.000	6.367.807.596	97,94%
				Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	7.357.100.000	7.211.519.710	98,02%

Misi IV : Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2019	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN		
1	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	1	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,65	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaaan	166.665.000	153.972.400	92,38
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	38.950.000	27.300.000	70,09	
				Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	479.656.000	450.444.300	93,91	
				Program Peningkatan Prestasi Dan Pemasyarakatan Olahraga	952.296.000	907.831.500	95,33	
2	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,10	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	38.497.500	32.397.500	84,15



Misi IV : Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2019	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
			Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	10.045.000	7.650.000	76,16
	2 Persentase desa/kelurahan layak anak	2,03	Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	92.724.300	82.294.300	88,75
			Program Peningkatan Perlindungan Anak	23.966.000	20.786.590	86,73
3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Indeks kualitas lingkungan hidup	55,96	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.214.019.200	659.740.000	54,34
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.141.558.000	5.974.638.081	83,66

Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2019	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
-------------------	---------------------------	----------------	---------	--------------------	-------------------------	--------------------



Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2019	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	1	Predikat AKIP	BB (76,23)	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	309.081.100	207.946.516	67,28
					Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.136.503.900	727.287.050	63,99
					Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	15.865.000	315.250	1,99
					Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	405.721.850	346.393.140	85,38
		2	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	B (3,97)	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	241.665.900	151.633.570	62,75
					Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	151.762.500	145.959.800	96,18
					Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medik/Non Medik	17.766.614.637	15.395.305.789	86,65
					Prog.Peningkatan Pelayanan Kependudukan	940.795.000	865.843.009	92,03
					Program Pelayanan Informasi Data Kependudukan	242.118.000	170.142.000	70,27



Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2019	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN	
	3	Kualitas aspek perencanaan	56,81	Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	167.880.000	147.386.000	87,79
				Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	956.804.000	880.027.150	91,98
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	796.485.000	518.344.600	65,08
				Program Pengendalian Pembangunan Daerah	59.600.000	33.224.300	55,75
				Program Evaluasi Pembangunan Daerah	203.100.000	163.299.500	80,40
				Program Perencanaan Pembangunan Sektoral	358.750.000	164.826.800	45,94
				Program Penelitian dan Pengembangan	598.427.000	212.378.500	35,49
				Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	645.650.000	17.112.500	2,65
2	1	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	244.038.000	225.477.000	92,39
				Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6.160.065.000	5.050.798.470	81,99





Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2019	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.231.185.000	861.322.850	69,96	
			Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	452.524.000	310.702.800	68,66	
			Program Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan Keu. Daerah	58.100.000	55.027.500	94,71	
	2	Indeks Profesionalisme ASN	58,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.142.548.000	1.209.834.150	56,47
				Program Pembinaan Disiplin Aparatur	117.063.000	68.558.000	58,57
				Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	623.394.400	145.401.300	23,32
				Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Aparatur Daerah	172.012.750	41.398.750	24,07
3	1	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	21,05	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.320.040.000	1.918.421.576	145,33
				Program Pelayanan Informasi dan Media Massa	3.425.235.000	2.852.881.083	83,29
				Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah	88.055.000	73.835.000	83,85



Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2019	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
	2 Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	9,03	Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	217.125.000	174.569.500	80,40
4 Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	1 Persentase peningkatan penerimaan zakat	23,62	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	6.402.387.500	4.720.471.849	73,73





C. DAFTAR PRESTASI TINGKAT NASIONAL/PROVINSI

Berkat kerja keras bersama antara Eksekutif dan Legislatif serta seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka pada Tahun 2019 telah banyak prestasi yang diraih sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas kinerja yang telah dicapai. Adapun prestasi yang diperoleh tersebut adalah sebagai berikut :

A. TINGKAT NASIONAL

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Predikat “ BB “ (baik);
2. Penghargaan Innovative Government Award 2019 kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Peringkat 8 Kategori Pemerintah Kabupaten Terinovatif;
3. Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik” Sangat Baik dengan Predikat A- Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik” Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik” Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada BLUD RSUD Brigjend. H. Hasan basry Kandangan;
6. Penghargaan Kepatuhan tinggi terhadap Standart Pelayanan Publik kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Ombudsman dengan nilai 92,53.
7. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerinah Daerah (LKPD) TA 2019;





8. ~~Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019~~ mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kementerian Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapatkan opini WTP untuk yang keenam kalinya;
9. Penghargaan Anugerah Wahana Tata Nugraha Tahun 2019 dari Presiden Republik Indonesia kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
10. Penghargaan atas kerja sama dalam kegiatan Laporan! Goes To Campus dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
11. Piagam Apresiasi atas Pencapaian Kepatuhan LHKPN 100% pada tahun pelaporan 2017 dari KPK Tahun 2019 Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
12. Penghargaan Sebagai Sekolah Ramah Anak Terbaik Tingkat Pra-Sekolah Tahun 2019 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kepada TK Munggu Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
13. Penghargaan Sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional 2019 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kepada MIN 11 Hulu sungai Selatan , Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
14. Juara III Kategori Apresiasi Keberaksaraan Peserta Didik Pendidikan Keaksaraan Dasar Tahu 2019 di serahkan kepada Danuh siah Oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Juara II Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Toga Dan Akupreser Tingkat Nasional Tahun 2019 oleh Menteri Kesehatan RI kepada Kelompok Asuhan Mandiri Jahe Madu Desa Amawang Kiri Muka, Kec. Kandangan, Kab. HSS;
16. Penghargaan Kepada Warga Sungai Kupang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Peserta Festival Gapura Cinta Negeri Tahun 2019;

B. TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. Penghargaan sebagai Pengelola Kepegawaian Terbaik dari Kantor Regional VIII BKN kepada BKD Diklat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Penghargaan atas Keberhasilan dalam Pencapaian Level 3 Kapabilitas APIP pda Tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan





~~dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Inspektoral~~
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

3. Juara Stand Terbaik I dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-69;
4. Juara I Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Juara I “ Ba’adu Pamantingan” dalam Tabalong Ethnic Festival VIII;
6. Terbaik I Lomba Poskamling Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang diraih oleh Kelurahan Jambu Hilir;
7. Terbaik II Pelaksana UPSUS SIWAB Tahun 2019 dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Terbaik II Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Peringkat II atas Prestasi kinerja dalam pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat diberikan oleh BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
10. Juara II Lomba Pawai Budaya Festival Budaya Banjar dan Pariwisata di raih oleh Sanggar Karamunting;
11. Juara II Lomba Tari Anak Tingkat SD Sederajat Provinsi Kalimantan Selatan ;
12. Juara II Lomba Posbindo Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
13. Juara II Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di raih oleh Desa Gambah Luar Muka, Kecamatan Kandangan;
14. Juara II Lomba Pola Asuh dan Remaja Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Diraih oleh Desa Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan;
15. Juara II Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di raih oleh Desa Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan;
16. Harapan II Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
17. Terbaik III Lomba Posbindu Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
18. Terbaik III Bazar MTQ Nasional di Kotabaru;
19. Juara III Kontes Durian dan Pameran Buah Eksotik Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di raih oleh Ulang-ulang;
20. Juara III Lomba Pola Asuh dan Remaja Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Diraih oleh Desa Kandangan Barat, Kecamatan;





21. Juara III Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di raih oleh Kelurahan Kandangan Barat;
22. Juara III Lomba UP2k Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;





BAB 4

PENUTUP

A. SIMPULAN

Gambaran tentang kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2019 telah tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini adalah tahun Pertama pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah 5 (lima) Tujuan, 8 (delapan) Indikator Kinerja Tujuan, 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis dan 38 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran.

Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Tujuan, 4 (empat) Indikator Kinerja Tujuan yang tercapai dengan pencapaian $\geq 100\%$, dan 4 (empat) Indikator Kinerja tidak tercapai dengan pencapaian $< 100\%$.

Dari 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis, 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang tercapai dengan pencapaian $\geq 100\%$, sedangkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis tidak tercapai dengan pencapaian $< 100\%$.

Dan dari 38 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran, sebanyak 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Sasaran yang pencapaian kinerjanya $\geq 100\%$, sedangkan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Sasaran yang pencapaian kinerjanya $< 100\%$.

Sedangkan dari Hasil capaian pengukuran terhadap 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu





Sungai Selatan tahun 2019, terdapat 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama yang pencapaian kinerjanya $\geq 100\%$ dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama yang pencapaian kinerjanya $< 100\%$.

Terkait dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, kekurangan yang terjadi dalam tahun 2019 periode 2018-2023 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun-tahun mendatang. Sasaran organisasi yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran organisasi pada masa selanjutnya dapat dicapai dengan lebih baik.

Hambatan-hambatan yang mempengaruhi kelancaran implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja sampai saat ini adalah mekanisme pengumpulan data kinerja belum maksimal sehingga dukungan data faktual kurang lengkap guna memenuhi target indikator sasaran organisasi yang pada gilirannya berakibat pengukuran kinerja serta analisa kinerja tidak maksimal.

Dengan telah dilaksanakannya seluruh kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar terciptanya sistem fungsi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur daerah yang pada akhirnya akan memperlihatkan bahwa tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dari hasil penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini sebagai langkah yang akan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam peningkatan kinerja tahun mendatang, yaitu dengan memperbaiki sistem kerja, memantapkan *team work* dan melakukan koordinasi serta komunikasi yang lebih baik secara berkelanjutan agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.





B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dari hasil penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini sebagai langkah yang akan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan serta strategi peningkatan kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam peningkatan kinerja tahun mendatang, yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi yang secara konsisten harus dipedomani untuk pencapaian tujuan;
2. Menyelaraskan target-target tahunan indikator kinerja sasaran RPJMD dengan indikator kinerja berdasarkan sasaran Renstra SKPD, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja serta memformat kembali kondisi kinerja awal sampai dengan kondisi kinerja akhir dengan akurasi target kinerja yang terukur dari waktu ke waktu.
3. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja guna pemenuhan indikator sasaran secara maksimal dengan meningkatkan pemanfaatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja SKPD.
4. Meningkatkan fungsi pengawasan/ pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal.



LAMPIRAN

Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

NO	SASARAN	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	86,48
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	99,87
3	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	99,22
4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	100,00
5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	108,52
6	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	97,84
7	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	82,61
8	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	106,04
9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	128,35
10	Meningkatnya investasi PMDN	189,17
11	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	112,63
12	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	99,08
13	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	101,56
14	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	99,35
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	101,60
16	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	97,05
17	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	91,57
18	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	134,19
19	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	295,25
	RATA-RATA % CAPAIAN SASARAN	117,39

Misi I : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,41	68,41	98,56	1 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan	86,48	1 Harapan lama sekolah	12,70	12,07	95,04	Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	660.112.825	646.952.485	98,01%
								2 Rata-rata lama sekolah	8,00	7,72	96,50	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	2.035.039.000	1.780.330.236	87,48%
								3 Persentase PAUD formal terakreditasi A	2,50	1,25	50,00	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	1.727.136.175	1.339.100.300	77,53%
								4 Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	6,59	6,88	104,40	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	18.164.219.600	16.580.798.247	91,28%
												Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.324.446.000	9.173.077.571	98,38%
												Program Peningkatan Budaya Baca	502.850.000	483.538.940	96,16%
												Program Peningkatan Mutu dan Akses Perpustakaan	222.536.250	200.486.250	90,09%
								2 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	99,87	1 Angka Harapan Hidup	66,05	65,59	99,30	Program Perbaikan Gizi masyarakat	314.051.000
						Program peningkatan akses sarana dan prasarana kesehatan	1.480.290.735							1.316.229.448	88,92%
						Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kesehatan	5.300.764.265							5.171.513.188	97,56%
						Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	31.643.791.000							31.607.222.699	99,88%
						Program Promosi kesehatan	116.232.500							95.711.000	82,34%
						Program Pengendalian dan pencegahan penyakit	265.140.600							157.403.800	59,37%
						2 Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <= 20 tahun	73,02	72,90	100,16	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	4.522.722.500	2.493.720.761	55,14%		

Misi I : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN		
								3	Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	AA	AA	100,00	Program Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Pelayanan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandungan	41.205.095.400	40.501.178.002	98,29%	
								4	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	4,35	4,35	100,00	Program Peningkatan kualitas layanan rumah sakit	15.705.754.663	14.642.159.364	93,23%	
												Program Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas dan Jaringannya	6.107.793.000	4.413.422.086	72,26%		
												Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (BLUD)	96.621.022.542	94.918.493.624	98,24%		
						3	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	99,22	1	PPH Ketersediaan	84,61	83,95	99,22	Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	761.282.500	742.053.472	97,47%
												Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	154.585.500	123.369.500	79,81%		
						4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	100,00	1	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	57,00	57,00	100,00	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	2.035.039.000	1.780.330.236	87,48%
												Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	1.727.136.175	1.339.100.300	77,53%		
												Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	18.164.219.600	16.580.798.247	91,28%		
												Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.324.446.000	9.173.077.571	98,38%		
												Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	31.643.791.000	31.607.222.699	99,88%		
												Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	590.146.200	496.328.600	84,10%		
												Program Peningkatan Akses dan Mutu Air Bersih	7.645.793.500	7.418.236.900	97,02%		
												Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	9.300.534.601	9.061.009.230	97,42%		
												Program Penegakan Peraturan Daerah	86.030.000	76.734.950	89,20%		
												Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran	137.880.000	130.405.000	94,58%		

Misi I : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN		
												Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	101.150.000	92.414.000	91,36%		
						5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	108,52	1	Persentase angka PMKS yang mandiri	56,58	61,40	108,52	Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	474.195.000	452.629.700	95,45%
												Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	590.146.200	496.328.600	84,10%		
												Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	63.008.650	62.222.650	98,75%		

Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN			
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	1	Tingkat kemiskinan	5,14	5,21	98,64	1	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	97,84	1	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	5,14	5,33	96,30	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	541.006.500	532.926.300	98,51
		2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	74,64	74,64	100,00				2	Indeks Gini	0,318	0,320	99,37	Program perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	7.740.646.000	7.507.623.850	96,99
		2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	82,61	1	Tingkat pengangguran terbuka	2,07	2,43	82,61	Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	185.143.000	163.930.605	88,54					
										Program Peningkatan Kesempatan Kerja	17.751.250	14.525.000	81,83					
										3	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi kategori sektor unggulan	106,04	1	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	4,47	4,55	101,79	Program Peningkatan Mutu Produk Industri
		2	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,38	4,84	89,96	Program Peningkatan usaha sektor perdagangan	827.098.000	824.148.000	99,64								
							Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1.572.728.000	1.463.909.200	93,08								
							Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan	4.527.732.000	4.306.373.086	95,11								
		3	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	3,27	4,33	132,42	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	497.802.500	460.458.500	92,50								
							Program Peningkatan Produksi Perkebunan	407.109.500	39.140.000	9,61								
							Program Peningkatan Produksi Hortikultura	510.041.500	437.690.090	85,81								
							Program Peningkatan Populasi Ternak	1.295.568.555	1.071.925.000	82,74								
							Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak	201.279.200	71.882.000	35,71								
							Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	201.279.200	191.586.000	95,18								
							Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	263.534.900	213.189.700	80,90								
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	3.484.281.750						2.089.593.500	59,97										
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	27.900.000						27.900.000	100,00										
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	775.780.000						742.195.750	95,67										
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.599.369.000	1.516.176.500	94,80															
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	16.551.600	16.347.000	98,76															

Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN			PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN		
									TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA						
									4	Persentase koperasi sehat	2,35	2,35	100,00	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	233.406.000	212.947.500	91,23
							Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	128,35	1	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	23 milyar	29,52 milyar	128,35	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan	479.023.000	277.351.230	57,90
													Program Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB	922.585.000	804.013.750	87,15	
							Meningkatnya investasi PMDN	189,17	1	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	4,80	9,08	189,17	Program Peningkatan Realisasi Investasi	124.113.000	115.626.500	93,16
													Program Penguatan Iklim Investasi	2.055.000	2.055.000	100,00	
							Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	112,63	1	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>)	#####	4.758.098.000	112,63	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.775.026.000	4.711.804.567	98,68
													Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	227.170.000	224.516.000	98,83	
													Program Pengembangan Kemitraan	102.995.000	101.765.000	98,81	
													Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	2.457.099.000	2.446.626.500	99,57	

Misi III : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang menunjang Sektor Perekonomian

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN	
1	Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	1 Persentase infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	49,64	67,49	135,96	1 Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	99,08	1 Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	62,45	64,03	102,53	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	62.066.173.000	60.182.399.926	96,96%	
												Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	44.998.075.475	43.203.430.233	96,01%	
												Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	864.544.000	853.169.000	98,68%	
												Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau	362.979.700	362.248.334	99,80%	
								2	2 Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	62,68	61,33	97,85	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	35.888.505.000	34.786.381.729	96,93%
													Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Lainnya	4.075.067.000	3.910.039.998	95,95%
								3	3 Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	24,00	23,80	99,17	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	17.593.000.000	17.172.543.911	97,61%
													Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	7.357.100.000	7.211.519.710	98,02%
													Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	9.300.534.601	9.061.009.230	97,42%
								4	4 Persentase kecukupan RTH publik	24,84	24,84	100,00	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan areal pemakaman	4.635.450.000	4.548.259.000	98,12%
													Program Penataan dan Penguasaan Tanah	14.839.670.000	13.887.018.940	93,58%
								5	5 Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	53,05	50,85	95,85	Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	6.501.606.000	6.367.807.596	97,94%
													Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	7.357.100.000	7.211.519.710	98,02%

Misi IV : Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
1	Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	1 Indeks Desa Membangun (IDM)	0,64	0,65	101,56	1 Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	101,56	1 Indeks Desa Membangun (IDM)	0,64	0,65	101,56	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaaan	166.665.000	153.972.400	92,38
												Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaaan	38.950.000	27.300.000	70,09
												Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	479.656.000	450.444.300	93,91
												Program Peningkatan Prestasi Dan Pemasarakatan Olahraga	952.296.000	907.831.500	95,33
		2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,27	89,1	98,70	2 Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	99,35	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,27	89,10	98,70	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	38.497.500	32.397.500	84,15
												Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	10.045.000	7.650.000	76,16
												2 Persentase desa/kelurahan layak anak	2,03	2,03	100,00
		Program Peningkatan Perlindungan Anak	23.966.000	20.786.590	86,73										
		3 Indeks kualitas lingkungan hidup	55,08	55,96	101,60	3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	101,60	1 Indeks kualitas lingkungan hidup	55,08	55,96	101,60	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.214.019.200	659.740.000	54,34
												Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.141.558.000	5.974.638.081	83,66

Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	1 Indeks Reformasi Birokrasi	68,00	64,66	95,09	1 Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	97,05	1 Predikat AKIP	BB (70,01)	BB (76,23)	108,88	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	309.081.100	207.946.516	67,28
												Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.136.503.900	727.287.050	63,99
												Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	15.865.000	315.250	1,99
												Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	405.721.850	346.393.140	85,38
								2 Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,51)	B (3,97)	88,03	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	241.665.900	151.633.570	62,75
												Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	151.762.500	145.959.800	96,18
												Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medik/Non Medik	17.766.614.637	15.395.305.789	86,65
												Prog.Peningkatan Pelayanan Kependudukan	940.795.000	865.843.009	92,03
												Program Pelayanan Informasi Data Kependudukan	242.118.000	170.142.000	70,27
												Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	167.880.000	147.386.000	87,79
						3 Kualitas aspek perencanaan	60,28	56,81	94,24	Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	956.804.000	880.027.150	91,98		
										Program Perencanaan Pembangunan Daerah	796.485.000	518.344.600	65,08		
										Program Pengendalian Pembangunan Daerah	59.600.000	33.224.300	55,75		
										Program Evaluasi Pembangunan Daerah	203.100.000	163.299.500	80,40		
										Program Perencanaan Pembangunan Sektoral	358.750.000	164.826.800	45,94		
										Program Penelitian dan Pengembangan	598.427.000	212.378.500	35,49		
						2 Meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	91,57	1 Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100,00	Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	645.650.000	17.112.500	2,65
												Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	244.038.000	225.477.000	92,39
												Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6.160.065.000	5.050.798.470	81,99
												Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.231.185.000	861.322.850	69,96
2 Indeks Profesionalisme ASN	69,77	58,00	83,13	Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	452.524.000			310.702.800	68,66						
				Program Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan Keu. Daerah	58.100.000			55.027.500	94,71						
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.142.548.000			1.209.834.150	56,47						
				Program Pembinaan Disiplin Aparatur	117.063.000			68.558.000	58,57						
				Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	623.394.400			145.401.300	23,32						
				Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Aparatur Daerah	172.012.750			41.398.750	24,07						

Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
						3 Meningkatkan penggunaan sistem informasi daerah	134,19	1 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	13,16	21,05	159,97	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.320.040.000	1.918.421.576	145,33
												Program Pelayanan Informasi dan Media Massa	3.425.235.000	2.852.881.083	83,29
												Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah	88.055.000	73.835.000	83,85
								2 Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	8,33	9,03	108,40	Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	217.125.000	174.569.500	80,40
						4 Meningkatkan kehidupan sosial keagamaan	295,25	1 Persentase peningkatan penerimaan zakat	8,00	23,62	295,25	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	6.402.387.500	4.720.471.849	73,73

LAMPIRAN

Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

NO	SASARAN	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	86,48
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	99,87
3	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	99,22
4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	100,00
5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	108,52
6	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	97,84
7	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	82,61
8	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	106,04
9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	128,35
10	Meningkatnya investasi PMDN	189,17
11	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	112,63
12	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	99,08
13	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	101,56
14	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	99,35
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	101,60
16	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	97,05
17	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	91,57
18	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	134,19
19	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	295,25
	RATA-RATA % CAPAIAN SASARAN	117,39



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019



PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telepon (0517) 21076/21526 Kandangan 71211





BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 188.45/ 098 /KUM/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 6);

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing SKPD/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun pedoman penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Maret 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Tembusan :
Inspektur Kab. HSS di Kandangan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 188.45/ 098 /KUM/2019
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET	
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya						
		1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	<p>Menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak . IPM = (akar pangkat 3 dari (Indeks kesehatan x indeks pendidikan x indeks pengeluaran)) x 100</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$ </div>			
		2	Harapan lama sekolah	Tahun	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ <p>I = Indeks HLS = Harapan Lama Sekolah min = angka minimal maks = angka maksimum</p>	Disdik	Badan Pusat Statistik	
		3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ <p>I = Indeks HLS = Rata-Rata Lama Sekolah min = angka minimal maks = angka maksimum</p>		Badan Pusat Statistik	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	Tahun	Rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. $\frac{\text{penjumlahan usia yang meninggal tahun itu}}{\text{jumlah orang yang meninggal tahun itu}} \times 100\%$	Dinkes		
3	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	5	PPH Ketersediaan	Skor	Skor PPH Ketersediaan dihitung berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) disajikan angka rata-rata jumlah jenis Bahan Makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita pertahun dalam kilogram serta per kapita per hari dalam satuan gram, pada kurun waktu tertentu.	Dinas Ketahanan Pangan		
4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	6	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	Persen	$\frac{\sum \text{Jumlah SPM yang terpenuhi}}{\sum \text{SPM perangkat daerah di kab. HSS}} \times 100\%$	Disdik/Dinkes/ Dinsos/Satpol PP/BPBD Kesbangpol/Dis. PUTR/Dis.PRLH	Laporan SPM	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET	
5	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal						
		7	Tingkat kemiskinan	Persen	Persentase penduduk miskin (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan)	Dinsos	Badan Pusat Statistik	
		8	Indeks Gini	Indeks	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>Dimana : Pi = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini rasio berkisar antara 0 dan 1, jika : G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	Dis TK, Kop dan UKP	Badan Pusat Statistik	
6	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	9	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	$\frac{\sum \text{Penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\sum \text{Penduduk angkatan kerja}} \times 100$			Badan Pusat Statistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET
7	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	10	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang tertentu $\frac{PDRB(t) - PDRB(t - 1)}{PDRB(t - 1)} \times 100\%$ ket : t = tahun berjalan t-1 = tahun sebelumnya tahun t		
		11	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	Persen	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori industri pengolahan tahun N} - \sum \text{Nilai tambah kategori industri pengolahan tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori pengolahan tahun (N-1)}} \times 100\%$	Dis TK, Kop dan UKP	Badan Pusat Statistik
		12	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (tahun N)} - \sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Tahun (N-1)}} \times 100\%$	Disdag	Badan Pusat Statistik
		13	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun N} - \sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun (N-1)}} \times 100\%$	Distan/Diskan	Badan Pusat Statistik
8	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14	Persentase peningkatan retribusi dan pajak daerah	Persen	$\sum \text{Retribusi dan Pajak Daerah Thn N}$	Bakeuda	Laporan Realisasi Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET	
9	Meningkatnya investasi PMDN	15	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Persen	$\frac{\sum \text{nilai PMDN Tahun N} - \sum \text{nilai PMDN Tahun (N - 1)}}{\sum \text{nilai PMDN Tahun (N - 1)}} \times 100\%$	Dis PMPTSP	Laporan PMDN		
10	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	16	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>)	Nilai (Rp)	Dihitung berdasarkan akumulasi jumlah pengeluaran wisatawan untuk konsumsi akhir dan transfer sosial bekerjasama dengan dinas / instansi / stakeholders terkait dan perhitungan akhir yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik Kab. HSS	Disporapar	Laporan kunjungan wisatawan		
11	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian							
		17	Persentase infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Persen					
		18	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	Persen	$\frac{\sum \text{Panjang jalan kondisi mantap}}{\text{total jumlah panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$	DisPUTR			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET	
		19	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	Persen	$\frac{\sum \text{ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam}}{\sum \text{ketersediaan air irigasi seluruh hektar}} \times 100\%$	Dispera KPLH			
		20	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	Persen	$\frac{\sum \text{Sarana dan prasarana publik yang terbangun}}{\sum \text{sarana dan prasarana publik yang dibutuhkan}} \times 100\%$				
		21	Persentase kecukupan RTH publik	Persen	$\frac{\sum \text{RTH publik yang terbangun}}{\sum \text{RTH publik yang dibutuhkan}} \times 100\%$				
		22	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Persen	$\frac{\text{Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas}}{\text{Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang ada}} \times 100\%$				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET	
		Misi 4 : Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan						
12	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok	23	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	$IDM = \frac{\sum IDM \text{ se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}}$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> $\sum IDM \text{ se Kab.HSS} : \text{Jumlah IDM Desa se Kab.HSS}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> $\sum \text{Desa se Kab.HSS} : \text{Jumlah Desa}$ </div> </div>	Dis.PMD		
13	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	IPG : 1) Umur panjang dan sehat: 1. indikator angka harapan hidup perempuan 2. indeks dimensi : indeks harapan hidup perempuan 3. indeks sebaran merata : indeks / harapan hidup dengan sebaran merata 2) Pengetahuan: 1. indikator AMH perempuan, MYS perempuan 2. Indeks dimensi : indeks pendidikan perempuan 3. Indeks sebaran merata : indeks pendidikan dengan sebaran merata 3) Kehidupan yang layak : 1. Indikator perkiraan pendapatan perempuan 2. Indeks dimensi : indeks pendapatan perempuan 3. Indeks sebaran merata : indeks dengan pendapatan sebaran merata	DPPKBPPA		
		25	Persentase desa/kelurahan layak anak	Persen	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan layak anak}}{\text{Jumlah desa/kelurahan yang ada}} \times 100$			
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	26	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	IKLH dibentuk oleh komponen IKU + IKA + IKTL * IKU = Indeks Kualitas Udara * IKA = Indeks Kualitas Air * IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET	
15	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis						
		27	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%			
		28	Predikat AKIP	Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Bagian Orpad Setda/Inspektora/Seluruh SKPD/bappelitbangda	LHE AKIP	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET
		29	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Predikat	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri dari 6 aspek penilaian yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.	Setda (Bagian Orpad)/Dukcapil/ Dinkes/RSUD Hasan Basry/RSU Daha Sejahtera/Dis.P MLTSP	LHE PELAYANAN PUBLIK	
16	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	30	Opini WTP BPK terhadap LKPD	Predikat	Hasil Audit BPK RI yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah, penyajian laporan keuangan, meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, penguatan dan pengendalian internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Bakeuda	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
		31	Indeks profesionalisme ASN	Indeks	Indeks Profesionalitas ASN merupakan salah satu cara mengukur profesionalisme ASN. Pengukuran dihitung dari data-data : SAPK, E-PUPNS, Sistem Informasi Kepegawaian, Daftar Gaji dan Tunjangan ASN, sasaran kerja pegawai dan pegawai yang terkena hukuman.	BKD		
17	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	32	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	Persen	$\frac{\sum \text{Perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik}}{\sum \text{Perangkat daerah Se – Kab. HSS}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET
		33 Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	Persen	$\frac{\sum \text{Desa yang menggunakan aplikasi TI}}{\sum \text{Desa Se - Kab. HSS}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

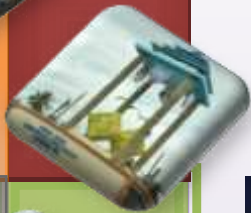


mm

ACHMAD FIKRY



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019



TUGU DODOL

PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telepon (0517) 21076/21526 Kandangan 71211





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP**

Jabatan : **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kandangan, September 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



[Handwritten Signature]
Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

Kabupaten : Hulu Sungai Selatan

Tahun Anggaran : 2019

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1 Harapan lama sekolah	Tahun	12,70	Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 660.112.825
				2 Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,00	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 2.035.039.000
				3 Persentase PAUD formal terakreditasi A	Persen	2,50	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	Rp 1.727.136.175
				4 Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	Persen	6,59	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 18.164.219.600
							Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 9.324.446.000
							Program Peningkatan Budaya Baca	Rp 502.850.000

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN
1		2		3	4	5	6	7
							Program Peningkatan Mutu dan Akses Perpustakaan	Rp 222.536.250
		2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	5 Angka Harapan Hidup	Tahun	66,05	Program Perbaikan Gizi masyarakat	Rp 314.051.000
							Program peningkatan akses sarana dan prasarana kesehatan	Rp 1.480.290.735
							Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kesehatan	Rp 5.300.764.265
							Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rp 31.643.791.000
							Program Promosi kesehatan	Rp 116.232.500
							Program Pengendalian dan pencegahan penyakit	Rp 265.140.600
				6 Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <= 20 tahun	Persen	73,02	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Rp 4.522.722.500
				7 Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	Predikat	AA	Program Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Pelayanan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandungan	Rp 41.205.095.400
				8 Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	Persen	4,35	Program Peningkatan kualitas layanan rumah sakit	Rp 15.705.754.663
							Program Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas dan Jaringannya	Rp 6.107.793.000
							Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Rp 96.621.022.542

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	9 PPH Ketersediaan	Skor	84,61	Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	Rp 761.282.500
							Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Rp 154.585.500
		4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	10 Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	Persen	57,00	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 2.035.039.000
							Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	Rp 1.727.136.175
							Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 18.164.219.600
							Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 9.324.446.000
							Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rp 31.643.791.000
							Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 590.146.200
							Program Peningkatan Akses dan Mutu Air Bersih	Rp 7.645.793.500
							Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	Rp 9.300.534.601
							Program Penegakan Peraturan Daerah	Rp 86.030.000
							Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran	Rp 137.880.000
							Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	Rp 101.150.000

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN		
	1		2	3		4	5	6	7		
		5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	11	Persentase angka PMKS yang mandiri	Persen	56,58	Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Rp 474.195.000		
								Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 590.146.200		
								Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp 63.008.650		
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	6	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	12	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	Persen	5,14	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rp 541.006.500		
				13	Indeks Gini	Indeks	0,318	Program perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Rp 7.740.646.000		
		7	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	14	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,07	Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	Rp 185.143.000		
								Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 17.751.250		
		8	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	15	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	Persen	4,47	Program Peningkatan Mutu Produk Industri	Rp 330.746.000		
				16	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor			Persen	5,38	Program Peningkatan usaha sektor perdagangan	Rp 827.098.000
										Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp 1.572.728.000
								Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan	Rp 4.527.732.000		

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
	1		2	3	4	5	6	7	
				17	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	3,27	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hortikultura Program Peningkatan Populasi Ternak Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	Rp 497.802.500 Rp 407.109.500 Rp 510.041.500 Rp 1.295.568.555 Rp 201.279.200 Rp 201.279.200 Rp 263.534.900 Rp 3.484.281.750 Rp 27.900.000 Rp 775.780.000 Rp 1.599.369.000 Rp 16.551.600
				18	Persentase koperasi sehat	Persen	2,17	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Rp 233.406.000

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN
1		2		3		4	5	6	7
		9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	Rupiah	23 milyar	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan	Rp 479.023.000
								Program Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB	Rp 922.585.000
		10	Meningkatnya investasi PMDN	20	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Persen	4,80	Program Peningkatan Realisasi Investasi	Rp 124.113.000
								Program Penguatan Iklim Investasi	Rp 2.055.000
		11	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	21	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>)	Rupiah	4.224.480.000	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp 4.775.026.000
								Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp 227.170.000
								Program Pengembangan Kemitraan	Rp 102.995.000
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Rp 2.457.099.000								
3	Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	12	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	22	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	Persen	62,45	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 62.066.173.000
								Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 44.998.075.475
								Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Rp 864.544.000
								Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau	Rp 362.979.700

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
	1		2	3	4	5	6	7	
				23	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	Persen	62,68	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp 35.888.505.000
							Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Lainnya	Rp 4.075.067.000	
				24	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	Persen	23,80	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	Rp 17.593.000.000
							Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Rp 7.357.100.000	
							Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	Rp 9.300.534.601	
				25	Persentase kecukupan RTH publik	Persen	24,84	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan areal pemakaman	Rp 4.635.450.000
							Program Penataan dan Penguasaan Tanah	Rp 14.839.670.000	
				26	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Persen	53,05	Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	Rp 6.501.606.000
							Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Rp 7.357.100.000	

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7			
4	Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	13	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	27	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,64	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp 166.665.000
								Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Rp 38.950.000
								Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp 479.656.000
								Program Peningkatan Prestasi Dan Pemasarakatan Olahraga	Rp 952.296.000
		14	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,27	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp 38.497.500
								Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Rp 10.045.000
				29	Persentase desa/kelurahan layak anak	Persen	2,03	Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Rp 92.724.300
								Program Peningkatan Perlindungan Anak	Rp 23.966.000
		15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	30	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	55,08	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 1.214.019.200
								Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 7.141.558.000

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN
1		2		3	4	5	6	7
		16	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	31 Predikat AKIP	Predikat	BB (70,01)	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Rp 309.081.100
							Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp 1.136.503.900
							Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp 15.865.000
							Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 405.721.850
				32 Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Predikat	A (4,51)	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 241.665.900
							Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rp 151.762.500
							Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medik/Non Medik	Rp 17.766.614.637
							Prog.Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Rp 940.795.000
							Program Pelayanan Informasi Data Kependudukan	Rp 242.118.000
							Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	Rp 167.880.000

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
1			2	3	4	5	6	7	
							Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp 956.804.000	
				33	Kualitas aspek perencanaan	Nilai	60,28	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 796.485.000
							Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Rp 59.600.000	
							Program Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 203.100.000	
							Program Perencanaan Pembangunan Sektoral	Rp 358.750.000	
							Program Penelitian dan Pengembangan	Rp 598.427.000	
							Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Rp 645.650.000	
		17	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	34	Opini WTP BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 244.038.000
							Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp 6.160.065.000	
							Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 1.231.185.000	
							Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	Rp 452.524.000	
							Program Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan Keu. Daerah	Rp 58.100.000	

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN
1			2	3	4	5	6	7
				35 Indeks profesionalisme ASN	Indeks	69,77	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 2.142.548.000
							Program Pembinaan Disiplin Aparatur	Rp 117.063.000
							Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rp 623.394.400
							Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Aparatur Daerah	Rp 172.012.750
		18	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	36 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	Persen	13,16	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp 1.320.040.000
							Program Pelayanan Informasi dan Media Massa	Rp 3.425.235.000
							Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah	Rp 88.055.000
				37 Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	Persen	8,33	Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	Rp 217.125.000

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7			
		19	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	38	Persentase peningkatan penerimaan zakat	Persen	8,00	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Rp 6.402.387.500

Kandangan, September 2019



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP